PENGEMBANGAN WILAYAH DI DAERAH OTONOM BARU (Studi Kasus Tiga Kabupaten Pemekaran di Indonesia)

BAMBANG SUPRIYADI

SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2012
PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi “Pengembangan Wilayah Di Daerah Otonom Baru (Studi Kasus Tiga Kabupaten Pemekaran di Indonesia)” adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Bogor, Januari 2012.

Bambang Supriyadi
NRP : A 165050031
ABSTRACT

BAMBANG SUPRIYADI. Regional Development in the New Autonomous Regions: A Case Study on The Three Regencies in Indonesia (ARYA DHARMAWAN as Chairman, SETIA HADI and AKHMAD FAUZI as Members of the Advisory Committee).

Since the 1999 Act No. 22 of Regional Autonomy validated, the process of regional proliferation occurred rapidly and tend to be uncontrollable. During the period of 1999-2004 has formed 148 new autonomous regions, consisting seven provinces, 114 regencies and 27 municipalities, over the 2007 to 2009 period new autonomy regional increased to 57 regencies/municipalities. Amount of autonomy regional in Indonesia became 524 (33 provinces, 398 regencies and 93 municipalities). The aspect which felt viscous in regional expansion is not economic interested. The research was based on 14 expansion district which formed in the 1999-2004, three counties then selected based on simple random sampling. The result, based on entropy diversity index, Rote Ndao and Mamasa Regencies economic development is more spread out and balanced than economy in Rokan Hilir. Rokan Hilir Regency economy activity is more focused on the mining sector. Based on LQ, Rote Ndao Regency based sector is agriculture, trade, restaurants, and hotels and services. Its economic growth rate is higher than population growth rate. In Mamasa Regency, agriculture, electricity, gas, clean water and services is the base sector. Its economic growth rate is higher than population growth rate. Rokan Hilir Regency is based on mining, agriculture, trade, restaurants and hotels. Without oil and gas, the economic growth is higher than population growth, but with oil and gas the economic growth is lower than population growth. Based on IS, Regency of Rote Ndao economy is spreaded, especially in agriculture, trade and services sectors. Mamasa Regency economy is spreaded too, especially in agriculture services, electricity, gas and clean water sector. Rokan Hilir Regency economy centralized in mining, agriculture and trade. Based on SSA, Rote Ndao Regency has negative different shift in all aspect, economic growth influenced by external factor. Mamasa Regency has positive different shift for electricity sector and clean water; agriculture; mining; and banking. Rokan Hilir Regency different shift is positive except for the transport sector and service. Rote Ndao Regency has low GRDP/capita and HDI with high poor resident. Program for poor people and environment is clear and plenty. Mamasa Regency has high HDI, low GRDP/capita and high poor people, has no program for poor people and environment. Rokan Hilir Regency, have high HDI, and GRDP/capita and low poor people. There are program for poor people but no program for environment. Growth machine theory and central place theory applicable in Rote Ndao Regency, but in Rokan Hilir Regency with supported path-goal theory, while in Mamasa Regency did not applicable. Proposed recommendations, the existence Mamasa Regency needs to be revisited, while Rokan Hilir Regency necessary supervision/guidance and Rote Ndao Regency could be maintained. For the newly autonomous regencies better be drawn up in advance strong bureaucracy and functional infrastructure spatial. Moratorium of proliferation regional defended until the laws of regional settlement finished and matching with Desartada 2010-2025 agendas.

Keywords: regional proliferation, GRDP per capita, HDI, poor people
RINGKASAN


Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Rote Ndao panas dan kering, program-program pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dilakukan oleh Bupati dengan membuat ‘embung-embung’ dan mewajibkan warga menanam dan memelihara pohon 5-10 batang per kepala keluarga. Pemerintah daerah serius menangani lingkungan hidup dan sumberdaya alam untuk kelestariannya. Kabupaten Mamasa program-program untuk pelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam kurang. Reboisasi yang dilakukan masih belum memadai dan tidak ada kelanjutannya. Kabupaten Rokan Hilir tidak mempunyai program untuk kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam.

Kabupaten Rote Ndao dapat dipertahankan keberadaannya, sedangkan Kabupaten Mamasa tidak berkembang sehingga keberadaannya patut dipertimbangkan kembali. Kabupaten Rokan Hilir dapat dipertahankan dan dalam melaksanakan otonominya perlu dilakukan pengawasan sehingga dapat lebih berkembang daripada kabupaten induknya. Moratorium pemekaran daerah dipertahankan sampai selesai rancang perundangan yang sesuai dengan agenda Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) 2010-2025.

Kata kunci : pemekaran daerah, PDRB per kapita, IPM, masyarakat miskin
Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2011
Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin IPB
PENGEMBANGAN WILAYAH DI DAERAH OTONOM BARU
(Studi Kasus Tiga Kabupaten Pemekaran di Indonesia)

BAMBANG SUPRIYADI

Disertasi
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Doktor pada
Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan

SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2012
Penguji pada Ujian Tertutup: Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc.Trop (Fakultas Kehutanan IPB)

Dr. Ir. Eka Intan Kumalaputri, MS (Departemen ESL-FEM IPB)

Penguji pada Ujian Terbuka: Prof. Dr. Ir. Bambang Juanda, MS (Ketua Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan-FEM IPB)

Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS (Wakil Rektor IPDN Jatinangor, Jawa Barat)
Nama Mahasiswa  : Bambang Supriyadi
Nomor Pokok   : A165050031

Disetujui
Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan, M.Sc.Agr
Ketua

Dr. Ir. Setia Hadi, MS
Anggota

Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.Sc
Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi
Ilmu Perencanaan Pembangunan
Wilayah dan Perdesaan

Prof. Dr. Ir. Bambang Juanda, MS
Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc.Agr

Tanggal Ujian : 30 Januari 2012
Tanggal Lulus :
PRAKATA


Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi Pembimbing : Bapak Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan, M.Sc.Agr, Bapak Dr. Ir. Setia Hadi, MS, dan Bapak Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.Sc atas bimbingannya sejak nencari ide penelitian sampai proses analisis dan sintesis. Terima kasih penulis haturkan kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Bambang Juanda, MS dan Bapak Dr. Ir. Ernan Gustiadi, M.Agr yang banyak mengkritisi proses penyusunan disertasi ini pada saat ujian preliminasi tahap II.

Terima kasih penulis haturkan kepada Rektor IPDN Jatinangor, Bapak Prof. Dr. I Nyoman Sumaryadi, M.Si yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk selanjutkan studi di Sekolah Pascasarjana IPB, Wakil Rektor IPDN, Bapak Prof. Dr. adu Wasistiono, MS yang telah membantu dengan ide-ide pemikirannya. Terima kasih juga penulis haturkan kepada Dekan Fakultas Politik Pemerintahan dan Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN yang telah memberikan kebebasan kepada penulis untuk menyelesaikan studi. Terima kasih penulis haturkan kepada Direktur Pascasarjana MAPD IPDN, Bapak Prof. Dr. Khasan Effendy, M.Pd yang selalu memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi. Terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa Program S3 PWD terutama angkatan 2005 dan 2006. Terimah kasih dihaturkan kepada kedua orang tua penulis, Bapak Achmad Hadi Atmodjo (almarhum) dan Ibu Sudiyah (almarhumah) atas doa dan restunya selama beliau masih sehat supaya penulis segera menyelesaikan studi, kedua mertua Bapak Ramidi Mangkusaputro (almarhum) dan Ibu Siti Sutamsi atas doa dan restunya. Terima kasih yang tidak terhingga kepada isteri penulis, Rr. Titin Sapartini yang telah mendorong, membantu dan menemani serta perhatian dan pengertianya selama penulis menyelesaikan studi, anak-anak penulis Arum Rokhkusumasistha, S.Kom, Adya Nurkusumaprama, SP dan Anindita Trikusumapratita atas pengertian dan dorongannya kepada penulis untuk segera menyelesaikan studi. Terima kasih juga penulis tujuan kepada Bupati Rote Ndao, Bapak Drs. Leonard Haning, MM dan jajarannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa, Bapak Benhard Bunthu Tiboyong, MH dan jajarannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Bapak Syamsuddin, SH dan jajarannya yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk memperoleh data yang penulis butuhkan dalam penelitian, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala bantuan yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa keterbatasan ilmu dan pemahaman yang penulis miliki membuat disertasi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan. Atas perhatian semua pihak penulis haturkan terima kasih.

Bogor, Januari 2012.

Bambang Supriyadi
RIWAYAT HIDUP


Adapun karya ilmiah yang akan penulis terbitkan :

PERSEMBAHAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH
Buat Isteri dan Anak-Anakku Tercinta
“Rr. Titin Sapartini, Arum Rokhkusumasistha, S.Kom;
Adya Nurkusumaprama, SP; dan Anindita
Trikusumapratita”
Atas pengertian, pengorbanan, perhatian dan Do’anya
dalam mendukung suami dan ayahnya untuk
menyelesaikan pendidikan S3 ini di Institut Pertanian
Bogor, semoga ilmu ini menjadi amal jariah untuk kedua
orang-tuaku (almarhum/almarhuham) dan bapak mertua
(almarhum) dan dapat menyemangati anak-anakku
untuk meraih mimpi dan cita-citanya yang setinggi
langit

KEPADA ALLAH SWT
Kami berdo’a: “Ya Tuhan-ku, Tambahkanlah Kepadaku
Ilmu Pengetahuan”

وقل رب زدنيعلما
[Waqurrobbizidni ‘ilmān]
(QS, Thaha : 114)
DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL ........................................................................................................... xxiii

DAFTAR GAMBAR .................................................................................................... xxv

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................. xxvi

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1
  1.1 Latar Belakang ..................................................................................................... 1
  1.2 Perumusan Masalah ............................................................................................ 5
  1.3 Tujuan Penelitian ............................................................................................... 7
  1.4 Ruang Lingkup dan Batasan Studi ..................................................................... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................................... 9
  2.1 Pemekaran Wilayah ........................................................................................... 9
  2.2 Desentralisasi dan Otonomi Daerah ................................................................. 17
  2.3 Desentralisasi Fiskal ......................................................................................... 22
  2.4 Pengembangan Wilayah .................................................................................... 25
  2.5 Pengembangan Wilayah di Era Desentralisasi ................................................. 34
  2.6 Pembangunan Ekonomi Daerah ....................................................................... 38
  2.7 Birokrasi Era Otonomi Daerah ....................................................................... 39
  2.8 Sosial Kemasyarakatan .................................................................................... 41
  2.9 Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam di Era Otonomi Daerah .................................................................................................................. 42
  2.10 Penelitian-penelitian sebelumnya.................................................................... 44
  2.11 Kerangka Pikir Penelitian ............................................................................... 45

BAB III METODE PENELITIAN .............................................................................. 51
  3.1 Variabel Penelitian dan Operasionalisasi Variabel ......................................... 52
  3.2 Data dan Sumber Data ...................................................................................... 55
  3.3 Teknik Analisis Data ......................................................................................... 56
  3.3.1 Analisis Klassen ............................................................................................. 56
  3.3.2 Location Quotient ......................................................................................... 57
  3.3.3 Indeks Spesialisasi ......................................................................................... 58
  3.3.4 Shift Share Analysis ....................................................................................... 59
  3.3.5 Indeks Diversitas Entropy ............................................................................. 61
  3.3.6 Indeks Williamson ......................................................................................... 61

BAB IV EKONOMI WILAYAH DI TIGA DAERAH OTONOMI BARU
  DI INDONESIA ........................................................................................................... 65
  4.1 Klasifikasi Kabupaten Pemekaran ................................................................... 65
  4.2 Pembangunan Ekonomi di Tiga Kabupaten Pemekaran ............................... 70

xxv
4.2.1 Kesejahteraan Masyarakat di tinjau dari Pembangunan ekonomi .......................... 70
4.2.1.1 Indeks Diversitas Entropy ........................................ 73
4.2.1.2 Kabupaten Rokan Hilir ............................................. 73
4.2.1.3 Kabupaten Rote Ndao ............................................. 75
4.2.1.4 Kabupaten Mamasa .................................................. 77
4.2.2 Kesejahteraan Masyarakat ditinjau dari tingkat kemiskinan ........................................ 81
4.2.2.1 Kabupaten Rokan Hilir ............................................. 83
4.2.2.2 Kabupaten Rote Ndao ............................................. 83
4.2.2.3 Kabupaten Mamasa .................................................. 77
4.2.2.4 Hubungan PDRB per kapita dan Pembangunan Manusia ........................................ 86
4.2.2.4.1 Kabupaten Rokan Hilir ............................................. 88
4.2.2.4.2 Kabupaten Rote Ndao ............................................. 89
4.2.2.4.3 Kabupaten Mamasa .................................................. 91
4.2.3 Kesejahteraan masyarakat ditinjau dari pelayanan publik di tiga kabupaten pemekaran .................. 94
4.2.3.1 Kabupaten Rokan Hilir ............................................. 97
4.2.3.2 Kabupaten Rote Ndao ............................................. 98
4.2.3.3 Kabupaten Mamasa .................................................. 102
4.2.4 Kesejahteraan masyarakat ditinjau dari sosial kemasyarakatan di tiga kabupaten pemekaran .......... 105
4.2.4.1 Kabupaten Rokan Hilir ............................................. 106
4.2.4.2 Kabupaten Rote Ndao ............................................. 107
4.2.4.3 Kabupaten Mamasa .................................................. 108
4.2.5 Kesejahteraan masyarakat ditinjau dari lingkungan hidup di Tiga Kabupaten Pemekaran ............... 110
4.2.5.1 Kabupaten Rokan Hilir ............................................. 110
4.2.5.2 Kabupaten Rote Ndao ............................................. 111
4.2.5.3 Kabupaten Mamasa .................................................. 115
4.2.5.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD) ................................ 117

BAB V ANALISIS KEWILAYAHAN SOSIAL-EKONOMI-LINGKUNGAN DI DAERAH PEMEKARAN ................. 125
5.1 Kesejahteraan masyarakat di tiga kabupaten pemekaran ........................................ 125
5.1.1 Modifikasi Klassen Tipology ........................................ 125
5.1.2 Kesejahteraan masyarakat ditinjau dari pembangunan ekonomi di tiga kabupaten pemekaran ........................................ 130
5.1.2.1 Hubungan PDRB per kapita dengan pembangunan manusia ........................................ 134
5.1.3 Kesejahteraan manusia ditinjau dari persentase penduduk miskin dan pembangunan manusia ........ 139
5.1.4 Kesejahteraan manusia ditinjau dari pelayanan publik ........................................ 142
5.1.5 Kesejahteraan masyarakat ditinjau dari sosial kemasyarakatan di tiga kabupaten pemekaran........ 146
5.1.6 Kesejahteraan masyarakat ditinjau dari sumberdaya alam dan lingkungan hidup di tiga kabupaten pemekaran ...................................................................................................................... 150
5.2 Perkembangan tiga kabupaten pemekaran dibandingkan induknya ................................................................. 156
5.3 Mengkontruk teoritik untuk kebijakan perkembangan wilayah ................................................................................. 160
5.4 Ikhtisar ................................................................................................................................................................. 163

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN ................................................................. 165
6.1 Simpulan ................................................................................................................................................................. 165
6.2 Saran ........................................................................................................................................................................ 168

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................. 171

LAMPIRAN ............................................................................................................................................................... 177
### DAFTAR TABEL

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabel</th>
<th>Halaman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3. Persepsi Keadaan di Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Berjalan (N=1,240, dalam %)</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Kekuatan dan Kelemahan Sistem Sentralisasi dan Desentralisasi dalam Pengelolaan Wilayah</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Operasionalisasi Variabel Penelitian</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Analisis Kabupaten Pemekaran Berdasarkan Aspek-aspek Penelitian...</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Kategori Jawaban Responden Berdasarkan Skala Likert</td>
<td>62</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Kategori Jawaban Responden Berdasarkan Persentase</td>
<td>63</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Matrik Klasifikasi 114 Kabupaten Pemekaran menurut Klassen Typology</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>13. Perekonomian, Program Pro Rakyat dan Pelayanan di Tiga Kabupaten Pemekaran</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>14. Kondisi Sosial Kemasyarakatan di Tiga Kabupaten Pemekaran........</td>
<td>111</td>
</tr>
<tr>
<td>15. Pendapatan Asli Daerah dan Persepsi Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup di Tiga Kabupaten Pemekaran</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>16. Hasil analisis data di tiga kabupaten pemekaran dibandingkan kabupaten induknya</td>
<td>128</td>
</tr>
<tr>
<td>17. Matrik Analisis Kondisi Tiga Kabupaten Pemekaran</td>
<td>137</td>
</tr>
</tbody>
</table>
# DAFTAR GAMBAR

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gambar</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Rekapitulasi Usulan Kelompok Kerja Tim 7</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Prinsip Administrip (k=7)</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Kerangka Pemikiran Penelitian</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Matrik klasifikasi 114 kabupaten pemekaran menurut Klassen tipologi</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Matrik pengelompokan 114 kabupaten pemekaran berdasarkan Klassen tipologi yang dimodifikasi</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Matrik hubungan laju ekonomi dengan PDRB per kapita</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Matrik hubungan PDRB per kapita dengan IPM</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Matrik hubungan IPM dengan penduduk miskin</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Matrik hubungan pelayanan publik dengan PAD/APBD</td>
</tr>
<tr>
<td>10. Matrik hubungan kondisi sosial masyarakat dengan PAD/APBD</td>
</tr>
<tr>
<td>11. Matrik hubungan persepsi masyarakat tentang lingkungan hidup dengan AD/PDRB di tiga kabupaten</td>
</tr>
</tbody>
</table>
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran
1. Rekomendasi Penelitian Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Mamasa dan Rokan Hilir................................................................. 177
2. Analisis Klassen Typology.......................................................... 197
3. Pendukung Klassen Typology..................................................... 200
4. Peta Klasifikasi menurut Klassen Tipology.................................. 203
5. Data Pendukung Analisis ............................................................. 217
6. Indeks Diversitas Entropy Tiga Kabupaten Pemekaran.................. 218
6a. Indeks Williamson Kabupaten Rote Ndao ............................ 219
7. LQ, SSA ............................................................................... 221
8. Data Pendukung Analisis 2 ......................................................... 223
9. Kinerja birokrasi di tiga kabupaten pemekaran.............................. 226
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kontruksi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Bab VI yang terdiri dari Pasal 18, 18A dan 18B. Berdasarkan konstruksi itu, penyelenggaraan pemerintah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan provinsi dibagi lagi menjadi daerah-daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, kabupaten dan kota merupakan daerah yang diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang berdasarkan pada asas otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. Hak, kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lebih diarahkan pada pemenuhan kepentingan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai penjabaran UUD 1945 pada Pasal 18, 18A, dan 18B menggariskan bahwa maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah tersebut adalah untuk memacu kesejahteraan, penerapan pembangunan dan hasil-hasilnya serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat ditandai dengan penurunan jumlah masyarakat miskin, tersedianya lapangan pekerjaan, tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai di setiap wilayah; meningkatnya prakarsa dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab.

Otonomi daerah diharapkan meningkatkan prakarsa dan peran serta masyarakat yang terlibat dalam partisipasi warga masyarakat pada saat pemilihan kepala daerah pemilihan umum, ikut serta warga masyarakat dalam mengontrol pelaksanaan pembangunan, ikut serta memelihara hasil-hasil pembangunan; serta memperkuat satuan dan kesatuan bangsa yang berupa kesadaran membantu kesengsaraan atau bencana yang dialami masyarakat di tempat lain di Indonesia, tidak diskrimatif, tidak menbedakan asal suku bangsa. Selain hal itu, otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang ditandai oleh semakin cepat, murah, akurat dan adil dalam pelayanan, dan daya saing daerah yang semakin tinggi dengan adanya perekonomian daerah yang semakin meningkat, sarana dan prasarana.
yang semakin banyak dan memadai, semakin banyak investasi yang masuk, pendidikan masyarakat yang semakin tinggi dan angka ketergantungan yang semakin rendah.

Sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban daerah (provinsi atau kabupaten/kota) sebagai daerah otonom yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Bab IV Bagian Ketiga Pasal 21 dan Pasal 22 tersebut yaitu mengenai hubungan hak dan kewajiban daerah berupa hubungan antara penggunaan sumberdaya-sumberdaya (input) dengan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara fisien dan efektif. Oleh karena itu sebagai daerah otonom (kabupaten/kota) diberi hak, berkewenangan dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kepada daerah diberikan sejumlah urusan pemerintahan dalam upaya mengelola sumber-sumber keuangan untuk membiayai jalannya roda pemerintah, penyediaan pelayanan publik, dan pembangunan daerah.

Singkatnya, Pemerintah menetapkan kebijakan otonomi daerah, sedangkan daerah otonom melaksanakan (to exercise) kewenangan yang diberikan Pemerintah tersebut. Dengan demikian, pemerintah daerah harus dapat menggali sumberdaya yang dimiliki daerah yang akan digunakan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan cara memberi perlindungan, menyediakan pelayanan, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan keunggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Salah satu aspek yang sangat penting dari pelaksanaan otonomi daerah pada saat ini adalah terkait dengan pemekaran dan ataupun penggabungan wilayah yang bertujuan untuk memperkuat hubungan interaksional antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam rangka pertumbuhan kehidupan demokrasi. Pemerintah Daerah lebih aspiratif terhadap aspirasi masyarakat dan kebijakan-kebijakan yang dibuat menguntungkan rakyat, sebaliknya ada pula yang tidak responsif terhadap aspirasi rakyat. Dengan interaksi yang lebih intensif antara masyarakat dan pemerintah daerah otonomi yang baru, maka masyarakat sipil diharapkan akan memperoleh hak-hak kewajiban-kewajibannya secara lebih baik sebagai warga negara.

Dalam fenomena otonomi daerah diberlakukan, proses pemekaran terjadi begitu pesat dan cenderung tidak terkendali. Terdapat 7 (tujuh) propinsi, 135 kabupaten dan 32 kota yang dibentuk sebagai hasil pemekaran sesuai dengan daftar yang dikeluarkan oleh DPD pada September 2007. Aspek yang kental terasakan adalah justru bermainnya kepentingan pribadi, kelompok, etnis, agama, budaya yang dipicu rasa kecemburuan.
sosial, rasa iri, ambisi untuk menjadi penguasa di daerah dan sebagainya (DRSP, 2007).


Kabupaten pemekaran sebagai daerah otonomi baru sebanyak 114 kabupaten tersebut berdasarkan kajian Yulistiani, dkk (2007) dibandingkan dengan kabupaten induknya berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita. Ada sebanyak 60 kabupaten pemekaran yang pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dari kabupaten induknya dan sebanyak 54 kabupaten pemekaran yang pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari kabupaten induknya. Hal ini dapat berarti kabupaten pemekaran yang pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dari kabupaten induknya, mungkin dulunya merupakan daerah yang telah berkembang sebelum pemekaran atau daerah penyumbang pada APBD terbesar bagi kabupaten sebelum pemekaran. Kabupaten pemekaran yang pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari kabupaten induknya ada kemungkinan sebelumnya merupakan daerah yang terabaikan dalam pembangunan atau daerah yang potensinya memang kurang memadai (lihat Lampiran 1).

Hasil studi Departemen Ilmu Ekonomi FEUI (2005) menyimpulkan bahwa pemekaran wilayah yang selama ini diatur terlihat belum secara anggun athang

...
1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:


Bengalon yang berjumlah 73.981 jiwa (45,69%) dari 203.156 jiwa, total penduduk Kutim.


Dengan demikian timbul pertanyaan, bagaimana pengembangan wilayah di kabupaten hasil pemekaran wilayah yang menjadi daerah otonom baru selama ini? Selanjutnya, latar belakang dan identifikasi masalah tersebut memunculkan rumusan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan kajian pemekaran wilayah sebagai daerah otonom baru dalam pengembangan wilayah di Indonesia sebagai berikut:

1) Bagaimanakah perkembangan daerah otonom baru dilihat dari kesejahteraan masyarakatnya?
2) Bagaimanakah perkembangan daerah otonom baru dilihat dari pengembangan wilayah induknya?
3) Bagaimanakah implikasi teori pengembangan wilayah bagi pembuatan kebijakan yang menyangkut daerah otonomi baru?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian bertujuan untuk mengkaji pemekaran wilayah sebagai daerah otonom yang baru dalam pengembangan wilayah di Indonesia dan secara rinci penelitian bertujuan:

1) Menganalisis kesejahteraan masyarakat ditinjau dari pembangunan ekonomi, tingkat kemiskinan, pelayanan publik, sosial kemasyarakatan dan keberlanjutan lingkungan hidup di kabupaten pemekaran.

Menguraikan pengembangan wilayah di daerah otonom baru dibandingkan induknya.

Menyusun konstruksi teoritik pengembangan wilayah.

Ruang Lingkup dan Batasan Studi

Agar kegiatan penelitian dapat dilakukan dengan baik dan dalam rangka mencapai tujuan penelitian sebagaimana dikemukakan, maka penelitian mengenai pemekaran wilayah sebagai daerah otonom baru dalam pengembangan wilayah
di Indonesia dibatasi di tiga kabupaten pemekaran yaitu Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Mamasa, dan dikaji dari penyelenggaraan pemerintah daerah pada pembangunan ekonomi daerah yang diarahkan untuk mencapai (1) pertumbuhan ekonomi, (2) pemerataan, (3) keberlanjutan ekosistem (Anwar dan Rustiadi, 2000), pelayanan publik dan sosial kemasyarakatan.

Ditinjau lebih lanjut kinerja kabupaten pemekaran sebagai daerah otonomi baru yang dapat dilihat dari kesejahteraan masyarakat (penduduk miskin), IPM, pelayanan publik, daya saing daerah dan potensi daerah. Kesejahteraan masyarakat dapat direpresentasikan dari persentase penduduk miskin yang rendah dan hal ini mengindikasikan kinerja birokrasi yang efisien. Indek Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar (basic capabilities) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah (1) tingkat kesehatan yang tercermin dengan umur panjang dan sehat yang mengukur peluang hidup, (2) berpengetahuan dan berketerampilan, serta (3) akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak (Rustiadi, et al., 2009). Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan lainnya. IPM yang tinggi secara tidak langsung akan mencerminkan standar pelayanan yang tinggi pula. Daya saing daerah outputnya adalah peningkatan perekonomian daerah dan sebagai outcomes adalah kesejahteraan masyarakat (Yulistiani, et al., 2007). Apabila kesejahteraan masyarakat dapat dicapai maka pemberdayaan masyarakat telah berjalan dengan baik.

Selanjutnya ketiga kabupaten pemekaran sebagai daerah otonomi baru akan dianalisis berdasarkan ‘teori prinsip administrasi k=7’ dari Christaller dan ‘teori mesin pertumbuhan’ dari Molotch.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemekaran Wilayah


Pemekaran wilayah (Wasistiono, 2009) yang membentuk daerah otonomi baru akan berpengaruh pada perkembangan pada aspek biofisik lingkungan, aspek ekonomi manajemen, aspek sosial budaya/kelembagaan, aspek politik dan aspek tata ruang sebagai porosnya – Falsafah pendekatan PWD dapat disarikan sebagai tetrahedral yang tuan atas empat pilar yaitu : aspek biofisik lingkungan (A), aspek ekonomi manajemen (B), aspek sosial budaya/kelembagaan (C), aspek politik (D), dengan aspek tata ruang (E) sebagai porosnya (leaflet, Program Doktor PWD IPB) – karena adanya perubahan ruang wilayah daerah otonomi yang ada (induk) maupun yang baru terbentuk. Tujuan dari pemekaran daerah dalam teori pengembangan wilayah adalah mengurangi adanya kesenjangan antarwilayah dengan pendekatan komprehensif meliputi aspek fisik, ekonomi, sosial dan budaya serta memberikan saranan berorientasi pada kepuasan pelanggan (masyarakat).

perpolitikan pemekaran Pemda tersebut, elit lokal pejuang pemekaran mengkombinasikan pemanfaatan mekanisme sosial ekonomi untuk pendanaan, di samping menggunakan mekanisme sosial politik primordial, bahkan ada yang memanfaatkan kekerasan fisik, untuk membentuk kekuatan politik dan pengaruh, bagi keberhasilan tujuannya. Sumbangan dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan pembentukan Pemda baru, adalah andalan elit lokal pejuang pemekaran daerah pemerintahan. Mereka itu yang punya akses terhadap sumber dana, memberi kontribusi yang berharga.


Katakan Azra selanjutnya, jika UU No. 32/2004 menekankan, bahwa pembentukan daerah baru juga adalah perlindungan partisipasi politik rakyat, ekses yang ditekankan dalam Pilkada adalah meningkatnya manipulasi politik; misalnya dalam bentuk merajalelanya ‘politik uang’ (money politics) dalam berbagai cara. Akibatnya, sering terjadi kekisruhan dalam Pilkada, yang bukan tidak sering
berakhir dengan tindakan kekerasan dan anarki dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dan kalah dalam proses-proses politik yang mereka anggap tidak fair tersebut. Menurut catatan berbagai kalangan, dari 244 Pilkada sepanjang Januari-Juni 2010, hanya 35 yang relatif tidak bermasalah, sebagian besar lainnya berujung pada sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Ekses yang tak kurang negatifnya adalah semakin mahalnya biaya Pilkada\(^1\) (Azra, 2010).


---

1. Dilengkapi dengan data dan catatan kebijakan pemerintah dan orang lain.
2. Dilengkapi dengan data dan catatan kebijakan pemerintah dan orang lain.

1. Diharapkan peningkatan pelayanan otonomi lokal di Kabupaten Bungo-Tebo dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat, dengan peningkatan efisiensi dan kemampuan dalam melayani masyarakat, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

2. Peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan otonomi lokal di Kabupaten Bungo-Tebo dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan daerah, dengan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan daerah.


Tujuan pemekaran untuk mensejahterakan masyarakat juga belum dapat dilaksanakan sebagaimana temuan penelitian Farida (2010) di Kabupaten Bungo di awal pemekaran dan hingga penelitian dilakukan, pengangguran terus meningkat hingga 35,5% (9.121 orang) yang sebelumnya di awal pemekaran hanya 23,44% (5.883 orang). Di Kabupaten Tebo, awal pemekaran jumlah pengangguran sebanyak 378 orang menjadi 3.565 orang (naik 89,39%) pada saat penelitian. Jumlah masyarakat yang tergolong ke dalam kategori pra-sejahtera menurun sebesar 11,5% (dari 24% menjadi 12,5%) di Kabupaten Bungo, sedangkan di Kabupaten Tebo penurunannya hanya 3,9% (dari 18,9% menjadi 15%). Jumlah ini masih sangat kecil untuk waktu sepuluh tahun setelah pemekaran dilakukan. Selain itu, selama sepuluh tahun pemekaran dilakukan, sebagai kepala keluarga di dua kabupaten sebagian besar merupakan keluarga sejahtera golongan II (KS II). Dari awal pemekaran hingga sekarang, tidak ada peningkatan di masyarakat dan sebagian besar dari mereka tetap berada di golongan ini. Hal ini menunjukkan bahwa, perubahan untuk mensejahterakan masyarakat belum berhasil dilaksanakan.


Tabel 1 Hasil Evaluasi terhadap Kinerja 148 Daerah Otonom Baru Tahun 2004 dan 2005

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kategori Penilaian</th>
<th>Tahun 2004</th>
<th>Tahun 2005</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Indeks Kinerja Daerah Otonom Baru Parameter Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</td>
<td>42,58</td>
<td>23,41</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Indeks Kinerja Daerah Otonom Baru Parameter Pelayanan Publik</td>
<td>35,83</td>
<td>36,76</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Indeks Kinerja Daerah Otonom Baru Parameter Daya Saing Daerah</td>
<td>66,27</td>
<td>64,41</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Indeks Kinerja Secara Umum Daerah Otonom Baru</td>
<td>46,8</td>
<td>40,22</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Tabel 2 Hasil rekapitulasi pembentukan daerah otonom baru dari tahun 1999 – 2008

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bentuk daerah otonom</th>
<th>Inisiatif pemerintah</th>
<th>Inisiatif DPR-RI</th>
<th>Jumlah seluruhnya</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Provinsi</td>
<td>2</td>
<td>5</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Kabupaten</td>
<td>90</td>
<td>73</td>
<td>163</td>
</tr>
<tr>
<td>Kota</td>
<td>25</td>
<td>8</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Jumlah</strong></td>
<td><strong>117 (57,64%)</strong></td>
<td><strong>86 (42,36%)</strong></td>
<td><strong>203 (100%)</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>


Walaupun otonomi daerah mempunyai kelebihan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mendekatkan pada masyarakat, tetapi ada kerugianya sebagaimana dikatakan Suparmoko (2002), dalam hal-hal tertentu pemerintah daerah akan tergang efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan yang ada. Sebagai
misal bila pemerintah daerah diminta untuk menyediakan barang publik nasional seperti pertahanan dan keamanan nasional, masalah pemerataan penghasilan (redistribusi penghasilan) dan pemecahan masalah ekonomi makro, tentu hasilnya tidak akan memuaskan.


<table>
<thead>
<tr>
<th>Bidang</th>
<th>Tidak tahu</th>
<th>Lebih buruk</th>
<th>Tak ada perubahan</th>
<th>Lebih baik</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kesehatan</td>
<td>4</td>
<td>12</td>
<td>20</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>Pendidikan</td>
<td>5</td>
<td>9</td>
<td>25</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>Keamanan dan Ketertiban</td>
<td>4</td>
<td>12</td>
<td>36</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>Pemberantasan Korupsi</td>
<td>12</td>
<td>17</td>
<td>35</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>Pengangguran</td>
<td>4</td>
<td>40</td>
<td>33</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>Kemiskinan</td>
<td>4</td>
<td>34</td>
<td>34</td>
<td>27</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa pemekaran daerah menjadi daerah otonomi baru belum berhasil menghantarkan kesejahteraan masyarakat dan tidak dapat mengatasi persoalan yang telah ada sebelum pemekaran, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang pembentukan daerah yang baru tersebut. Dengan demikian pembentukan daerah baru perlu adanya grand design dan blue print yang jelas dari awalnya yang tidak sedikit dan menambah beban anggaran pemerintah, tetapi hasilnya tidak signifikan dengan tujuan pemekaran wilayah itu sendiri.

dan anggota DPRD (124 kasus). Sebagian besar korupsi tersebut dilakukan melalui perda APBD dan perda yang terkait dengan perizinan. Fakta ini menggambarkan apa yang dikenal sebagai korupsi "bergeroyok" yang melibatkan Kepala Daerah bersama-sama dengan DPRD yang "bibit" korupsi sudah muncul sejak proses perumusan program dan anggaran APBD. Korupsi demikian menjadi seolah-olah legal (legalized corruption) dan terencana (corruption by design).

Berdasarkan hasil analisis para ahli Keuangan, Ekonomi, Geografi, Kependudukan, Manajemen Pemerintahan, Adminsitrasri Publik, Pertahanan Keamanan serta Politik dan Sosial Budaya (Anonim, 2008) yang kemudian terkelompokkan dalam kelompok kerja sesuai dengan keahliannya tergabung dalam suatu tim, menentukan Grand design penataan daerah (untuk provinsi) menggunakan pendekatan yang berbeda sesuai dengan bidang keilmuannya, maka bobot paling tinggi untuk pemekaran wilayah (propinsi) adalah ekonomi (bobot 27), pertahanan keamanan (bobot 17), demografi, keuangan dan administrasi publik (masing-masing bobot 13), manajemen pemerintahan (bobot 10), serta geografi, politik dan sosial budaya (masing-masing bobot 3) dengan total bobot = 100.

Berdasarkan rekapitulasi usulan Kelompok Kerja Tim 7, maka pemekaran provinsi akan menjadi 33 sampai dengan 88 provinsi sebagaimana diagram di bawah.

![Diagram Rekapitulasi Usulan Kelompok Kerja Tim 7 (Anonim, 2008).](image)

Gambar 1: Rekapitulasi usulan Kelompok Kerja Tim 7 (Anonim, 2008).

Oleh karena itu, ukuran dasar dari otonomi bukan terletak pada janji dan sejumlah komitmen dari elit politik lokal waktu memperjuangkan pembentukan daerah otonomi baru, tetapi menurut Mahardika (2000) pada riil praktek: apakah otonomi benar-benar
akan menempatkan rakyat pada posisi terhormat, ataukah rakyat tetap saja sebagai obyek dari elit politik. Dengan demikian yang harus dilihat adalah apakah dengan otonomi daerah elit lokal menjadi bertambah dekat dengan rakyat ataukah sebaliknya.


Dengan kerangka pikir tersebut, akan dapat terbentuk daerah otonom yang maju mandiri yaitu daerah yang didirikan di atas rupabumi yang memenuhi syarat luas dan luasan minimal sehingga mampu berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal maupun regional, serta didiami oleh sejumlah minimal penduduk sendiri sebagian besar urusan masyarakat setempat.

Dengan adanya pemekaran wilayah menjadi daerah otonomi baru, maka elit politik lokal akan lebih dekat dengan rakyat, sehingga dapat diharapkan pelayanan publik akan menjadi fokus penyelenggaraan pemerintahannya sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerah otonomi baru akan tinggi, dan perekonomian daerah maju. Dampaknya, kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan otonomi daerah akan tercapai. Dengan demikian pemekaran daerah menjadi daerah otonomi yang baru menimbulkan multiplier effect bagi perekonomian daerah yang pada ujungnya dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Pada era reformasi disahkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan UU No. 5 Tahun 1974 yang telah berlaku lebih dari 25 tahun mengubah pola hubungan pusat – daerah yang selama ini bersifat kental secara paternalistik dan sentralistik, menjadi pola hubungan yang bersifat kemitraan.
1. Perubahan paradigma ini merupakan suatu gerakan kembali penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik dalam arti kembali kewenangan itu didesentralisasi ke daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tersebut ternyata membawa dampak yang mengarah pada disintegrasi, maka direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang menyebutkan hubungan antara penggunaan sumber-sumber daya (input) dengan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara efisien dan efektif. Oleh karena itu sebagai daerah otonom, daerah diberi hak, kewenangan dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.


Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintahan ke pihak swasta dalam bentuk privatatisasi. Pemerintah dalam berbagai tingkatan harus dapat menjadi katalis: fokus pada pemberian pengarahan bukan pada produksi pelayanan publik. Produksi pelayanan publik harus menjadikan sebagai pengendalian dan bukan keharusan. Pada masa yang akan datang, pemerintah pada semua tingkatan harus fokus pada fungsi-fungsi dasarnya, yaitu: penciptaan dan modernisasi lingkungan legal dan regulasi; pengembangan suasana yang kondusif bagi proses alokasi sumberdaya yang efisien; pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan desentralistik.
dan infrastruktur; melindungi orang-orang yang rentan secara fisik maupun non-fisik; serta meningkatkan dan konservasi daya dukung lingkungan hidup (Mardiasmo, 2002).

Dalam sistem desentralisasi, ada pengalihan kewenangan mengambil perencanaan, pengambilan keputusan, dan kewenangan administratif, dari pemerintah pusat ke daerah. Dalam pengertian ini, sistem desentralisasi melakukan pengurangan kewenang pemerintah pusat melalui pengalihan ke daerah. Dominasi kekuasaan pusat (sentralisasi) diganti dengan penyebaran kekuasaan (desentralisasi). Pengalihan kewenangan ini betujuan tercapainya keseimbangan kekuasaan antara pusat dengan daerah.


Argumentasi untuk memilih desentralisasi atau otonomi daerah telah banyak diungkapkan para pakar antara lain, Rondinelli, Cheema (2003) yang menyampaikan paling tidak 14 alasan yang merupakan rasionalitas dari desentralisasi, yaitu (1) perencanaan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah; (2) memotong jalur birokrasi; (3) hubungan intensif antara pejabat dengan masyarakat; (4) peningkatan penetrasi dari pemerintah pusat pada daerah-daerah terpencil; (5) representasi yang lebih luas; (6) peningkatan kapasitas pemerintah dan lembaga privat di daerah; (7) meningkatkan efisiensi pemerintah di pusat; (8) peningkatan koordinasi dalam program pemerintah; (9) melembagakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan implementasi program; (10) meningkatkan pengawasan atas aktivitas yang dilakukan elite lokal; (11) administrasi pemerintah menjadi mudah disesuaikan, yaitu, dan kreatif; (12) pelayanan fasilitas akan lebih efektif ditetapkan oleh lembaga daerah; (13) medapatkan stabilitas politik dan kesatuan nasional dengan menerima peluang kepada berbagai kelompok masyarakat di daerah untuk partisipasi dalam perumusan kebijaksanaan; (14) meningkatkan penyediaan barang dan jasa di tingkat lokal dengan biaya yang lebih rendah.
Berbagai argumentasi yang mendukung desentralisasi antara lain dikemukakan oleh Litvack and Seddon (1998) yang mengatakan bahwa desentralisasi adalah transfer kewenangan dan tanggungjawab fungsi publik dari pemerintah pusat kepada daerah di bawahnya atau kepada organisasi semu pemerintah ataupun kepada sektor swasta. Karena itu, kata Khusaini (2006) pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimal atau paling rendah tingkat birokrasi (hirarkhinya) karena:

a. Pemerintah lokal sangat menghayati kebutuhan masyarakatnya.

b. Keputusan pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat.

c. Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan inovasinya.

Desentralisasi dan otonomi daerah dengan demikian diharapkan mampu membawa suatu daerah menjadi daerah yang mandiri, memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, melaksanakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat dengan memberdayakan masyarakat dan sebagainya, sehingga tujuan akhirnya adalah mensejahterakan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan desentralisasi akan sangat tergantung pada desain, proses implementasi, dukungan politis baik pada tingkat pengambilan keputusan di masing-masing tingkat pemerintahan maupun masyarakat secara keseluruhan, kesiapan administrasi pemerintahan, pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia, mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kinerja aparatur birokrasi, perubahan sistem nilai dan perilaku birokrasi dalam memenuhi keinginan masyarakat khususnya dalam pelayanan sektor publik serta otonom dan keterkaitan semua unsur sehingga terjadi sinergi dalam mensejahterakan masyarakat.

Desentralisasi dan otonomi daerah adalah baik dan positif bagi pemerintah dan rakyat di daerah, utamanya dalam aspek pemerataan dan keadilan. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah akan membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Demokrasi ekonomi sebagaimana terkandung dalam asas kekeluargaan (Pasal 33 UUD 1945) akan berkembang yaitu produksi akan kerjaan oleh semua dan untuk semua di seluruh wilayah Indonesia. Peluang berkembangnya demokrasi ekonomi melalui desentralisasi dan otonomi daerah
merupakan amanat rakyat sebagaimana tertuang dalam perintah pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Melalui sistem ekonomi kerakyatan sebagai aturan main, hidup berekonomi berarti (sektor) ekonomi rakyat akan memperoleh dukungan perlindungan dan pemihakan, yang selama 30 tahun Orde Baru tidak diperolehnya (Mubyarto, 2001).

Banyak literatur teoritis yang mengatakan bahwa dampak desentralisasi bagi suatu negara sangat tergantung pada corak institusi atau kelembagaan yang ada dalam pemerintahan negara tersebut. Sementara literatur empirik berusaha untuk menunjukkan bahwa dampak desentralisasi pada pertumbuhan ekonomi daerah, kualitas pemerintah, dan penyeediaan barang publik serta kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada dua hal, yakni : pertama, kekuatan sistem partai di tingkat nasional yang bisa dilihat dari kekuatan fraksi di parlemen dan umur partai besar pemerintah, dan kedua, adalah tingkat subordinasi, yaitu apakah lokal eksekutif (Bupati/Walikota) ditunjuk atau dipilih oleh rakyat (Khusaini, 2006).


Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah digulirkan. Kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya telah bekerjasama dengan berbagai pihak, telah diserahkan. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar kemampuan mereka mengemban amanat undang-undang ini meningkat, sehingga tujuan percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan peranserta masyarakat serta peningkatan dayaasang dapat direalisasikan? Jawaban pentingnya lain adalah : (1) perkuat basis pengetahuan, karena tanpa basis pengetahuan
bagaikan orang yang telah meninggal, jasadnya tak lagi dapat berkebajikan bahkan mengalami pembusukan; (2) perkuat penerapan basis pengetahuan, karena penguasaan basis pengetahuan tanpa penerapan bagaikan orang yang tertidur lelap; cita-citanya bagaikan mimpi kosong di siang bolong; dan (3) perkuat keikhlasan berbuat, karena tanpa keikhlasan segala perbuatanannya menipu-tertipu. Ihklas tidak berarti tak peduli atas pertimbangan biaya dan manfaat (cost-benefit account). “Ikhlas” yang dalam terminologi lain dikenal dengan “niat”, dicirikan dengan (1) keterbukaan terhadap pencerahan, (2) kesigapan berubah sesuai petunjuk pencerahan, serta (3) kesungguhan dan ketangguhan menjalani proses perubahan sesuai petunjuk pencerahan (Saefulhakim, 2008).

2.3 Desentralisasi Fiskal

Secara yuridis formal, desentralisasi fiskal sebenarnya telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 1974 dengan menerapkan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah melaksanakan asas desentralisasi berdampingan dengan asas dekonsentrasi. Undang-undang ini memuat prinsip dasar administrasi di daerah dan muncul sebagai bentuk penyesuaian atas UU No. 18 Tahun 1965 yang memuat prinsip dasar administrasi regional yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Indonesia pada saat itu. Menurut UU No. 5 Tahun 1974, desentralisasi adalah suatu perpindahan jasa administrasi dari pemerintah pusat atau dari suatu pemerintahan daerah yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah yang lebih rendah untuk menjadi jasa regional (Khusaini, 2006).


Faktor penyebab ketergantungan fiskal yang keempat bersifat politis. Ada yang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme. Faktor terakhir penyebab adanya ketergantungan tersebut adalah kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selama ini pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk blok (block grants) dan spesifik (specific grants). Subsidi yang bersifat blok terdiri dari Inpres Dati I, Inpres Dati II dan Inpres Desa. Subsidi yang bersifat spesifik meliputi inpres pengembangan wilayah, Sekolah Dasar, kesehatan, penghijauan dan reboisasi, serta jalan dan jembatan. Perbedaan utama antara subsidi blok dengan subsidi spesifik adalah bahwa daerah memiliki keleluasaan dalam penggunaan dana subsiidi blok, sedang penggunaan dana subsidi spesifik sudah ditentukan oleh pemerintah pusat dan daerah tidak punya keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut. Apabila dilihat dari sisi jumlah bantuan yang diterima oleh pemerintah daerah sejak Repelita I, maka bantuan yang bersifat spesifik jauh lebih besar dari pada blok. Tidak berlebihan bila disimpulkan bahwa pemerintah pusat hanya memperlihatkan kewenangan yang lebih kecil kepada pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan di daerahnya.


Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal dan kewenangan daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam melaksanakan pembangunan daerahnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dengan desentralisasi diharapkan pemerintah daerah lebih mengetahui apa yang dibutuhkan
dan keinginan masyarakat lokal (local needs dan local demand) sehingga pemberian pelayanan semakin responsif dan mampu mengantarkan masyarakat menjadi lebih sejahtera.

2.4 Pengembangan Wilayah


Pengembangan wilayah menekankan pada keterpaduan antara pembangunan secara sektoral, kewilayahan dan institusional sebagaimana dikatakan oleh Anwar dan Rustiadi (2000), konsep pengembangan wilayah pada keterpaduan antara pembangunan sektoral, kewilayahan, dan institusional. Pembangunan berbasis pengembangan wilayah dan lokal memandang penting keterpaduan antarsektor, antarspasial (keruangan), serta antarpelaku pembangunan di dalam maupun antardaerah. Dengan demikian, setiap program-program pembangunan sektoral disesuaikan dalam kerangka pembangunan wilayah. Selanjutnya dikatakan, tujuan pengembangan wilayah seharusnya diarahkan untuk mencapai (1) pertumbuhan ekonomi, (2) pemerataan, (3) keberlanjutan ekosistem.

Pertumbuhan perekonomian yang tercermin melalui pertumbuhan PDRB per kapita seyogyanya harus lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan PDRB per kapita akan berarti jika persentasenya lebih rendah daripada persentase pertambahan jumlah penduduk (Rustiadi, et al., 2009). Selanjutnya Todaro (1998) mengatakan ada
tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa. Ketiganya tersebut adalah:

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.

Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah Indeks Gini dan kriteria Bank Dunia (BPS, 1994). Kriteria Bank Dunia mendasarkan penilaian distribusi pendapatan atas pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpendapatan terendah. Kesenjangan distribusi pendapatan dikategorikan: (a) tinggi, bila 40% penduduk berpendapatan terendah menerima kurang dari 12% bagian pendapatan; (b) sedang, bila 40% penduduk berpendapatan terendah menerima 12 sampai 17% bagian pendapatan; (c) rendah, bila 40% penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17% bagian pendapatan (Kuncoro, 2006).


Permasalahan sumberdaya alam dan lingkungan hidup (SDAL) tersebut yang berupa kerusakan, untuk memperbaikinya kembali sangat sulit. Fauzi (tanpa tahun) mengatakan bahwa, sekali SDAL rusak maka akan sangat mustahil...
mengembalikannya ke kondisi semula. Apa yang bisa dilakukan dalam kebijakan pengendalian kerusakan SDAL adalah mencegah dan merestorasi melalui instrument ekonomi dan institusi. Secara garis besar, kerusakan terhadap SDAL dipicu oleh dua faktor. Pertama pola konsumsi (consumption pattern) dan yang kedua sering disebut sebagai policy failure (kegagalan kebijakan). Pola konsumsi yang tinggi akan memicu permintaan yang tinggi terhadap sumberdaya alam yang pada gilirannya akan menyebabkan environmental stress. Studi oleh Parikh (1992) dalam Fauzi (tanpa tahun) tentang pola konsumsi dan kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa negara maju dengan 24% total penduduk dunia mengkonsumsi 50% sampai 90% komoditas dunia. Bahkan konsumsi energi mereka 20 kali lebih besar daripada negara berkembang. Tingginya konsumsi per kapita ini harus dipenuhi tidak saja dari sumberdaya alam negara maju, tapi juga dari negara-negara berkembang melalui perdagangan internasional. Industri-industri di negara berkembang dengan motif memperoleh devisa yang tinggi kemudian secara sporadis menggenjot produksi untuk memenuhi konsumsi tersebut dengan sering mengabaikan kerusakan lingkungan yang diembulkan.

Negara yang sangat luas dan kondisi sosial ekonomi serta geografis yang sangat beragam seperti Indonesia, pengembangan wilayah (regional development) sangat penting mendampingi pembangunan nasional. Tujuan pengembangan wilayah sangat bergantung pada permasalahan serta karakteristik spesifik wilayah terkait, namun pada dasarnya ditujukan pada pendayagunaan potensi serta manajemen sumber-sumber daya melalui pembangunan perkotaan, perdesaan dan prasarana untuk peningkatan kondisi sosial dan ekonomi wilayah tersebut. Pada tingkat nasional pengembangan wilayah juga ditujukan untuk memperkuat integrasi ekonomi nasional melalui keterkaitan (linkages), serta mengurangi kesenjangan antarwilayah (Firman, 2008). Dikatakan selanjutnya, sesungguhnya suatu pengembangan wilayah harus mampu dorong wilayah untuk bumbuh secara “mandiri” berdasarkan potensi-potensi sosial ekonomi serta karakteristik spesifik yang dimilikinya, tanpa harus memperlemah atau menghambat keterkaitan antarwilayah.

Tujuan pembangunan tersebut dalam laporan Rundtland pada tahun 1987, tujuan pembangunan berkelanjutan yang terfokus pada dimensi kinerja pertumbuhan ekonomi yang tinggi (economic growth), keberlanjutan jejati era sosial yang adil dan merata (social progress), serta keberlanjutan
ekologi dalam tata kehidupan yang serasi dan seimbang (*ecological balance*). Tujuan tersebut dinyatakan lebih rinci antara lain: menata kembali pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitasnya; memenuhi berbagai kebutuhan pokok warga akan pekerjaan, makanan, energi, air, dan sanitasi; menjaga perkembangan penduduk agar tetap seimbang dengan daya dukung lingkungan untuk berproduksi; melakukan konservasi dan menambah sumberdaya yang tersedia; reorientasi penggunaan teknologi dan manajemen resiko; serta mengintegrasikan kebijakan ekonomi dengan kebijakan lingkungan dalam pengambilan keputusan (Djakapermana, 2010).


Sebagai subsistem pemerintahan nasional, keberadaan daerah otonom akan berkaitan dengan penyelenggaraan penegakan *rule of law*, redistribusi geografis, dan peningkatan ekonomi makro. Penegakan *rule of law* suatu daerah otonom berperan untuk menjamin agar hak-hak sipil bebas dari penyalah-gunaan oleh penguasa lokal, di samping untuk menjamin persyaratan agar produksi pelayanan umum oleh pejabat daerah bersifat efisien. Peran untuk menjamin terselenggaranya redistribusi geografis, maka pemerintahan daerah bersifat instrumental untuk membingkai produksi dan distribusi kemanfaatan publik dan beban yang tidak terhindarkan, yang ditujukan...
untuk mewujudkan keadilan di seluruh masyarakat. Sedangkan untuk mengemudikan ekonomi makro, pemerintahan daerah atau daerah otonom berperan untuk menjamin agar setiap usaha untuk mengemudikan ekonomi nasional, termasuk melaksanakan setiap kebijakan untuk mengontrol permintaan agregat dan belanja konsumen, mensyaratkan intervensi pusat dalam keuangan lokal (Hamdi, 2008).

Pelaksanaan otonomi daerah dapat disebut gagal apabila dua masalah mendasar di daerah belum teratasi yaitu (1) ketimpangan sosial-ekonomi antar daerah dan antar warga masyarakat, dan (2) kemiskinan belum dapat diberantas sampai tuntas. Masalah ketiga adalah pengangguran (terutama pengangguran terbuka) lebih merupakan masalah sektor ekonomi modern yang oleh ekonom sering dianggap “cukup mudah diatasi melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan”. Pengangguran tipe lain di negara-negara berkembang yaitu pengangguran tak kentara (tersembunyi) bisa diatasi meskipun tidak mudah, melalui program-program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat” (Mubyarto, 2001).

Tugas utama pemerintah adalah menerapkan keadilan, menyelenggarakan demokrasi, menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan desentralisasi, mengatur ekonomi, menjaga keamanan, menjaga persatuan, memelihara lingkungan, menjamin hak asasi manusia, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjamin kebutuhan barang publik (alokasi), mengurangi inflasi dan pengangguran (stabilisasi), dan melaksanakan keadilan sosial (distribusi) (Partowidagdo, 1999). Perubahan sistem pemerintahan yang dalam prakteknya ada kecenderungan sentralistik menjadi desentralistik dalam rangka mewujudkan tugas utama pemerintah tersebut.

pendapatan yang sangat lebar antar daerah, misalokasi penggunaan anggaran negara dan kelambaban dalam menuntaskan persoalan. Dengan ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999, pemerintah di daerah mendapat kewenangan “riil” yang lebih besar dalam mengatur dirinya sendiri, kecuali di lima bidang yaitu pertahanan, agama, hubungan luar negeri, moneter dan hukum (Sudandoko, 2003).


Implementasi UU No. 22 Tahun 1999 yang menghadapi permasalahan baik pada tataran konsep, instrumen dan pelaksanaannya sehingga tidak dapat mengarah kepada pencapaian tujuan diselenggarakannya otonomi daerah, serta adanya pengaruh globalisasi ekonomi dan perdagangan yang cenderung menuntut efisiensi dan daya-saing masyarakat, bangsa dan negara yang lebih tinggi, sehingga memerlukan arahan normatif yang jelas pada tingkatan undang-undang, maka UU No.22 Tahun 1999 direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Aspek</th>
<th>Sistem Sentralisasi</th>
<th>Sistem Desentralisasi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Kekuatan</td>
<td>Kelemahan</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Aspirasi politik</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>- menjadi landasan kebijakan lembaga atau masyarakat</td>
<td>- mengakibatkan terbengkel lainnya urusan-urusan pemerintahan yang jauh dari pusat</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- dapat mencegah nafsu memisahkan diri dari negara dan dapat meningkatkan rasa persatuan.</td>
<td>- Dikuasai sejumlah kecil elite yang ada di puncak</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Partisipasi publik</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>- meningkatkan persamaan dalam per-UU, pemerintahan dan pengadilan sepanjang untuk kepentingan seluruh wilayah dan bersifat serupa.</td>
<td>- Daerah nunggu arahan dari pusat subur tumbuh birokrasi (arti negatif) dalam pemerintahan.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Pengambilan keputusan</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>- pemerintah pusat tidak pusing pada masalah yang timbul karena beda pengambilan keputusan, seluruh keputusan dan kebijakan di koordinir pemerintah pusat.</td>
<td>- kadang tidak sama dengan aspirasi daerah seluruh keputusan dan kebijakan daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat, sehingga waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu jadi lama.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- keputusan kolektif pada masalah organisasi yang kompleks bisa diambil cepat dan efektif hanya oleh sedikit Kaum Elite</td>
<td>- Sesuai dengan keputusan daerah</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Perencanaan embangan</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>- Seragam dan serak</td>
<td>- Tidak sesuai dengan kebutuhan daerah</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Lanjutan Tabel 4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>-----------------</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pendanaan/anggaran pembangunan (5)</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Public services (6)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Seragam sesuai dengan kemauan pemerintah</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004, daerah otonomi baru diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan, kecuali kewenangan pemerintahan dalam bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, peradilan, moneter dan fiskal serta agama. Dengan pembagian kewenangan/ fungsi tersebut, pelaksanaan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut menurut Khusaini (2006) antara lain sebagai berikut:

- Dijelaskan daftar tugas, baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota
- Memuat daftar urusan wajib untuk provinsi dan kabupaten/kota
- Departemen Dalam Negeri menentukan daerah penghasil sumber daya alam berdasarkan pada pertimbangan dengan menteri khusus
- Memuat pembagian hasil sumber daya alam antara propinsi dan kabupaten/kota
- Daerah tidak dapat secara langsung mengajukan pinjaman luar negeri, tetapi daerah dapat melakukan pinjaman dari pemerintah daerah lain
- Mengatur tentang pemilihan langsung kepala daerah/wakil kepala daerah.

Implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada daerah sesuai dengan undang-undang otonomi daerah adalah kebutuhan dana yang cukup
besar. Untuk itu perlu diatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah untuk membiayai pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya. Dilihat dari sisi keuangan negara, kebijakan pelaksanaan desentralisasi fiskal telah membawa konsekuensi kepada peta pengelolaan fiskal yang cukup mendasar guna pemerataan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Pemerintah daerah otonom baru sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangannya sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kebijakan perimbangan keuangan antara pusat daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau *money follow function*. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggungjawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.

2.5 Pengembangan Wilayah di Era Desentralisasi

mekarakan suatu wilayah abapila dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam analisis ekonomi (klasik atau liberal) yang berkisar pada komoditas “apa” yang diproduksi (*what to produce*), “bagaimana” memproduksinya (*how to produce*) dan “untuk siapa” komoditas tersebut diproduksi (*for whom to produce*) dapat diterapkan, maka daerah pemekaran wilayah sebagai daerah otonomi baru dituntut apa saja yang harus diproduksi oleh pemerintahan daerah otonomi baru untuk dapat mensejahterakan dan melayani masyarakat, bagaimana pemerintah daerah otonomi baru mengatur partisipasi masyarakat dalam memproduksinya dan bagaimana pemerintah daerah otonomi baru mendistribusikannya sehingga masyarakat dapat menikmati dan sejahtera. Selain hal itu, daerah otonomi baru dapat merupakan kategori wilayah perencanaan atau wilayah program yang sangat penting artinya apabila dikaitkan dengan masalah-masalah kebijakan nasional atau regional. Adisatya (2008) mengatakan pada tingkat nasional atau regional, tata ruang perencanaan diperlukan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Pembagian wilayah perencanaan disusun berdasarkan pada analisis kegiatan sektoral yang teralokasikan pada satuan lingkungan geografis. Wilayah perencanaan merupakan satuan wilayah pengembangan, di mana program-program pembangunan dilaksanakan.

Selain hal itu, distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) nasional menurut wilayah atau provinsi merupakan indikator utama di antara indikator-indikator lainnya yang umum digunakan untuk mengukur derajat penyebaran dari hasil pembangunan ekonomi di suatu negara. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang relatif sama antar provinsi/kabupaten/kota memberi suatu indikasi bahwa distribusi PDB nasional relatif merata antar provinsi/kabupaten/kota, yang berarti kesenjangan ekonomi antar provinsi/kabupaten/kota relatif kecil. Dengan kata lain, semakin besar perbedaan dalam pangsa PDB nasional antar provinsi/kabupaten/kota, semakin besar ketimpangan dalam pembangunan ekonomi antar provinsi.

Hal Capita Dikatakan selanjutnya, salah satu fakta yang memprihatinkan adalah bahwa jika output agregat dihitung tanpa minyak dan gas (migas), kontribusi PDB dari wilayah-wilayah yang kaya migas, seperti DI Aceh, Riau dan Kalimantan Timur lebih kecil lagi. Pada tahun 1995 DI Aceh menyumbang sekitar 3% terhadap PDB nasional; tanpa migas hanya menumbang 50%nya. Ini artinya 50% dari perekonomian DI Aceh, relatif terhadap perekonomian nasional, tergantung pada sektor gas. Riau dan Kalimantan Timur juga demikian, dengan minyak kedua provinsi tersebut pada tahun 1995 menyumbang sekitar 5% terhadap PDB Indonesia; tanpa minyak peran dari masing-masing propinsi provinsi hanya 2% dan 2,9%. Pada tahun 2000, kontribusi output regional yang dihasilkan oleh DI Aceh dan Kalimantan Timur dengan dukungan sektor migas terhadap PDB nasional menurun menjadi masing-masing 2,5% dan 1,2%, sedangkan dari Riau meningkat menjadi 3,4%. Hal ini memberi kesan bahwa sektor migas bukan suatu jaminan bagi kinerja ekonomi dari suatu wilayah yang kaya akan migas. Data distribusi PDB dengan dan tanpa migas menurut harga konstan (1993-2000) dalam persentase yang dihimpun dari BPS adalah DKI Jakarta yang sama sekali tidak punya SDA memiliki saham PDB nasional jauh lebih besar daripada DI Aceh, Riau dan Kalimantan Timur. Satu hal yang pasti sebagai penyebabnya adalah bahwa perekonomian DKI Jakarta jauh lebih produktif dibandingkan dengan perekonomian dari tiga provinsi yang kaya SDA tersebut, karena DKI Jakarta memiliki SDM dan infrastruktur yang jauh lebih banyak dengan kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan yang ada di tiga provinsi tersebut.

Menurut Wiranto (2008), dampak yang ditimbulkan desentralisasi terhadap kegiatan perencanaan adalah : (1) wewenang daerah dalam kegiatan perencanaan yang penuh sehingga proses pengambilan keputusan terjadi di tingkat lokal, hubungan horizontal-internal menjadi kuat dibandingkan hubungan vertikal-eksternal; (2) peran lembaga perwakilan semakin besar dibandingkan dengan eksekutif, rasionalitas perencanaan melembah dibandingkan rasionalitas kontinen, metoda dan proses perencanaan berubah dari teknikal ke politikal dengan partisipasi penuh dari berbagai pihak berkepentingan melalui forum-forum; dan (3) sumber pembiayaan dari pihak
pemerintah provinsi dan pusat berkurang, sehingga kekuasaan alokasi sumberdaya berada di tingkat lokal.

Pengembangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah mensyaratkan untuk fisik kewilayahan provinsi paling sedikit mempunyai cakupan lima kabupaten atau kota, untuk kabupaten mempunyai cakupan paling sedikit lima kecamatan, artinya kalau yang tercakup bisa enam kecamatan maka hal ini dapat dikatakan sesuai dengan teori Christaller prinsip administratif \( k=7 \). Rustiadi, et.al (2009) menyatakan, ada tiga penataan lokasi pusat menurut Christaller, yaitu :

1. Prinsip Hierarki Pusat Christaller \( k=3 \). Kepentingan relatif lokasi pusat tergantung pada jumlah dan order barang dan jasa yang disediakan. Christaller (1933) berpendapat bahwa sistem lokasi pusat membentuk suatu hierarki yang teratur. Keteraturan dan hierarki tersebut didasarkan atas prinsip bahwa suatu tempat menyediakan tidak hanya barang dan jasa untuk tingkatannya sendiri tetapi juga semua barang dan jasa yang ordernya lebih rendah seperti Gambar 2. Model Christaller mencerminkan suatu hubungan tetap antara setiap level dalam hierarki.

2. Prinsip Lalu Lintas Christaller \( k=4 \) (Christaller’s Traffic Principle \( k=4 \)). Menurut Christaller traffic principle, distribusi lokasi pusat sangat tepat jika beberapa tempat tersebut dibangun selurus dan semurah mungkin. Tempat-tempat yang tidak terlalu penting dapat dikesampingkan. Berdasarkan traffic principle, lokasi pusat akan terbentuk sebagai jalur traffic yang lurus yang menyebab dari titik pusat. Prinsip ini menghasilkan hierarki lokasi pusat dengan aturan \( k=4 \). Pusat A yang ordernya paling tinggi mendominasi lokasi pasar dari pusat-pusat yang berorder lebih rendah yang ada di bawahnya.

3. Prinsip administratif Christaller \( k=7 \). Prinsip administrasi Christaller mengatur hierarki lokasi pusat dari sudut pandang politik atau administrasi. Selain itu, prinsip ini mengatur bahwa seluruh pusat-pusat dari order yang lebih rendah karena alasan politik dimasukkan ke dalam yang berorder tertinggi (Gambar 2c) di atas. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa keenam titik pusat yang ordernya lebih rendah sepenuhnya menjadi sub ordinat dari pusat A, sehingga titik A mendominasi market area di
bawahnya (1 market area (pusat) + 6 sub ordinat market area di bawahnya). Jadi dapat dikatakan, pada intinya teori Christaller adalah pentingnya penataan spasial secara fungsional untuk menjadikan suatu wilayah maju dan berkembang.

Gambar 2 Tiga alternatif tata ruang pusat-pusat (central places) menurut Christaller (a) Prinsip pasar (k=3), (b) Prinsip aliran, (c) Prinsip administratif (k = 7) (Sumber : Rustiadi et.al (2009))

Dalam perspektif jangka panjang, suatu pengembangan wilayah harus menjadi suatu upaya untuk menumbuhkan perekonomian wilayah dan lokal (local economic development), sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri. Jelas bahwa inisiatif pembangunan secara lokal dan regional memegang kunci sangat penting, dan pemerintah daerah serta organisasi lokal tidak bersifat pasif atau menunggu inisiatif pusat (Firman, 2008).

Dengan demikian, pengembangan wilayah di era desentralisasi seharusnya dapat meningkatkan perekonomian lokal atau wilayah dengan memanfaatkan potensi-potensi wilayah yang ada, karena daerah diberi kewenangan dan kebebasan dalam mengelola sumberdaya yang ada di wilayahnya.

2.6 Pembangunan Ekonomi Daerah

Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah aspek ekonomi. Menurut Arsyad (1999) pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Dalam kebijakan pembangunan ekonomi daerah penekanannya didasarkan pada kekhasan
daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia dan sumber fisik secara lokal.


Tambunan (2003) mengatakan ada sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis derajat kesenjangan dalam pembangunan ekonomi antarprovinsi, diantaranya adalah produk domestik bruto (PDRB) per provinsi atau distribusi provinsi dalam pembentukan PDB nasional, PDRB atau pengeluaran konsumsi rumah tangga rata-rata per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kontribusi sektoral terhadap pembentukan PDRB dan tingkat kemiskinan.

2.7 Birokrasi Era Otonomi Daerah

Secara umum ada dua perdebatan posisi birokrasi dan bagaimana seharusnya birokrasi itu memainkan perannya. Pertama adalah konsepsi Hegel tentang birokrasi. Menurutnya, birokrasi adalah jembatan antara negara (state) dan rakyat (society). Masyarakat yang dimaksud di sini terdiri dari para profesi dan pengusaha yang mewakili kepentingan khusus (particular interest), sedangkan negara mewakili kepentingan umum (the general interest). Di antara kedua, birokrasi itu merupakan antara (medium) yang memungkinkan pesan-pesan dari kepentingan khusus ebut tersalurkanke kepentingan umum (Thoha, 1993).

Weber sebagai pelopor teori birokrasi modern mengilustrasikan birokrasi sebagai sesuatu yang tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan dengan legitimasi dan otoritas. Sehingga definisi birokrasi menurut Weber adalah suatu badan administrasi tentang pejabat yang diangkat dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Para anggota staf secara pribadi bebas, hanya menjalankan tugas-tugas impersonal di jabatan mereka.
2. Ada hierarki jabatan yang jelas.
3. Fungsi-fungsi jabatan ditentukan secara tegas.
4. Para pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak.
5. Mereka dipilih berdasarkan kualifikasi professional, idealnya berdasarkan suatu diploma (ijazah) yang diperoleh melalui ujian.
7. Pos jabatan adalah lapangan kerjanya sendiri atau lapangan kerja pokoknya.
8. Terdapat struktur karier, dan promosi dimungkinkan berdasarkan senioritas maupun keahlian (merit) dan menurut pertimbangan unggulan (superior).
9. Pejabat mungkin tidak sesuai baik dengan posnya maupun sumber-sumber yang bergerak di pos tersebut.
10. Tunduk pada sistem disipliner dan control yang seragam.


Pelaksanaan otonomi daerah memang mengalami banyak persoalan yang mendasar karena tidak didukung oleh infrastruktur yang bisa menterjemahkan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Salah satu infrastruktur itu adalah birokrasi (daerah) yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup, baik secara

Akibat penambahan organisasi, maka organisasi jadi “gemuk” yang berakibat membengkaknya anggaran untuk membayar gaji pegawai (pembengkakan jumlah unit-unit pemerintahan dan jumlah pegawai daerah) untuk mendapatkan budget yang lebih besar dari Jakarta. Organisasi pemerintah daerah menjadi tidak efisien, karena belanja publik lebih sedikit dibandingkan belanja rutin. Sejalan dengan dinamika masyarakat yang menuntut adanya pertanggungjawaban setiap kebijakan yang diambil pemerintah, maka pemerintah berkeinginan memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yaitu “Reformasi Birokrasi” yang merupakan upaya pembaharuan/perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya aparatur. Sesuai dengan Peraturan Menteri Panembahan No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi, adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam pedoman tersebut rancangan aktivitas yang terkait dengan penataan Sumberdaya Manusia adalah penataan sistem yang mencakup analisis jabatan, evaluasi jabatan dan remunerasi, asesmen kompetensi pegawai, membangun penilaian kinerja berbasis kompetensi, seleksi dan pengadaan pegawai, pola perencanaan karir berbasis kompetensi, sistem pelatihan berbasis kompetensi dan data base kepegawaian (Kusumastuti, 2010).

2.8 Sosial Kemasyarakatan

Dari sejak lahir sampai meninggal dunia manusia perlu bantuan atau kerjasama dengan orang lain. Dalam zaman yang makin maju maka pada ekatnya secara langsung atau tidak langsung manusia memerlukan hasil karya atau jasa orang banyak dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya mulai dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar. Dari kondisinya yang seperti inilah, maka demi kepentingan dan untuk kesejahteraan hidupnya, manusia perlu mendapat bantuan atau kerjasama dengan manusia lain dalam masyarakat. Tidak hanya dari segi maniah saja, maka manusia harus ditolong dan harus bekerjasama dengan manusia lain dalam masyarakat, akan tetapi sebagaimakhluk yang berperasaan, sebagai makhluk yang memiliki
mengetahui, dalam kehidupan masyarakat, sistem sosial akan terus berjalan untuk mengatur segala tingkah laku individu-individunya. Sistem sosial ini akan terus berkembang dan selalu berubah mengikuti perkembangan dari kehidupan masyarakatnya dan ini dipengaruhi oleh lingkungan sosial lainnya.


Dengan adanya sistem sosial di masyarakat, maka prasangka sosial, anggapan, stigma, diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat dapat diredam dan dikendalikan sehingga tidak menurun pada konflik yang berkepanjangan dan merugikan semua pihak.

2.9 Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam di Era Otonomi Daerah

Undang-Undang Otonomi Daerah yang direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (undang-undang Pemda) juga masih tidak menjamin masyarakat daerah dalam pengelolaan SDA. Dalam soal koordinasi pengelolaan SDA, kekawatiran munculnya ketidakpaduan masih punya alasan. Kekawatiran ini bukan hanya karena UU Pemda tidak tegas dalam soal itu tapi juga dikarenakan oleh pengalaman semenjak UU Otda efektif diberlakukan sejak 1 Januari 2001. Untuk mengatasi ini, UU Otda direvisi pada tahun 2004 telah dikeluarkan berbagai bentuk peraturan perundangan dan kebijakan yang menampilkan aura ego sektoral yang

1. Diterima pengelolaan dan pengembangan lingkungan hidup dan sumberdaya alam di daerah berdasarkan peraturan perundangan.
berujung pada semakin kacaunya regulasi SDA. Eksesnya mudah untuk dilihat, yakni pengurusan dan pengrusakan terhadap sumberdaya hutan dan laut terus berlanjut tanpa menunjukkan tanda-tanda berkurang, apalagi berhenti. Sementara itu, struktur pengusahaan atas sumberdaya alam tak juga berubah yang ditandai dengan minimnya luasan hutan, pesisir dan laut yang dikuasai langsung oleh masyarakat setempat (Steni, 2004).


Otonomi daerah adalah kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Otonomi daerah dengan demikian bukan otonomi rakyat tetapi otonomi Negara yang diwakili oleh pusat. Undang-undang ini secara sistematis didukung oleh berbagai peraturan organik yang mengkondisikan daerah sebagai penyedia tanah, pekarangan, kebun maupun rumah tanggalnya pemerintah pusat (Steni, 2004).

Pengelolaan hutan di Indonesia semrawut tersebut, menyebabkan deforestasi menyebabkan kerugian ekonomi dan lingkungan. Fauzi (2007) mengemukakan bahwa perjalanan pembangunan Indonesia (historically), sumberdaya alam seperti kay, gas, hutan dan pertambangan telah menjadi pilar pembangunan ekonomi Indonesia. Periode orde baru merupakan periode di mana sumberdaya alam mengalami ekstraksi yang luar biasa, namun non-convexity dari sumberdaya alam tersebut harus dibayar mahal sekarang. Deforestasi telah menyebabkan kerugian ekonomi dan


Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang cenderung eksploitatif untuk mengejar pendapatan daerah, menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi yang sangat besar, maka Fauzi (2007) menawarkan pembangunan berkelanjutan perlu dilengkapi dengan prinsip “satelit”nyaan yakni *Evolutionable Development* (ED) yang menggunakan elemen dasar sumberdaya alam dan lingkungan di masal pengembangan sosial dan ekonomi bisa membaik jika sumberdaya alam dan lingkungan mampu menyuplai kebutuhan manusia secara lebih baik. *Evolutionable Development* tidak dirancang untuk menggantikan konsep *sustainable development*, namun lebih kepada penekanan kembali (*Re-Emphasizing*) tentang *sustainable development*.

2.10 Penelitian-penelitian sebelumnya


Untuk dapat menentukan tipologi kabupaten pemekaran berdasarkan keberhasilannya dalam mensejahterakan masyarakat, penelitian menggunakan data time series. Selain hal itu, tidak mencakup pula kabupaten hasil pemekaran wilayah dalam penyelenggaraan pemerintahannya pada kategori pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, sosial kemasyarakatan, dan kelestarian lingkungan sebagaimana penelitian yang akan dilakukan ini.
2.11 Kerangka Pikir Penelitian


Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat seseorang dapat dimanipulasi: adanya prakondisi yang sudah ditanamkan (disosialisasikan) pada kelompok yang akan dibah untuk menerima norma-norma otoritas, bila mematuhihnya akan diberikan imbalan atau hukuman bila sebaliknya; ada persepsi yang kuat terhadap figur otoritas dan ada faktor pengikut :setuju (persetujuan) untuk berpartisipasi.


Adanya ketimpangan pembangunan daerah, adanya kesejajaran sosial-ekonomi antarwilayah, adanya ketidakpuasan masyarakat akan pemberian pelayanan oleh pemerintah daerah merupakan prakondisi yang dimanfaatkan oleh elit-elit lokal dan digunakan sebagai sebagainya pendorong pemekaran wilayah menjadi daerah otonomi baru. Pemerintah daerah otonomi baru, baik kabupaten/kota atau propinsi memerlukan persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahan sesuai dengan UU No. 32/2004


sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, pertahanan dan keamanan Nasional dan syarat-syarat lain yang memungkinkan daerah melaksanakan pembangunan, pembinaan kestabilitas politik dan kesatuan bangsa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab.

Persyaratan pembentukan daerah dimaksud tidak ada ketentuan tentang berapa jumlah kabupaten atau kecamatan yang dicakup oleh suatu provinsi maupun kabupaten. Ketentuan lainnya, apabila dipandang perlu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya, dalam wilayah kabupaten dapat dibentuk Kota Administratif.


Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan di kabupaten pemekaran dilakukan perhitungan Indeks Williamson (IW) dan Indeks Diversitas Entropy, dan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di kabupaten pemekaran apa terjadi pertumbuhan ekonomi dari sektor basis atau bukan, maka dihitung dengan menggunakan Location Quotient (LQ). Bagaimana konsentrasi perekonomian di kabupaten sampel dan pada sektor apa saja perekonomian beraktivitas. Oleh karena itu ditinjau Indeks Spesialisasi (IS) untuk mengetahuiinya dan untuk mengetahui sektor apa saja di kabupaten pemekaran yang dapat menjadi daya saing daerah, maka dihitung dengan menggunakan Shift Share Analysis (SSA).

Pemekaran daerah ditinjau dari teori perubahan sebagaimana dinyatakan oleh Kasali (2005) pada karakteristik kesembilan menulis, perubahan menimbulkan ekspektasi, dan karenanya ekspektasi dapat menimbulkan getaran-getaran emosi dan kesejahteraan masyarakat:
- pembangunan ekonomi,
- pelayanan publik,
- tingkat kemiskinan, sosial kemasyarakatan dan keberlanjutan SDA/Lingkungan Hidup.

Ditinjau kembali/digabung Dibina

Kabupaten Pemekaran yang maju, efisien, efektif dan mandiri

Kabupaten Rokan Hilir (Riau)

Kabupaten Rote Ndao (NTT)

Kabupaten Mamasa (Sulbar)

Kesejahteraan masyarakat : pembangunan ekonomi, pelayanan publik, tingkat kemiskinan, sosial kemasyarakatan dan keberlanjutan SDA/Lingkungan Hidup


Evaluasi kebijakan pemekaran daerah : Pemerintah Pusat yang lemah, menguatnya local power, resistensi terhadap pemerintah pusat, adanya peluang (kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah) dan sebagainya

Pemekaran daerah (524 DO : 33 provinsi, 398 kabupaten, 93 kota) 114 kabupaten pemekaran (usia lebih 5 tahun)
harapan-harapan yang bisa menimbulkan kecewa-kecewaan. Maka itu manajemen perubahan harus diimbangi dengan manajemen harapan agar para pengikut dan pendukung perubahan dapat terus membakar energi untuk terlibat dalam proses perubahan itu, kendati goal-nya meleset atau masih memerlukan waktu untuk dicapai.

Pemekaran daerah menimbulkan harapan-harapan baru bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik, penghidupan yang lebih baik dan kesejahteraan yang diimpikan. Selain itu, kesejahteraan masyarakat di kabupaten pemekaran ditinjau dari pembangunan ekonomi selain mempunyai indikator PDRB/kapita, laju pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), persentase penduduk miskin dan tingkat pelayanan publik yang diberikan pemerintah kabupaten pemekaran, sosial dan masyarakat juga keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Semakin tinggi PDRB/kapita dan IPM serta semakin rendah jumlah penduduk miskin maka semakin sejahtera masyarakat di kabupaten pemekaran yang bersangkutan. Pelayanan semakin baik, maka kesejahteraan akan semakin baik. Sedangkan keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup di kabupaten pemekaran ditinjau dari variabel program-program untuk memelihara SDA dan lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang semakin lestari dan dikelola dengan baik menunjukkan semakin sejahtera masyarakat yang bersangkutan.

Persoalan pemekaran wilayah ternyata menimbulkan perdebatan yang serius di antara birokrat/elit lokal maupun masyarakat. Perdebatan yang muncul di kalangan birokrat/elit terutama berkaitan dengan pembagian kekuasaan/jabatan di daerah yang baru dinukakan, sedangkan perdebatan yang terjadi di dalam masyarakat terutama berkaitan dengan eksistensi adat dan penguasaan sumberdaya di sekitar perbatasan (Tryatmoko, 2005). Persyaratan fisik kewilayahan dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2007 yang menyebutkan untuk provinsi paling sedikit lima kabupaten/kota dan kabupaten paling sedikit lima kecamatan, serta untuk kota paling sedikit empat kecamatan sesuai dengan teori Christaller “prinsip administratif (k=7)” karena ketentuan paling sedikit berarti bisa mencakup order yang lebih rendah sesuai dengan teori Christaller sebanyak enam kabupaten atau kecamatan.

Sanit (2010) menulis, sejauh ini fakta dan penilaian tentang pemekaran Pemda yang berkembang secara pesat itu, belum membuktikan bahwa tujuannya sebagai realisasi demokrasi yang bermuara kepada otonomi nyata (riil) dan kesejahteraan rakyat telah mendekati apalagi tercapai. Kalangan masyarakat lokal yang menikmati hasilnya,
barulah kaum elit setempat besama kroni dan kliennya dari berbagai komponen masyarakat setempat.

Rekomendasi untuk kabupaten yang berkembang dan berhasil mensejahterakan masyarakat dipertahankan dan dapat dijadikan percontohan daerah pemekaran. Kabupaten yang tidak berkembang (stagnan) perlu dilakukan pembinaan, mungkin ada salah pengelolaan atau salah strategi dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Sedangkan untuk kabupaten yang tidak berkembang perlu ditinjau kembali dan digabung kembali dengan kabupaten induknya. Dengan demikian, akan dapat ditemukan bagaimana seharusnya efisiensi, efektivitas dan kemandirian kabupaten pemekaran.
BAB III
METODE PENELITIAN


Jadi metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif karena dalam penelitian ini statistika yang digunakan hanya statistika deskriptif bukan statistika inferensial, sebagaimana dikatakan Furqan (2002) bahwa berdasarkan tahapan atau tujuan penelitian, maka statistika dapat dibedakan atas : 1) statistika deskriptif, yaitu statistika yang digunakan hanya untuk memperoleh gambatan (description) atau ukuran-ukuran tentang data yang ada. 2) statistika inferensial, yaitu statistika yang digunakan untuk menaksir ukuran populasi atau menguji hipotesis yang berlaku untuk populasi. Dengan kata lain kita tidak menggunakan data dan ukuran-ukuran sampel untuk melakukan inferensi (menarik kesimpulan) tentang populasi.

Secara makro penelitian akan menjelaskan keragaman pembangunan di kabupaten pemekaran sebagai daerah otonom baru. Secara mikro akan menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, tingkat kemiskinan, dan keberlanjutan lingkungan hidup atau sumberdaya alam, di tiga kabupaten pemekaran, yaitu Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Mamasa.
3.1 Variabel Penelitian dan Operasionalisasi Variabel

Dari tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat diungkapkan beberapa variabel utama yang dipergunakan untuk menilai keberhasilan kabupaten pemekaran dalam mensejahterakan masyarakatnya yang meliputi: pertumbuhan ekonomi, IPM, tingkat kemiskinan, PAD, PDRB, PDRB/kapita, persentase anggaran pembangunan dan anggaran rutin, sosial kemasyarakatan, dan degradasi SDA/LH.

Selanjutnya untuk pendalaman penelitian, akan dicari di lapangan data berupa indikator-indikator kecepatan pelayanan, pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan per kapita dan mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan (Kuncoro, 2004) yang sejalan dengan pengembangan wilayah yang meliputi indikator-indikator pembangunan ekonomi, pemerataan dan keberlanjutan ekosistem (Anwar dan Rustiadi, 2000).


Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia bersifat timbal balik. Kinerja ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia melalui tingkat pendapatan, distribusi pendapatan dalam masyarakat, termasuk peran perempuan dan pemerintah. Sedangkan pembangunan manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang baik sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi.


Pendapatan asli daerah (PAD), dapat menjadi indikasi kinerja suatu daerah otonom baru dalam menggali potensi daerah, karena menurut Basri dan Munandar (2009:58) pendapatan asli daerah dihasilkan dari upaya daerah sendiri yang berasal dari berbagai sumber, antara lain adalah pajak daerah, retribusi, hasil keuntungan perusahaan daerah, dan dari berbagai hasil usaha lainnya yang sah menurut peraturan.


Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilihat dari adanya degradasi lingkungan hidup, yang menunjukkan adanya kerusakan lingkungan yang diberatkan karena pengelolaan dalam memanfaatkannya. Rustiadi et.al (2009) menyatakan, terjadinya degradasi terhadap sumberdaya tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem pengelola (tata kelola) dalam memanfaatkannya. Oleh karena itu keberadaan dan pengelolaan sumberdaya telah menempatkan betapa pentingnya teori-teori dan konsep kelembagaan yang mengelola sumberdaya bersama dan kepentingan bersama. Selanjutnya, indikator penelitian tersebut terlihat dari operasionalisasinya sendiri, sebagaimana dalam tabel di bawah.

Tabel 5 Operasionalisasi Variabel Penelitian

<table>
<thead>
<tr>
<th>Variabel</th>
<th>Indikator Operasional</th>
<th>Sub indikator Operasional</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Pembangunan ekonomi</td>
<td>a. Laju pertumbuhan ekonomi</td>
<td>PDRB, PDRB/kapita, PAD</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>b. Pemerataan pembangunan</td>
<td>Indeks Williamson</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>c. Kemiskian</td>
<td>Persentase penduduk miskin</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Pelayanan publik</td>
<td>a. Prosedur, persyaratan, biaya, kece</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>patan, ketepatan, sikap petugas,</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>tanggaljawab, kenyaman, manan, keamanan, jadwal, disiplin, keadilan, kemampuan, kejelasan.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. Sosial kemasyarakatan</td>
<td>a. Aktivitas masyarakat</td>
<td>Banyak tidaknya aktivitas</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>b. Intensitas konflik</td>
<td>Lamaanya konflik</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>c. Frequensi konflik</td>
<td>Berapa kali dalam setahun</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>d. Sebab konflik</td>
<td>Akar masalah konflik</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Keberlanjutan</td>
<td>a. degradasi SDA/LH (deforestasi)</td>
<td>luasan hutan dari tahun ke tahun, lahan kritis</td>
</tr>
<tr>
<td>Lingkungan hidup / SDA</td>
<td>b. program-2</td>
<td>banyaknya program LH</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang berada di berbagai instansi di kabupaten lokasi penelitian yang berhubungan dengan maksud penelitian. Sumber data berasal dari data yang ada di kabupaten yang bersangkutan, BPS kabupaten/pusat, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian lain maupun yang ada di lembaga lain yang ada hubungannya dengan data yang diperlukan dalam penelitian serta masyarakat.

Jenis data yang dibutuhkan guna menganalisis kabupaten pemekaran ditinjau dari : Aspek perkembangan ekonomi yang diukur dengan menggunakan data sekunder dan Indeks Williamson untuk mengetahui disparitas pembangunan antar wilayah di masing-masing kabupaten lokasi penelitian, indeks diversitas entropy, location quotient, indeks spesialisasi, dan shift share analysis. Aspek pelayanan publik yang diukur dari kecepatan, keakuratan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, keadilan pelayanan dengan menggunakan data primer. Aspek keberlanjutan lingkungan hidup dan sumberdaya alam diukur dengan menggunakan data primer melalui persepsi masyarakat dan data sekunder melihat persentase kerusakan SDA/LH. Aspek sosial kemasarkatan diukur dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Wilayah</th>
<th>Pembangunan Ekonomi</th>
<th>Pelayanan Publik</th>
<th>Lingkungan Hidup/SDA Alam</th>
<th>Sosial Kemasyarakatan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>114 Kabupaten Pemekaran, sampel tiga kabupaten dipereleh secara acak</td>
<td>- PAD, PDRB, PDRB/kapita</td>
<td>- Kecepatan, Keakuratan, Keadilan, Kewajaran biaya</td>
<td>- Persepsi masyarakat terhadap kerusakan LH/SDA</td>
<td>- aktivitas masyarakat lokal, Intensitas konflik, Frekuensi konflik, Sebab-sebab konflik</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Indeks Williamson, Indeks diversitas entropy</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- LQ, IS, SSA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Jenis Data: Sekunder, Primer, Primer, sekunder

Analisis data sekunder tentang pembangunan ekonomi di tiga kabupaten sebagai daerah otonom baru dapat menunjukkan bagaimana pertumbuhan ekonomi di tiga kabupaten, bagaimana kesejahteraan masyarakat di tiga kabupaten, bagaimana persepsi masyarakat tentang perekonmian di tiga kabupaten, sektor basis apa saja yang ada di
kabupaten pemekaran, dan sektor ekonomi apa saja yang mempunyai daya saing ekonomi. Data sekunder diperoleh dari BPS maupun instansi terkait di tiga kabupaten.


### 3.3 Teknik Analisis Data

Substansi penelitian bertujuan untuk membuktikan tujuan penelitian dengan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan pembentukan daerah otonom berupa pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat; pelayanan publik; sosial kemasyarakatan, dan kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam.

#### 3.3.1 Analisis Klassen Tipology

Yulistiani *et al.* (2007) menyatakan, analisis lain yang diperlukan untuk melihat pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah otonom baru, antara lain dengan menggunakan Analisis Klassen Typology. Ini dapat digunakan untuk memetakan dan menggolongkan daerah-daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Penggolongan tersebut diukur berdasarkan nilai rata-rata pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi diletakkan dalam sumbu vertikal sedangkan pendapatan per kapita ditempatkan dalam sumbu horizontal. Berdasarkan hal itu, dapat diperoleh klasifikasi (1) daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*), (2) daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), (3) daerah yang berkembang cepat (*high growth but low income*), (4) daerah tertinggal (*low growth and low income*). Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:
Matrik Klasifikasi Kabupaten/Kota menurut Klassen Typology

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tingkat Pertumbuhan (R)</th>
<th>Y₁ &gt; Y</th>
<th>Y₁ &lt; Y</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>R₁ &gt; R</td>
<td>Daerah maju dan cepat tumbuh</td>
<td>Daerah berkembang cepat</td>
</tr>
<tr>
<td>R₁ &lt; R</td>
<td>Daerah maju tapi tertekan</td>
<td>Daerah tertinggal</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Keterangan:

R₁ = Tingkat pertumbuhan PDRB kabupaten/kota  
R = Tingkat pertumbuhan PDRB provinsi  
Y₁ = PDRB per kapita kabupaten/kota  
Y = PDRB per kapita provinsi


3.3.2 Location Quotient

Location Quotient (LQ) merupakan metode analisis yang umum digunakan sebagai penentu analisis ekonomi basis yang dikembangkan oleh Rubert Murray Haig dalam Regional Plan of New York pada tahun 1928 (Wikipedia, 2007 dalam Pribadi et al., tanpa tahun). Dikatakan Rustiadi et al. (2009), untuk mengetahui potensi aktivitas ekonomi yang merupakan indikator sektor basis dan bukan sektor basis dapat digunakan metode location quotient (LQ) yang merupakan perbandingan relatif antara kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas dalam suatu wilayah.


Dalam penelitian ini, LQ dipakai untuk menentukan sektor unggulan di kabupaten sampel dengan pendekatan nilai tambah (PDRB). Data yang digunakan untuk analisis ini adalah data PDRB Kabupaten sampel dan PDRB Nasional.

Pengukuran dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pendekatan Nilai Tambah: \[ LQ = \frac{V_i/V_t}{Y_i/Y_t} \]
Dimana :

- $V_i$ : nilai PDRB sektor i pada tingkat wilayah yang lebih rendah (kabupaten)
- $V_t$ : total PDRB pada tingkat wilayah yang lebih rendah (kabupaten)
- $Y_i$ : nilai PDRB sektor i pada tingkat wilayah yang lebih atas (Nasional)
- $Y_t$ : total PDRB pada tingkat wilayah yang lebih atas (nasional)

Interpretasi hasil analisis LQ adalah sebagai berikut :

- Jika nilai $LQ > 1$, maka hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis yang menjadi kekuatan daerah untuk mengekspor produknya ke luar daerah bersangkutan. Sektor tersebut relatif terkonsentrasi di kabupaten yang bersangkutan dibandingkan dengan sektor tersebut pada tingkat nasional.
- Jika $LQ < 1$, maka hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut menjadi pengimpor atau pangsa sektor tersebut lebih kecil dari pangsa sektor tersebut di tingkat nasional.
- Jika $LQ = 1$, maka ada kecenderungan sektor tersebut bersifat tertutup karena tidak melakukan transaksi ke dan dari luar wilayah, namun kondisi seperti ini sulit ditemukan dalam sebuah perekonomian wilayah atau konsentrasi sektor tersebut sama dengan rata-rata di tingkat nasional.

3.3.3 Indeks Spesialisasi

Analisis Indeks Spesialisasi (IS) merupakan salah satu cara untuk mengukur perilaku kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Misalnya bagaimana tenaga kerja atau pendapatan regional (PDRB) di suatu wilayah tersebut tersebar (Daryanto dan Hafizrianda, 2010). Analisis Spesialization Index (SI) merupakan teknik analisis yang dapat melengkapi dan/atau memperkuat hasil analisis LQ. Teknik analisis SI menunjukkan apakah suatu wilayah cenderung memiliki aktivitas yang terdiversifikasi (diversification) atau cenderung memiliki aktivitas yang terspesialisasi (specialization). Apabila suatu wilayah memiliki aktivitas yang terdiversifikasi berarti suatu wilayah tersebut tidak memiliki aktivitas basis tertentu, sebaliknya jika suatu wilayah memiliki aktivitas yang terspesialisasi berarti wilayah tersebut cenderung memiliki aktivitas basis tertentu (Pribadi et al., tanpa tahun).

Dalam penelitian ini, menggunakan kelanjutan perhitungan LQ dengan menghitung selisih antara persentase yang diperoleh untuk kabupaten sampel dengan persentase tingkat nasional, selanjutnya dijumlahkan nilai-nilai selisih yang bertanda positif saja dan kemudian dibagi dengan 100 untuk mendapatkan nilai IS. Keputusan
yang diambil semakin besar nilai IS, maka semakin tinggi tingkat spesialisasi sektoral di kabupaten pemekaran yang bersangkutan yang terkonsentrasi pada sektor-sektor yang mempunyai nilai selisih persentase positif.

2. Shift Share Analysis (SSA) merupakan teknik analisis yang digunakan untuk melihat tingkat keunggulan kompetitif (competitiveness) suatu wilayah dalam cakupan wilayah agregat yang lebih luas, berdasarkan kinerja sektor lokal (local sector) di wilayah tersebut. Wilayah yang dimaksud bisa berupa wilayah provinsi dalam wilayah agregat nasional, atau wilayah kabupaten/kota dalam cakupan wilayah agregat provinsi, dan seterusnya (Pribadi et al., tanpa tahun).

3.3.4 Shift Share Analysis

Shift Share Analysis (SSA) merupakan teknik analisis yang digunakan untuk melihat tingkat keunggulan kompetitif (competitiveness) suatu wilayah dalam cakupan wilayah agregat yang lebih luas, berdasarkan kinerja sektor lokal (local sector) di wilayah tersebut. Wilayah yang dimaksud bisa berupa wilayah provinsi dalam wilayah agregat nasional, atau wilayah kabupaten/kota dalam cakupan wilayah agregat provinsi, dan seterusnya (Pribadi et al., tanpa tahun).

Dikatakan selanjutnya, kinerja sektor lokal sangat penting karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal wilayah dan memiliki daya tahan terhadap pengaruh faktor-faktor eksternal. Pertumbuhan ekonomi lokal sangat ditekankan karena kinerja pembangunan nasional dari sisi mikro banyak mengalami kelemahan-kelemahan. Pola pikir kebijakan pembangunan yang selalu berfikir agregat dengan menggunakan mekanisme trickle down effect untuk mendistribusikan pertumbuhan terbukti gagal. Dengan didorong oleh kebijakan otonomi daerah maka pengembangan potensi ekonomi lokal kemudian menjadi prioritas untuk dapat lepas dari kegagalan.

SSA mengakui adanya perbedaan dan kesamaan antarwilayah. Analisis ini mengasumsikan bahwa perubahan pendapatan, produksi, atau tenaga kerja suatu wilayah dapat dibagi dalam tiga komponen pertumbuhan, yaitu komponen pertumbuhan regional (regional growth component), komponen pertumbuhan proporsional (proportional or industrial mix growth component), dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (regional share growth component) (Daryanto dan Hafizjanda, 2010).


Hasil SSA menjelaskan kinerja (performance) suatu sektor di suatu kabupaten dan membandingkannya dengan kinerja di tingkat nasional. SSA mampu memberikan gambaran sebab-sebab terjadinya pertumbuhan suatu sektor di kabupaten pemekaran. sebab-sebab yang dimaksud dibagi dalam tiga bagian yaitu, sebab yang berasal dari...

2. Komponen Pergeseran Proporsional (komponen *proportional shift*). Komponen ini menyatakan pertumbuhan total sektor tertentu secara relatif dibandingkan dengan pertumbuhan secara umum nasional menunjukkan dinamika sektor total di tingkat nasional.


Persamaan SSA adalah sebagai berikut:

\[
SSA = \left( \frac{X_{..(t1)}}{X_{..(t0)}} - 1 \right) + \left( \frac{X_{i(t1)}}{X_{i(t0)}} - \frac{X_{..(t1)}}{X_{..(t0)}} \right) + \left( \frac{X_{ij(t1)}}{X_{ij(t0)}} - \frac{X_{i(t1)}}{X_{i(t0)}} \right)
\]

Dimana : 
- a = komponen *share*
- b = komponen *proportional shift*
- c = komponen *differential shift*

\(X_{..}\) = nilai total sektor di tingkat nasional
\(X_{i}\) = nilai total sektor tertentu di tingkat nasional
\(X_{ij}\) = nilai sektor tertentu dalam kabupaten pemekaran

t1 = tahun 2009

t0 = tahun 2007

3.3.5 Indeks Diversitas Entropy

Nilai indeks diversitas *entropy* ditujukan untuk menghitung tingkat keragaman dan keberimbangan aktivitas/sektor ekonomi di suatu wilayah. Semakin banyak jumlah jenis aktivitas/sektor ekonomi maka nilai indeks diversitas entropi semakin besar. Semakin berimbang komposisi berbagai aktivitas/sektor ekonomi semakin besar, nilai indeks entropi juga semakin besar. Karena itu secara sederhana dapat
dinyatakan bahwa semakin besar nilai indeks entropy maka suatu wilayah dapat dianggap semakin berkembang/maju (Pribadi et al., tanpa tahun).

Selanjutnya dikatakan, dalam konteks wilayah, persamaan umum dari perhitungan nilai entropy adalah sebagai berikut:

\[ S = - \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} P_i \ln P_i \]

Dimana:
- \( S \) : nilai entropy
- \( P_i \) : nilai rasio frekuensi kejadian pada kategori aktivitas ekonomi ke-i terhadap total kejadian di total kategori \( n \)
- \( i \) : kategori aktivitas ekonomi ke-i
- \( n \) : total kategori

Persamaan di atas digunakan untuk melakukan pembandingan tingkat perkembangan perekonomian antarwilayah. Mengingat adanya keterkaitan antara nilai indeks entropy dengan luasan wilayah dan kapasitas sumberdaya yang dimilikinya, maka akan lebih baik apabila perbandingan dilakukan di tingkat makro. Pada skala makro, luasan wilayah dan sumberdaya yang dimiliki akan mencukupi, sehingga nilai entropy benar-benar menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi yang lebih maju. Skala wilayah makro ini bisa berada di tingkat wilayah Provinsi atau minimal wilayah Kabupaten (Pribadi et al., tanpa tahun).

3.3.6 Indeks Williamson

Indeks Williamson merupakan salah satu indeks yang memiliki fungsi untuk menunjukkan tingkat pemerataan di suatu wilayah. Rustiadi et al. (2009) menyatakan Indeks Williamson merupakan salah satu indeks yang paling sering digunakan untuk melihat disparitas antar wilayah. Pengukuran didasarkan pada variasi hasil-hasil pembangunan wknomi antar wilayah yang berupa besaran PDRB. Data sekunder yang diperoleh di kabupaten sampel tersebut dianalisis secara deskriptif dan untuk menghitung ketimpangan pembangunan atau pemerataan pembangunan dengan menggunakan indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) :

\[ IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - \bar{Y})^2}}{\bar{Y}} / n \]

Dimana : \( Y_i \) = PDRB perkapita di kecamatan i
\[ Y = \text{PDRB perkapita rata-rata kabupaten} \]
\[ fi = \text{jumlah penduduk di kecamatan } i \]
\[ n = \text{jumlah penduduk di kabupaten} \]

Indeks kesenjangan Williamson akan menghasilkan indeks yang lebih besar atau sama dengan nol. Jika semua \( Y_i = \bar{Y} \) maka akan dihasilkan indeks = 0, yang berarti tidak adanya kesenjangan ekonomi antar daerah. Indeks lebih besar dari 0 menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi antar wilayah. Semakin besar indeks yang dihasilkan semakin besar tingkat kesenjangan antar kecamatan di suatu kabupaten (Rustiadi, et.al, 2009).

Adapun kriteria Indeks Williamson yang digunakan adalah :
- kurang dari 0,30 termasuk ketimpangan rendah;
- antara 0,30 – 0,50 termasuk ketimpangan sedang;
- dan lebih dari 0,50 termasuk ketimpangan tinggi.

Data sekunder tentang anggaran publik dan anggaran rutin dianalisis dengan persentase. Sedangkan data primer tentang pelayanan publik, persepsi masyarakat terhadap kerusakan lingkungan hidup/SDA, dan sosial kemasyarakatan yang diperoleh dari jawaban responden dengan menyebarkan kuesioner kepada 51 orang responden akan dianalisis dengan menggunakan skoring atau persentase, sehingga akan diperoleh persepsi masyarakat dalam menanggapi persoalan penelitian yang diajukan peneliti.

Pilihan jawaban responden telah disediakan dengan menggunakan kriteria skala Likert sehingga diperoleh jawaban responden sebagai berikut.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabel 7</th>
<th>Kategori jawaban responden berdasarkan skala Likert</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>No.</td>
<td>Kategori jawaban</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Sangat setuju/baik sekali</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Setuju/baik</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Ragu-ragu</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Tidak setuju/tidak baik</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Sangat tidak setuju/sangat tidak baik</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber : Arikunto, 1996

Selanjutnya, akan dipersentasekan dengan cara : Jumlah total skor tertinggi = jumlah responden x item pertanyaan x 5. Skor jawaban responden = jumlah skor jawaban : jumlah skor tertinggi x 100%. Untuk mengetahui pada kategori apa jawaban responden, maka dipergunakan skala interval sebagai berikut :
Tabel 8 Kategori jawaban responden berdasarkan persentasi

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Interval (%)</th>
<th>Kategori jawaban</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>81 – 100</td>
<td>Sangat setuju/baik sekali</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>61 – 80</td>
<td>Setuju/ baik</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>41 – 60</td>
<td>Ragu-ragu</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>21 – 40</td>
<td>Tidak setuju/tidak baik</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>0 – 20</td>
<td>Sangat tidak setuju/sangat tidak baik</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber : Arikunto, 1996

Dengan demikian, maka dapat dibuat dalam matrik mengenai tujuan penelitian, alat analisis yang digunakan dan hasil yang diperoleh sebagai berikut.

Tabel 9 Tujuan penelitian, alat analisis yang digunakan dan hasil yang akan dicapai

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tujuan penelitian</th>
<th>Alat yang digunakan</th>
<th>Hasil yang dicapai</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Klasifikasi kabupaten pemekaran</td>
<td>Klassen, Tipology</td>
<td>Empat klasifikasi kabupaten pemekaran</td>
</tr>
<tr>
<td>Pembarakan ekonomi</td>
<td>LQ, IS, SSA, entropy, laju pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan penduduk</td>
<td>Mengetahui sektor basis perekonomian, Mengetahui tingkat spesialisasi sektoral, Mengetahui percepatan pertumbuhan suatu sektor perekonomian, Mengetahui sektor yang maju dan tidak, Mengetahui daya saing suatu sektor, Mengetahui disparitas aktivitas perekonomian di tiga kabupaten pemekaran</td>
</tr>
<tr>
<td>Kesejahteraan masyarakat</td>
<td>Nilai-nilai PDRB per kapita, IPM, % penduduk miskin, pelayanan publik</td>
<td>Mengetahui laju pertumbuhan PDRB per kapita, IPM, penduduk miskin dan pelayanan publik</td>
</tr>
<tr>
<td>Sosial kemasyarakatan</td>
<td>Persentase</td>
<td>Mengetahui persepsi masyarakat terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan</td>
</tr>
<tr>
<td>Keberlanjutan sumberdaya alam lingkungan hidup</td>
<td>Program-program lingkungan hidup, kondisi lingkungan hidup (lahan kritis, longsor, dan sebagainya)</td>
<td>Mengetahui persepsi masyarakat terhadap keseriusan pemerintah kabupaten dalam menangani isu-isu lingkungan hidup dan sumberdaya alam, mengetahui kesadaran masyarakat akan isu-isu lingkungan hidup dan sumberdaya alam</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber : Analisis data
BAB IV
EKONOMI WILAYAH DI TIGA DAERAH OTONOMI BARU
DI INDONESIA


4.1 Klasifikasi Kabupaten Pemekaran

Alat analisis tipologi daerah digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi daerah pada dasarnya membagi daerah berdasarkan indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu: daerah cepat maju dan cepat tumbuh (high growth and high income), daerah maju tetapi tertekan (high income but low growth), daerah berkembang cepat (high growth but low income), dan daerah relatif tertinggal (low growth ang low income) (Hill, 1989 dan Kuncoro, 1996 dalam Kuncoro2004).

Kriteria untuk membagi 114 kabupaten pemekaran dalam penelitian ini adalah, (1) daerah cepat maju dan cepat tumbuh, yaitu kabupaten pemekaran yang memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi; (2) daerah maju tetapi tertekan, yaitu kabupaten pemekaran yang memiliki rata-rata pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi mempunyai rata-rata pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari rata-rata provinsi, (3) daerah berkembang cepat, yaitu kabupaten pemekaran yang memiliki rata-rata tingkat

<table>
<thead>
<tr>
<th>R atau Ri</th>
<th>Tingkat Pertumbuhan</th>
<th>PDRB per kapita</th>
<th>Daerah maju dan cepat</th>
<th>Daerah maju tetapi tertekan</th>
<th>Daerah Berkembang Cepat</th>
<th>Daerah relatif tertinggal</th>
</tr>
</thead>
</table>

Sumber: BPS (2010), diolah (lihat Lampiran 4, Peta Kabupaten Pemekaran)
* dengan minyak dan gas
** dengan migas dan non migas
Di mana:
Ri = tingkat pertumbuhan PDRB kabupaten pemekaran (%)
R = tingkat pertumbuhan PDRB provinsi (%)
Yi = PDRB/kapita kabupaten pemekaran (dalam ribuan rupiah)
Y = PDRB/kapita provinsi (dalam ribuan rupiah)

Gambar 4 Matrik klasifikasi 114 kabupaten pemekaran menurut Klassen Tipology
Karakteristik kabupaten pemekaran sebagai “daerah yang maju dan cepat tumbuh” selain mempunyai laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita lebih tinggi dari provinsi, antara lain adalah:

- Angka harapan hidup (AHH) rata-rata masih di bawah AHH nasional, tetapi lebih tinggi dari klas ‘daerah maju tetapi tertekan’, tetapi lebih rendah dari klas ‘daerah cepat berkembang’ dan ‘daerah relatif tertinggal’.
- Pengeluaran per kapita rata-rata melebihi pengeluaran per kapita nasional, tetapi lebih rendah dari kelas lainnya.
- Lama sekolah rata-rata masih di bawah lama sekolah nasional, tetapi lebih tinggi dari ‘daerah maju tetapi tertekan’ dan ‘daerah cepat berkembang’, namun lebih rendah dari ‘daerah relatif tertinggal’.
- PDRB atas dasar harga konstan rata-rata maupun harga berlaku rata-rata melebihi PDRB atas harga konstan maupun harga berlaku nasional, dengan migas maupun non migas, dan melebihi ketiga kelas lainnya.
- Kontribusi PAD terhadap APBD kecil kurang dari lima persen dan lebih rendah dari kelas lainnya.

Sepuluh “daerah maju dan cepat tumbuh” berada di Provinsi Papua dua kabupaten (Kabupaten Mimika dan Boven Digoel), Provinsi Maluku Tengah (Kabupaten Morowali dan Kabupaten Parigi Moutong), Provinsi Bangka Belitung (Kabupaten Belitung Timur), Provinsi Sulawesi Barat (Kabupaten Mamuju Utara), Provinsi Riau (Kabupaten Kuantan Singingi), Provinsi Kalimantan Timur (Kabupaten Kutai Timur), Provinsi Bengkulu (Kabupaten Kepahiang), Provinsi Maluku Utara (Kabupaten Halmahera Timur).

Karakteristik kabupaten pemekaran yang dalam klasifikasi “daerah maju tetapi tertekan” selain memiliki PDRB per kapita melebihi provinsi tetapi laju pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari provinsi, juga memiliki karakteristik lain yaitu:

- Angka harapan hidup rata-rata lebih rendah dari AHH nasional dan paling rendah di antara kelas lainnya.
- Pengeluaran per kapita rata-rata melebihi pengeluaran per kapita nasional, dan lebih tinggi dari ‘daerah maju dan cepat tumbuh’ dan ‘daerah relatif tertinggal’. 
- Lama sekolah rata-rata jauh di bawah lama sekolah nasional dan lebih rendah dari ‘daerah relatif tertinggal’ dan ‘daerah maju dan cepat tumbuh’.
- PDRBadhk rata-rata di bawah PDRB adhk nasional, tetapi PDRBadhb rata-rata melebihi nasional.
- Kontribusi PAD terhadap APBD kecil, kurang dari empat persen, lebih rendah dari ‘daerah berkembang cepat’ dan ‘daerah relatif tertinggal’, serta lebih tinggi dari ‘daerah maju dan cepat tumbuh’.

“Daerah yang maju tetapi tertekan” adalah kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah (Kabupaten Seruyan, Sukamara, Lamanadau, Katingan, Murung Raya), Provinsi Kalimantan Selatan (Kabupaten Balangan dan Tanah Bumbu), Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Bangagai Kepulauan), Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Luwu Timur), Provinsi Sulawesi Tenggara (Kabupaten Kolaka Utara), Provinsi Gorontalo (Kabupaten Pohuwato), Provinsi Bengkulu (Kabupaten Lebong), Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Pasaman Barat dan Kepulauan Mentawai), Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Sumbawa Barat), Provinsi Papua (Kabupaten Supiori dan Mamberi), Provinsi Papua Barat (Kabupaten Kaimana), Provinsi Riau (Kabupaten Rokan Hilir), Provinsi Jambi (Kabupaten Tanjung Jabung Timur), dan Provinsi Kepulauan Riau (Kabupaten Natuna).

Untuk klasifikasi “daerah berkembang cepat” selain mempunyai karakteristik laju pertumbuhan PDRB per kapita lebih rendah dari provinsi dan mempunyai laju pertumbuhan ekonomi melebihi provinsi, juga mempunyai karakteristik:
- AHH rata-rata di bawah AHH nasional dan lebih tinggi dari ‘daerah maju dan cepat tumbuh’ dan ‘daerah maju tetapi tertekan’.
- Pengeluaran per kapita rata-rata melebihi pengeluaran per kapita nasional dan melebihi ketiga kelas lainnya.
- Lama sekolah rata-rata jauh di bawah rata-rata lama sekolah nasional dan lebih rendah dari tiga kelas lainnya.
- PDRBadhb rata-rata maupun PDRBadhk rata-rata lebih rendah daripada PDRBadhb dan PDRBadhk nasional, serta lebih rendah dari ‘daerah maju dan cepat tumbuh’ serta ‘daerah maju tetapi tertekan’, tetapi lebih tinggi dari ‘daerah relatif tertinggal’.
- Kontribusi PAD terhadap APBD kurang dari empat persen dan lebih tinggi dari ketiga kelas lainnya.

Sebanyak 34 kabupaten dalam klasifikasi “daerah berkembang cepat” berada di Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Luwu Utara), Provinsi Sulawesi Tenggara (Kabupaten Bombana, Wakatobi, dan Konawe Selatan), Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Tojo Una-una), Provinsi Papua (Kabupaten Waropen, Pegunungan Bintang, Leerom, Puncak Jaya, Asmat, Tolikara, ), Provinsi Papua Barat (Kabupaten Teluk Wondama dan Teluk Bintuni), Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Solok Selatan dan Harmasraya), Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Kabupaten Gayo Lues, Bener Meriah, Bireun, Simeuleu), Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Serdang Bedagai), provinsi Bengkulu (Kabupaten Seluma), Provinsi Riau (Kabupaten Rokan Hulu, elalawan, Siak), Provinsi Jambi (Kabupaten Sarolangun), Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin, dan Ogan Ilir), Provinsi Bangka Belitung (Kabupaten Bangka Barat), Provinsi Maluku (Kabupaten Kepulauan Aru), Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Sekadau), Provinsi Kalimantan Timur (Kabupaten Penajem Paser Utara dan Junukan), Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Rote Ndao),

Klasifikasi “daerah relatif tertinggal” selain mempunyai laju pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan PDRB per kapita di bawah provinsi, juga mempunyai karakteristik:

- AHH rata-rata di bawah AHH nasional tetapi paling tinggi di semua kelas.
- Pengeluaran per kapita rata-rata melebihi pengeluaran per kapita nasional dan lebih tinggi dari ‘daerah maju dan cepat tumbuh’.
- PDRBAdhk rata-rata maupun PDRBAdhb rata-rata jauh di bawah PDRB nasional dan paling rendah di antara kelas lainnya.
- Kontribusi PAD terhadap APBD empat persen lebih dan lebih tinggi daripada ‘daerah maju dan cepat tumbuh’ serta ‘daerah maju tetapi tertekan’.

“Daerah relatif tertinggal” tersebut sebanyak 49 kabupaten berada di Provinsi NAD (Kabupaten Nagan Raya, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Aceh Tingkil), Provinsi Sumatera Selatan (Kabupaten OKU Timur, OKU Selatan), Provinsi Jambi (Kabupaten Muaro Jambi, dan Tebo), Provinsi Kepulauan Riau (Kabupaten Lingga, dan Karimun), Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Samosir, Humbang Stolwa, dan Asahan, dan Bengkalis).
Hasundutan, Nias Selatan, dan Pak-pak Barat), Provinsi Bengkulu (Kabupaten Mukomuko, dan Kaur), Provinsi Bangka Belitung (Kabupaten Bangka Tengah, dan Bangka Selatan), Provinsi Lampung (Kabupaten Way Kanan, dan Lampung Timur), Provinsi Papua (Kabupaten Sarmi, Paniai dan Yahukimo), Provinsi Papua Barat (Kabupaten Sorong Selatan, dan Raja Ampat), Provinsi Kalimantan Timur (Kabupaten Malinau, Kutai Barat), Provinsi Kalimantan Barat (Kabupaten Landak, dan Melawi), Provinsi Kalimantan Selatan (Kabupaten Pulang Pisau), Provinsi Kalimantan Tengah (Kabupaten Gunung Mas, dan Barito Timur), Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Buol), Provinsi Sulawesi Utara (Kabupaten Kepulauan Talaud, Minahasa Selatan, Minahasa Utara), Provinsi Sulawesi Barat (Kabupaten Mamasa), Provinsi Gorontalo (Kabupaten Bone Bolango, dan Boalemo), Provinsi Maluku (Kabupaten Buru, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, dan Maluku Tenggara Barat), Provinsi Maluku (Kabupaten Kepulauan Sula, Halmahera Utara dan Halmahera Selatan), Provinsi NTT (Kabupaten Lembata, dan Manggarai Barat).


4.2 Kesejahteraan masyarakat di tiga kabupaten pemekaran

4.2.1 Kesejahteraan masyarakat ditinjau dari pembangunan ekonomi

Tujuan dari pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan tingkat pertumbuhan dari perekonomian daerah yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah perubahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi. Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dibuat dalam harga berlaku, namun agar dapat melihat pertambahan dari satu kurun ke kurun waktu berikutnya harus dinyatakan dalam nilai riel, artinya dinyatakan dalam harga konstan (Tarigan, 2005). Selanjutnya Tarigan (2005) mengutip Boediono (1985:1) yang menyatakan “pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang”. Jadi, persentase pertambahan output haruslah lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada
kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut. Menurut Boediono ada ahli ekonomi yang membuat definisi yang lebih ketat, yaitu bahwa pertumbuhan itu haruslah “bersumber dari proses intern perekonomian tersebut”. Ketentuan yang terakhir ini sangat penting diperhatikan dalam ekonomi wilayah, karena bisa saja suatu wilayah mengalami pertumbuhan tetapi pertumbuhan itu tercipta karena banyaknya bantuan/suntikan dana dari pemerintah pusat dan pertumbuhan itu terhenti opabila suntikan dana itu dihentikan. Dalam kondisi seperti ini, sulit dikatakan ekonomi wilayah bertumbuh. Adalah wajar suatu wilayah terbelakang mendapat suntikan dana dalam proporsisi yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah lainnya, akan tetapi telah suatu jangka waktu tertentu, wilayah itu mestinya tetap bisa bertumbuh alaupun tidak lagi mendapat alokasi yang berlebihan.

Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah sensinya menggambarkan perekonomian suatu daerah yang menghasilkan barang dan jasa sebagai agregat dari konsumsi (rumah tangga), investasi dan pengeluaran emerintah (net eksport). Sehingga implikasinya produktivitas suatu daerah sangat ergantung pada tinggi rendahnya output yang dihasilkan dalam suatu aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan faktor produksi yang terdiri dari capital dan labor sebagai komponen utama dalam perekonomian suatu daerah (Yulistiasi, dkk, 2007) atau PDRB merupakan penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi, di suatu wilayah tertentu (satu tahun kalender). Kegiatan ekonomi yang dimaksud mulai kegiatan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan jasa-jasa (BPS, 2009).

PDRB atas dasar harga berlaku (PDRBadhb) atau PDRB nominal mengukur nilai output dalam satu periode dengan menggunakan harga pada periode tersebut. PDRBadhb berubah dari tahun ke tahun karena dua alasan. Pertama, output fisik barang berubah; dan kedua, harga pasar berubah. Perubahan pada PDRB nominal sebagai akibat dari perubahan harga tidak menjelaskan apapun tentang kinerja perekonomian dalam hemproduksi barang dan jasa (Mankiew, 2003), tetapi dengan PDRBadhb dapat diketahui sampai di mana harga-harga dan output fisik berbagai jenis barang dan jasa mengalami perubahan. PDRB atas dasar harga konstan (PDRBadhk) menunjukkan apa yang akan terjadi terhadap pengaluaran atas output jika jumlah berubah tetapi harga d ak, atau didasarkan atas harga pada tahun tertentu sehingga kenaikan pendapatan...
hanya disebabkan oleh meningkatnya jumlah fisik produksi, karena harga dianggap tetap (konstan). Akan tetapi, pada sektor jasa yang tidak memiliki unit produksi, nilai produksi dinyatakan dalam harga jual. Oleh karena itu, harga jual harus dideflasi dengan menggunakan indeks inflasi atau deflator lain yang dianggap sesuai. Laju pertumbuhan ekonomi umumnya diukur dari kenaikan nilai konstan.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kabupaten pemekaran</th>
<th>Laju pertumbuhan ekonomi</th>
<th>Laju pertumbuhan penduduk</th>
<th>Kabupaten induk</th>
<th>Laju pertumbuhan ekonomi</th>
<th>Laju pertumbuhan penduduk</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Rote Ndao - Fluktuatif, cenderung melambat</td>
<td>-Fluktuatif, cenderung melambat</td>
<td>Kupang - Meningkat, &lt; dari laju pertumbuhan ekonomi</td>
<td>- Kecil dengan migas dan cenderung turun. Non migas fluktuasi dan &gt;</td>
<td>- Meningkat, &lt; dari laju pertumbuhan ekonomi pemekaran</td>
<td>- Meningkat, &lt; dari laju pertumbuhan ekonomi pemekaran</td>
</tr>
<tr>
<td>Mamasa - Fluktuatif, cenderung turun</td>
<td>-Fluktuatif, cenderung turun</td>
<td>Polewali Mandar - Rendah dan cenderung melambat</td>
<td>- Fluktuatif, cenderung melambat</td>
<td>- Rendah dan cenderung melambat</td>
<td>- Fluktuatif, cenderung melambat</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: BPS, 2010 (lihat Lampiran 5)


4.2.1.1 Indeks Diversitas Entropy


Perekonomian di Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Mamasa menunjukkan eberagaman dan keberimbangan. Menurut Pribadi *et al.* (tanpa tahun) yang harus diserhatikan adalah, pertama, untuk membangun suatu sistem ekonomi yang beragam dan saling terkait dibutuhkan (1) skala luasan wilayan yang memadai, dan (2) kapasitas sumberdaya yang mencukupi. Pada wilayah yang sempit dengan kapasitas sumberdaya terbatas, pengembangan selurus aktivitas/sekctor ekonomi akan sulit untuk dilakukan, tetapi wilayah yang luas dengan sumberdaya yang melimpah pengembangan berbagai aktivitas/sekctor ekonomi yang saling terkait akan dapat diwujudkan. Dengan demikian tidak selamanya aktivitas yang makin beragam di suatu wilayah dapat menjadi indikator kemajuan. Seringkali aktivitas yang fokus pada wilayah yang sempit justru menunjukkan kemajuan. Kedua, aktivitas ekonomi yang berimbang belum tentu menunjukkan adanya keterikatan. Pada beberapa kasus pemahaman tentang keberimbangan ini disalah-artikan dengan membuat proporsinya berimbang tanpa membangun keterkaitan.

4.2.1.2 Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan kabupaten pemekaran yang ‘maju tetapi tertekan’, pertumbuhan ekonominya yang cenderung berfluktuasi dan melambat tanpa minyak dan gas, tetapi apabila minyak dan gas dihitung maka pertumbuhannya lebih recil. Hal tersebut juga tercermin sebagaimana nilai PR yang negatif di semua sektor. Hal ini disebabkan karena:
1. Laju pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian cenderung menurun, sedangkan laju pertumbuhan sektor di luar pertambangan dan penggalian selalu meningkat.


3. Berdasarkan perhitungan LQ (Location Quotient), Kabupaten Rokan Hilir adalah pengimpor sektor industri pengolahan non migas; listrik, gas dan air bersih; bangunan (konstruksi); pengangkutan dan komunikasi; bank, non bank dan persewaan; dan jasa. Sedangkan untuk sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; serta perdagangan, restoran dan hotel menjadi sektor basis. Sektor basis di pertanian belum dikembangkan dengan optimal, masih terjadi kebocoran dengan mengolahnya di luar wilayah. Sektor petambangan dan penggalian cenderung menurun dan sektor perdagangan, restoran dan hotel belum berkembang.

4. Berdasarkan indeks spesialisasi (IS), Kabupaten Rokan Hilir terkonsentrasi pada sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, serta sektor perdagangan, restoran dan hotel. Terutama terspesialisasi pada sektor pertambangan dan penggalian yang mempunyai nilai sangat besar yang disusul sektor pertanian. Sektor pertanian yang melimpah terutama hasil perkebunan rakyat berupa tandan buah segar kelapa sawit tidak diolah di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, tetapi diolah di luar wilayah sehingga kurang dapat meningkatkan multiplier effect untuk menampung pertambahan penduduk yang tinggi tersebut. Sektor-sektor lain seperti industri, kontruksi, listrik dan air
bersih, angkutan dan komunikasi serta jasa bukan merupakan konsentrasi perekonomian di Kabupaten Rokan Hilir.


Oleh karena itu, menurut hasil LQ, untuk memacu perekonomian Kabupaten Rokan Hilir maka harus lebih fokus pada sektor listrik, gas dan air bersih. Walaupun begitu, ternyata sektor ini mempunyai nilai komponen pertumbuhan proporsional (PP) yang paling rendah. Nilai komponen PP yang tertinggi adalah sektor pertambangan dan penggalian disusul sektor pertanian. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir harus bisa menarik investor di sektor industri pengolahan, terutama pengolahan pertanian untuk menunjang pengolahan komoditas kelapa sawit yang menjadi unggulan (hasil perkebunan rakyat kelapa sawit semua diolah di luar wilayah), yang dapat menyediakan lapangan pekerjaan lebih banyak untuk menampung pertumbuhan penduduk yang tinggi, sehingga tidak terjadi backwash effect dan dapat menjadikan multiplier effect bagi perekonomian di Kabupaten Rokan Hilir. Sebanyak tujuh sektor memiliki daya saing yang tinggi, kecuali sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa lainnya yang mempunyai nilai negatif pada komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW) (lihat Lampiran 6, untuk LQ, IS, SSA).

4.2.1.3 Kabupaten Rote Ndao

Kabupaten Rote Ndao sebagai daerah yang berkembang cepat dengan ketimpangan pembangunan yang kecil, mempunyai pertumbuhan PDRBadhk yang cenderung fluktuatif, walaupun selalu meningkat setiap tahunnya tetapi cenderung melambat sebagaimana nilai pertumbuhan regional (PR) yang negatif di semua sektor. Hal itu sebabkan karena:

1. Hampir semua sektor mengalami peningkatan pertumbuhan yang tidak secepat tahun sebelumnya.

2. Infrastruktur yang ada masih terbatas. Transportasi untuk dan dari Rote hanya dapat ditempuh melalui jalur laut atau melalui udara dengan pesawat kecil.
Dari 96 pulau yang ada, hanya enam pulau yang dihuni. Sebanyak delapan kecamatan yang ada dihubungkan dengan jalan darat sepanjang 79 kilometer.


5. Berdasarkan perhitungan Location Quotient (LQ) Kabupaten Rote Ndao, sektor basis ada pada sektor pertanian; perdagangan, restoran dan hotel; dan sektor jasa. Sektor basis ini belum dapat berkembang dengan optimum sehingga sumbangannya ke perekonomian masih kecil. Kabupaten Rote Ndao sebagai pengimpor dari sektor pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; pengangkutan dan komunikasi; bank, non bank dan persewaan.

Kabupaten Rote Ndao yang mempunyai indeks spesialisasi (IS) kurang dari satu, berarti aktivitas perekonomiannya tersebut merata di semua sektor, dengan konsentrasi utama pada pertanian; perdagangan, restoran dan hotel serta jasa lainnya. Kabupaten Rote Ndao di sektor pertanian terutama pada sub sektor tanaman pangan, sub sektor peternakan, dan sub sektor perikanan merupakan aktivitas utama terbesar. Sub sektor peternakan karena mempunyai
padang pengembalaan yang luas dan potensial dan telah dikembangkan program penggemukan ternak, terutama sapi, kerbau, kuda dan kambing, serta pengembangan ternak kambing perah, yang selanjutnya diekspor ke luar. Potensi padang pengembalaan ini belum dimanfaatkan secara optimal. Luas laut yang potensial belum termanfaatkan optimal. Sebenarnya pemerintah dapat lebih optimal pemanfaatannya dengan pemberian bantuan bibit kepada peternak dengan sistem bagi hasil, atau kredit ringan untuk nelayan. Sektor jasa juga berkembang dengan adanya event skala internasional, tetapi belum diangdakan secara rutin.


4.2.1.4 Kabupaten Mamasa

Kabupaten Mamasa ‘daerah yang relatif tertinggal’ dengan pertumbuhan perekonomiannya yang berfluktuatif, lambat dan cenderung menurun. Sebagaimana nilai PR yang negatif di semua sektor. Hal ini disebabkan karena:

1. Perekonomian Kabupaten Mamasa cenderung tertutup, karena daerannya terisolir – untuk menuju ke Mamasa hanya ada satu jalan dengan kondisi jalan yang sempit, menanjak, berkelok-kelok dan rusak berat – dan dapat disebut sebagai wilayah homogen yang mengandalkan pertanian dalam perekonomiannya. Dengan alamnya yang subur dan berhawa sejuk, hasil


Berdasarkan perhitungan location quotient (LQ) Kabupaten Mamasa, sektor basis ada pada sektor pertanian; sektor listrik, gas dan air bersih; dan sektor asa serta sebagai pengimpor di sektor pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; bangunan; perdagangan, restoran dan hotel; pengangkutan dan komunikasi; dan perbankan. Sektor basis belum dapat memberikan kontribusi
yang besar pada perekonomian, karena sebagian besar hasil pertanian utamanya seperti subsektor perkebunan (kopi) pengolahannya di luar wilayah dan dengan kendala infrastruktur pemasarannya tidak dapat memberikan nilai tambah yang memadai.


Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat saja terjadi tanpa memberi dampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini bisa disebabkan karena tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan pendapatan di wilayah tersebut (BPS, 2009). Senada dengan itu, Rustiadi et al. menyatakan pertumbuhan perekonomian yang tercermin melalui pertumbuhan PDRB per tahun
seyoginya harus lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan PDRB tidak akan berarti jika persentasenya lebih rendah daripada persentase pertambahan jumlah penduduk (Rustiadi, et.al, 2007).


Dengan demikian, Kabupaten Rote Ndao yang berbasis pertanian – relatif perekonomiannya tidak merusak lingkungan – dan sektor jasa, harus meningkatkan lagi pertumbuhan ekonominya dengan cara antara lain industrialisasi pariwisata pantai, bantuan bibit ternak, bantuan bagi nelayan, dan mendorong kegiatan industri pengolahan karena mempunyai nilai pertumbuhan proporsional (PP) tertinggi. Selain hal itu, keluarga berencana (KB) lebih digiatkan lagi sehingga laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan.

Kabupaten Mamasa dengan pertumbuhan penduduk yang kecil dan pertumbuhan perekonomian yang relatif lebih tinggi dari Kabupaten Rote Ndao, mestinya dapat menekan keterakan masyarakatnya, tetapi fakta menunjukkan bahwa penduduk miskin di Kabupaten Mamasa sangat tinggi. Kabupaten Mamasa harus meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya. Supaya tidak terjadi backwash effects maka Kabupaten Mamasa harus dapat meningkatkan produksinya (kopi), dengan tidak mengurangi daya dukung kualitas lingkungan sebagaimana Rustiadi et al. (2009) menulis, pada tahap awal alam bahan-bahan baku/mentah berupa sumber daya alam seperti kayu, ikan, serta berbagai produk pertanian dan hasil ekstraksi sumberdaya alam yang dialirkan ke perkotanan untuk diolah (processing) sebagai bahan mentah dan bahan baku guna...
menghasilkan produk-produk olahan yang memiliki nilai tambah. Proses ini dapat dianggap netral (tidak merugikan) jika: (1) pusat-pusat pengolahan di perkotaan merupakan lokasi-lokasi yang memiliki locational rent terbaik untuk kegiatan-kegiatan pengolahan, (2) proses ekstraksi sumberdaya alam di perdesaan dilakukan tanpa mengurangi daya dukung dan kualitas lingkungan (tidak menyebabkan degradasi atau kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup), serta (3) diiringi dengan terjadinya peningkatan produktivitas di perdesaan.


4.2.2 Kesejahteraan masyarakat di tinjau dari tingkat kemiskinan

Kesejahteraan masyarakat ditinjau dari hubungan persentase penduduk miskin dengan pembangunan manusia, hubungan PDRB per kapita dengan pembangunan manusia, dan pelayanan publik di tiga kabupaten pemekaran. BPS (2010) menulis, pengaruh laju pertumbuhan PDRB per kapita terhadap pembangunan manusia terjadi melalui beberapa jalur, yaitu melalui kegiatan rumah tangga (seperti kegiatan membersarkan anak, mengurus rumah tangga dan mengurus keluarga yang sakit); melalui pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan dasar (seperti membeli makanan, bat-obatan, dan buku sekolah); dan melalui kebijakan pengeluaran pemerintah (salah satunya terlihat dari prioritas pengeluaran untuk bidang sosial).

Indikator persentase penduduk miskin, mengindikasikan sampai sejauh mana tingkat kemiskinan yang terjadi di tiga kabupaten pemekaran. Tingkat kemiskinan merupakan ukuran yang umum digunakan untuk merepresentasikan kesejahteraan masyarakat dari sisi materiil. Tabel di bawah menunjukkan bagaimana laju pertumbuhan IPM dan jumlah penduduk miskin di tiga kabupaten pemekaran.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kabupaten</th>
<th>IPM</th>
<th>Penduduk miskin (%)</th>
</tr>
</thead>
</table>


Penghitungan penduduk miskin yang digunakan sebagai ukuran adalah sesuai kriteria BPS. Dengan pendekatan tersebut, penduduk miskin dipandang sebagai penduduk yang tidak mampu dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan makanan.
maupun non makanan yang bersifat mendasar (BPS 2004). Kecenderungan penurunan penduduk miskin menunjukkan adanya perbaikan dari kesejahteraan masyarakat di kabupaten pemekaran, kecuali Kabupaten Mamasa yang meningkat.

4.2.2.1 Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir memiliki IPM tinggi dan persentase penduduk miskin relatif kecil. Kategori Kabupaten Rokan Hilir adalah kondisi yang ideal, karena pada kategori ini mampu menekan angka kemiskinan dan sekaligus dapat meraih capaian pembangunan manusia yang tinggi. Walaupun begitu, perlu dengan semakin tingginya pertumbuhan penduduk yang terutama disebabkan karena banyaknya pendatang, maka perlu dengan semakin tingginya pertumbuhan penduduk yang terutama disebabkan karena banyaknya pendatang, maka emerintah Kabupaten Rokan Hilir perlu melakukan langkah-langkah:

1. Mengundang investor untuk menanamkan modalnya, terutama di bidang pengolahan kelapa sawit, sehingga tenaga kerja dapat tererap dan dapat menimbulkan multiplier effect bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

2. Pemberian rumah bagi masyarakat miskin memang baik, tetapi jangan sampai menimbulkan kecemburuan bagi mereka yang tidak mendapat pembagian karena dianggap mampu, tetapi rumahnya masih tidak sebagus rumah pemberian. Kecuali semua anggota masyarakat akan dapat rumah gratis dengan kriteria tertentu.

3. Program pendidikan gratis dilanjutkan sampai perguruan tinggi bagi anggota masyarakat yang cerdas dan berminat.

4.2.2.2 Kabupaten Rote Ndao

Kabupaten Rote Ndao dengan IPM rendah ternyata persentase penduduk miskin juga tinggi (mendekati sepertiga penduduk), meskipun dalam empat tahun dapat menekan angka kemiskinan yang cukup besar. Keadaan ini adalah kondisi yang paling kurang, oleh karena itu:

1. Diperlukan usaha yang lebih keras untuk dapat mengejar ketertinggalannya dalam menekan angka kemiskinan dan mempercepat capaian pembangunan manusia. Pertanian merupakan sektor basis, terutama sub sektor peternakan dan perikanan yang ada kecenderungan melambat, perlu dikelola dengan baik dan didorong untuk dapat meningkatkan produksinya sehingga pertumbuhan perekonomian dapat seimbang. Basri dan Munandar (2009) menulis, sektor
1. Pertanian adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan paling diandalkan sebagai sumber nafkah sebagian besar rakyat miskin, khususnya di pedesaan.


- Terdapat hubungan negatif yang sangat kuat antara pertumbuhan dan kemiskinan. Artinya, ketika perekonomian tumbuh, kemiskinan berkurang; namun ketika perekonomian mengalami kontraksi pertumbuhan, kemiskinan meningkat lagi.

- Pertumbuhan tidak mengurangi kemiskinan secara permanen. Walaupun terjadi pertumbuhan dalam jangka panjang selama periode krisis, banyak masyarakat tetap rentan terhadap kemiskinan.

- Pertumbuhan secara kontemporer dapat mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, pertumbuhan yang berkelanjutan penting untuk mengurangi kemiskinan.


- Pengurangan ketimpangan mengurangi kemiskinan secara signifikan. Sehingga sangat penting untuk mencegah pertumbuhan yang meningkatkan kemiskinan.

- Memberikan hak atas properti dan memberikan akses terhadap kapital untuk golongan masyarakat miskin dapat mengurangi kesenjangan, merangsang pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan.
4.2.2.3 Kabupaten Mamasa

Kabupaten Mamasa mempunyai penduduk miskin tinggi sekali (hampir tujuh puluh persen, Mamasa Dalam Angka 2010) tetapi nilai capaian IPM pada kategori menengah ke atas. Oleh karena itu konsertrasi besar untuk menekan angka kemiskinan perlu diberikan, dengan:

1. Menerapkan kebijakan yang berorientasi pada pemerataan pendapatan dan peningkatan daya beli masyarakat (BPS, 2009).

2. Pemerataan pendapatan dan mengurangi ketimpangan pendapatan dapat dilakukan dengan memperluas lapangan pekerjaan, seperti mengolah hasil perkebunan masyarakat (kopi) di wilayah sendiri, diharapkan terjadi multiplier effect.

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menggalakkan semua sektor perekonomian, utamanya sektor basis yang menjadi unggulan daerah (pertanian; listrik dan air bersih; pertambangan dan penggalian; dan jasa). Misalkan dengan menggalakkan pariwisata yang sangat potensial di Mamasa dengan melibatkan masyarakat dalam pembuatan cinderamata dan sebagainya.

Kabupaten Rote Ndao dengan IPM dan persentase penduduk lebih tinggi dari induknya. Kabupaten Rote Ndao dengan kondisi yang paling kurang, guna menekan angka kemiskinan Bupati Rote Ndao mencanangkan program subsidi pupuk, biaya berobat gratis, biaya pembuatan KTP gratis, pemasangan listrik gratis di tahun 2012 dari anggaran APBD. Untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunan manusia, Bupati menggalakkan tradisi TU’U di desa-desa dan Program Alokasi Dana Desa (ADD) digulirkan. Tradisi TU’U dapat diperluas dengan menyekolahkan anak-anak orang yang tidak mampu sampai perguruan tinggi. Koperasi sebagai wadah dan sarana pemasaran hasil kerajinan rakyat perlu dibentuk lebih banyak lagi. Hafsa menulis, hasil pengkajian berbagai proyek yang dilakukan oleh International Fund for Agriculture Development (IFAD) menunjukkan bahwa dukungan bagi produksi yang dihasilkan masyarakat di lapisan bawah telah memberikan sumbangan pada pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan investasi yang sama pada sektor-sektor yang skalanya lebih besar. Pertumbuhan itu dihasilkan bukan hanya dengan biaya lebih kecil, tetapi dengan devisa
yang lebih kecil pula. Hal terakhir ini besar artinya bagi negara-negara berkembang yang mengalami devisa dan lemah posisi neraca pembayaranannya (Hafsah, 2008).

Kabupaten Mamasa mempunyai IPM dan penduduk miskin lebih tinggi tinggi dari induknya, maka cara yang dapat dilakukan adalah pemerataan pendapatan dengan memperluas lapangan usaha untuk menekan angka kemiskinan yang tinggi. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semua sektor, utamanya sektor basis yang menjadi sektor unggul (pertanian, listrik, air bersih, jasa-jasa).

Jadi dapat ditarik kesimpulan, Kabupaten Rote Ndao mempunyai tingkat kesejahteraan yang rendah terlihat dari capaian PDRB per kapita, IPM rendah dan angka kemiskinan tinggi. Kabupaten Mamasa mempunyai kondisi yang relatif baik meskipun penduduk miskin tinggi. Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tingkat kesejahteraan yang tinggi, terlihat dari nilai PDRB per kapita dan IPM tinggi serta angka kemiskinan rendah, walaupun nilainya lebih rendah dari induknya.

4.2.2.4 PDRB per kapita dan pembangunan manusia

Untuk mempercepat peningkatan kapabilitas manusia di suatu wilayah diperlukan modal dan investasi yang besar. Investasi diperlukan dalam rangka meningkatkan capaian dimensi mendasar dalam pembangunan manusia. Hal tersebut terwujud dalam bentuk perbaikan status kesehatan, pendidikan, dan produktivitas penduduk. Investasi yang besar akan diperoleh melalui laju pertumbuhan PDRB per kapita yang pesat. Selanjutnya, produk dari pembangunan manusia yang berhasil adalah terlahirnya sumberdaya manusia yang berkualitas. SDM yang berkualitas merupkan modal utama dalam menggerakkan dan mempercepat laju roda perekonomian.

UNDP (Laporan Pembangunan Manusia 1996) dalam BPS (2009) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara laju pertumbuhan PDRB per kapita dengan pembangunan manusia, dimana hubungan yang terjadi bersifat timbal balik. Laju pertumbuhan PDRB per kapita berpengaruh terhadap pembangunan manusia, sebaliknya pembangunan manusia juga mempengaruhi laju pertumbuhan PDRB per kapita melalui terciptanya tenaga yang berkualitas. Namun telah terbukti secara empiris bahwa hubungan yang terjadi tidak bersifat otomatis. Dalam lingkup global, banyak Negara yang mengalami laju pertumbuhan PDRB per kapita yang pesat tanpa diikuti dengan peningkatan kinerja pembangunan manusia yang memadai. Namun sebaliknya, banyak pula Negara yang mengalami laju pertumbuhan PDRB per kapita yang tidak terlalu
cepat tetapi mampu meningkatkan kinerja pembangunan manusia dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam kontek ini, peran pemerintah menjadi sangat penting dalam memperkuat hubungan diantara keduanya melalui kebijakan yang tepat. Kebijakan yang menempatkan laju pertumbuhan PDRB per kapita sebagai sarana dan pembangunan manusia sebagai tujuan akhir (BPS, 2009).

Selanjutnya dinyatakan, pengaruh PDRB per kapita terhadap pembangunan manusia terjadi melalui beberapa jalur, yaitu melalui kegiatan rumah tangga (seperti kegiatan membesarkan anak, mengurus rumah tangga dan mengurus keluarga yang sakit); melalui pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan dasar (seperti membeli makanan, obat-obatan, dan buku sekolah); dan melalui kebijakan pengeluaran pemerintah (salah satunya terlihat dari prioritas pengeluaran untuk bidang sosial). Sebaliknya, pembangunan manusia mempengaruhi laju pertumbuhan PDRB per kapita melalui tenaga kerja berupa SDM berkualitas, dalam arti memiliki taraf kesehatan danendidikan yang baik serta memiliki produktivitas tinggi (BPS, 2009).

Kesejahteraan masyarakat didasarkan pada nilai PDRB per kapita, dimana PDRB per kapita dapat memperkirakan tingkat kinerja ekonomi rata-rata penduduk di suatu daerah pemekaran. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita suatu daerah, menunjukkan semakin tinggi kemampuan rata-rata kinerja penduduk di daerah yang bersangkutan, semakin sejahtera masyarakat suatu daerah, dan semakin tinggi kemampuan kinerja ekonomi daerah pemekaran yang bersangkutan.

Disparitas pembangunan antar wilayah masih merupakan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Indikator masih tingginya kesenjangan antar daerah dicerminkan ke dalam empat masalah yaitu: disparitas penyebaran penduduk dan ketenagakerjaan; disparitas kesejahteraan sosial ekonomi dengan masih rendahnya peningkatan kesekses pendidikan, meluk, herfut, dan partisipasi sekolah yang terlihat dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di seluruh wilayah Indonesia; disparitas pertumbuhan ekonomi antar daerah; dan disparitas prasarana antar daerah yang sangat tinggi. Dalam analisis disparitas antar wilayah tidak dapat dilepaskan dari ulasan mengenai capaian IPM antar wilayah (BPS, 2009). Indeks Pembangunan Manusia (HDI, Human Development Index) dapat menjadi salah satu indikator yang dipergunakan untuk mengukur sejauh mana pembangunan manusia seutuhnya telah membuka hasil di suatu Negara (Basri dan Munandar 2009).
PDRB per kapita dan IPM di masing-masing kabupaten pemekaran dapat dilihat dalam tabel berikut.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kabupaten pemekaran</th>
<th>PDRB per kapita</th>
<th>IPM</th>
<th>Kab. induk</th>
<th>PDRB per kapita</th>
<th>IPM</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Rokan Hilir</td>
<td>Dengan migas, sangat tinggi dan fluktuatif, selalu meningkat</td>
<td>Turun di th 2005, setelahnya meningkat terus, kategori menengah ke atas &lt; induknya</td>
<td>Bengkalis</td>
<td>Dengan migas selalu meningkat, &gt; Rohil</td>
<td>Selalu me ningkat, masuk me ningah atas dan lebih tinggi dari Rokan Hilir</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Non migas, rata-2 hampir 2/5 nya dng migas, fluktuatif cenderung naik &gt; induknya</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Rote Ndao          | Kecil, hampir sepetigabelasnya Rohil dengan migas; ham pir seperlimasatengahnya non migas. Cenderung meningkat terus setiap tahun < induknya | Selalu men ingkat, ma suk kategori menengah bawah dan > induknya | Kupang | Selalu meningkat dan lebih tinggi dari Rote Ndao | Selalu me ningkat, masuk menengah bawah. < Rote Ndao |


4.2.2.4.1 Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir masuk dalam klasifikasi ‘daerah maju tetapi tertekan’ dan merupakan salah satu kabupaten yang kaya raya karena mempunyai rata-rata PDRB per kapita tinggi, baik dengan minyak dan gas maupun tanpa minyak dan gas yang melebihi PDB per kapita nasional, dan mempunyai IPM yang lebih tinggi daripada IPM nasional (2008), yang berarti kondisi ini kebalikan dari pada kondisi Kabupaten Rote Ndao. Dalam kategori ini, antara PDRB per kapita dan IPM saling menunjang satu dengan lainnya. Hal tersebut dikarenakan :

Sumberdaya yang diperoleh dari pendapatan digunakan sebagai modal dalam proses pembangunan manusia melalui kebijakan yang salah satunya membebaskan biaya sekolah, dan memberi subsidi biaya berobat untuk semua kalangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Bapak S, SH mengatakan "Pemerintah telah menggratiskan masyarakat untuk berobat, tidak hanya
rakyat miskin, tapi semua masyarakat menikmati pengobatan gratis. Saya waktu berobat hanya membayar Rp. 9.000,00 saja. Kalau tidak ada subsidi dari pemerintah bisa mencapai 300 ribuan rupiah”.

2. Sebaliknya, kualitas manusia yang baik sebagai hasil dari proses pembangunan manusia yang berhasil menjadi modal bagi pembangunan perekonomian hal ini tercermin dari pendidikan pegawai yang ada di Kabupaten Rokan Hilir rata-rata diploma tiga dan pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah dasar sangat sedikit.

3. Kontribusi dari komoditas sektor non migas, yaitu sektor pertanian khususnya perkebunan di Kabupaten Rokan Hilir masih tinggi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Kabupaten Rokan Hilir pada sektor-sektor yang tradable (pertanian, pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan) mengalami fluktuasi, sedangkan sektor-sektor yang non tradabel (listrik, gas, air minum; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan telekomunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa) mengalami peningkatan. Sektor tradable masih lebih dominan daripada sektor non-tradable.


4.2.2.4.2 Kabupaten Rote Ndao

Pembangunan manusia dinilai dari besarnya IPM (lihat BPS, 2009), Kabupaten Rote Ndao mempunyai PDRB per kapita yang kecil (hampir seperlima PDB per kapita nasional) dan IPM yang kecil pula (kategori menengah ke bawah), hal itu berarti hubungan PDRB per kapita dan IPM saling melemahkan. Relatif rendahnya pendapatan suatu daerah, tentunya dapat menyebabkan rendahnya investasi yang dapat digulirkan. Termasuk investasi untuk pembangunan manusia. Sebagai akibatnya, peningkatan status kesehatan, pendidikan, maupun daya beli penduduk menjadi relatif sulit untuk
Kabupaten Rote Ndao merupakan daerah yang beriklim kering dengan musim hujan pendek. Tidak mempunyai sektor yang mempunyai daya saing (nilai PPW negatif semua) yang dapat memacu pertumbuhan ekonominya.

3. Ada pergeseran perkembangan perekonomian, dari sektor-sektor tradable ke sektor-sektor non tradable. Sejak tahun 2008 sektor tradable (pertanian, pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan) lebih rendah dari sektor non tradabel (listrik, gas dan air minum; bangunan/struktur; perdagangan, restoran dan hotel; pengangkutan dan komunikasi; keuangan dan jasa-jasa). Basri dan Munandar (2009) menulis, pertumbuhan tidak seimbang di sini adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia terlalu bertumpu pada perkembangan sektor jasa-jasa yang tidak dapat diperdagangkan secara internasional dengan leluasa (non-tradable); sedangkan sektor barang yang erat kaitannya dengan produksi dan perdagangan dalam pengertian konvensional (biasa disebut sektor tradable) mengalami pertumbuhan yang sangat terbatas, bahkan cenderung melemah.


5. Penduduk di Kabupaten Rote Ndao pada usia produktif (15 – 59 tahun) paling tidak pernah menderita salah satu jenis penyakit dari sepuluh jenis penyakit yang diderita penduduk. BPS (2009) menulis, variabel “persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan” berpengaruh negatif terhadap IPM. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi persentase penduduk mengalami keluhan...
kesehatan dan angka kesakitan di suatu provinsi menyebabkan IPM di provinsi tersebut justru akan semakin rendah.


4.2.2.4.3 Kabupaten Mamasa

Kabupaten Mamasa yang masuk dalam klasifikasi ‘daerah yang relatif tertinggal’ mempunyai PDRB per kapita yang rendah tetapi mempunyai IPM yang masuk pada kategori menengah ke atas, hal ini disebabkan:

1. Kabupaten Mamasa mempunyai sektor unggulan pertanian, listrik dan air bersih, serta pertambangan dan penggalian walaupun nilainya kecil. Sektor unggulan ini belum optimal memberikan kontribusi pada pendapatan
masyarakat karena hasil perkebunannya belum dapat diolah di wilayah Mamasa. Sektor tradable mengalami peningkatan setiap tahunnya dan lebih tinggi daripada sektor non-tradable tetapi belum dapat memberikan pendapatan masyarakat yang baik.

2. Walaupun ada dua perusahaan listrik yaitu, PLTMH Kampinnisan dan PLTMH Talopak yang beroperasi di Mamasa yang mensuplai PLTA Bakaru untuk melayani wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara, tetapi sedikit sekali masyarakat lokal yang terlibat.


5. IPM masuk kategori menengah ke atas karena masyarakat yang berusia 10 tahun ke atas sudah pernah sekolah dan sedang sekolah. Pencari kerja kebanyakkan tamatan sekolah menengah atas sampai sarjana. Program wajib belajar 9 tahun dicanangkan.


Kabupaten Mamasa telah pada posisi yang ideal, PDRB per kapita dan IPM yang melebihi kabupaten induknya. Selanjutnya, Kabupaten Rote Ndao yang mempunyai
PDRB per kapita dan IPM lebih rendah dari induknya, maka untuk dapat mencapai posisi sebagaimana Kabupaten Mamasa diperlukan langkah-langkah besar sebagai berikut. Pertama yang harus dibangun dulu adalah meningkatkan IPM, dengan cara meningkatkan kesehatan masyarakat, dan pendidikan masyarakat sebagaimana telah dilaksanakan oleh Bupati Rote Ndao dengan membebaskan biaya berobat untuk masyarakat miskin dan menggalakkan budaya TU’U untuk meningkatkan pendidikan anak yang tidak mampu. Kedua, menggerakkan sektor informal masyarakat, seperti kerajinan lontar, dan kerajinan tenun ikat yang menjadi andalan masyarakat dan sektor-sektor lain dalam wadah koperasi, sehingga pemasarannya dapat terjamin. Selain hal itu, sektor basis pertanian, utamanya peternakan dan perikanan perlu digalakkan dengan memberikan bantuan bibit ternak dengan sistem bagi hasil untuk memanfaatkan potensi adang pengembalaan yang luas serta pemberian bantuan untuk nelayan, sehingga sektor pertanian tidak semakin menurun kontribusinya pada perekonomian.

Langkah bupati itu sejalan dengan (BPS, 2009) pengukuran IPM terkait dengan indikator-indikator lain sebagai pendukungnya, dimana setiap perubahan pada indikator tersebut memberikan pengaruh terhadap pembangunan manusia. Seperti dalam mengukur angka harapan hidup maka terlebih dahulu harus ditentukan tingkat kematian penduduk. Tingkat kematian ditentukan oleh beberapa faktor antara lain ketersediaan pangan, kemiskinan, keadaan gizi, penyakit menular, keadaan fasilitas kesehatan, kecelakaan, bencana alam dan kelaparan massal

Kabupaten Rokan Hilir yang mempunyai IPM tinggi (menengah ke atas) tetapi lebih rendah dari induknya, PDRB per kapita yang tinggi tetapi lebih rendah dari induknya. Dalam hal ini, kualitas pembangunan manusia telah berhasil dicapai, dan sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan, walaupun dengan kondisi IPM yang relatif lebih rendah dari induknya. Selanjutnya, upaya untuk meningkatkan pembangunan manusia untuk meningkatkan IPM, langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah tepat, yaitu menggratiskan sekolah dan layanan kesehatan.

Walaupun posisi Kabupaten Mamasa telah pada posisi ideal, tetapi pada enyataannya Kabupaten Mamasa perlu meningkatkan perekonomiannya. Salah satu yang bisa dilakukan adalah investasi pada bidang-bidang produktif yang sesuai dengan komposisi ketrampilan penduduk, seperti kerajinan yang dapat menunjang pariwisata. Salah seorang tohok di Mamasa, Bapak Dm mengatakan: “Potensi pariwisata di

Dengan keberlanjutan usaha rakyat dan pemerintah yang bersinergi, maka diharapkan dapat meningkatkan PDRB per kapita dan IPM di Kabupaten Rote Ndao maupun Mamasa, walaupun untuk dapat mencapai seperti Kabupaten Rokan Hilir adalah hal yang tidak mudah dan sangat sulit sekali dengan potensi yang ada.

4.3 Kesejahteraan masyarakat ditinjau dari pelayanan publik di tiga kabupaten pemekaran


Birokrasi sebagai suatu sistem pengorganisasian aparat negara dengan tugas yang sangat kompleks sangatlah diperlukan dalam pengendalian operasi manajemen pemerintahan, namun kinerja birokrasi dan rutinitas kegiatan pejabat dan aparatur birokrasi sering menyebabkan masalah baru. Permasalahan baru ini menjadikan...
birokrasi statis, kurang peka terhadap perubahan lingkungan sosialnya, bahkan terkesan cenderung resisten terhadap pembaharuan. Keadaan tersebut seringkali memunculkan potensi praktek mal-administrasi yang menjurus pada praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Bertolak dari kondisi tersebut, pemerintah maupun pemerintahan daerah perlu segera melakukan reformasi birokrasi, tidak hanya pada tataran komitmen saja, melainkan sudah saatnya segera diwujudkan pada tataran yang lebih nyata (Pramusinto, editor 2009).


Struktur APBD dari sisi pengeluaran dibeikan menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Berapa jumlah dana yang dialokasikan untuk anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran pembangunan sesungguhnya berperan sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi. Anggaran pembangunan adalah bagian dari pengeluaran daerah yang dialokasikan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas publik danembangunan infrastruktur daerah, sedangkan pengeluaran rutin adalah bagian dari pengeluaran daerah yang dibelanjakan untuk membiayai proses administrasi di daerah,
Persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diterimanya di tiga kabupaten pemekaran yang dilakukan oleh aparat pemerintah dengan pelayanan yang baik, tidak memihak, tidak memberatkan masyarakat, dan lain sebagainya dapat membantu dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik menurut Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertumbuhan ekonomi di tiga kabupaten dan program-program yang pro rakyat miskin serta pelayanan publik yang dilaksanakan terlihat dalam tabel di bawah.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kabupaten</th>
<th>Perekonomian*)</th>
<th>Program</th>
<th>Pelayanan*))</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Rokan Hilir</td>
<td>Lebih tinggi laju ekonomi induknya</td>
<td>Raskin gratis</td>
<td>KKN dan biaya pelayanan tidak jelas</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tingkat kesejahteraan masyarakat tinggi</td>
<td>Berobat subsidi pemda untuk semua kalangan</td>
<td>Kenyamanan dan keamanan pelayanan lebih jelek dari dua kabupaten lainnya</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Basis pertambangan dan penggalian SDA</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rote Ndao</td>
<td>Laju pertumbuhan ekonomi meningkat dan &gt; daripada pertumbuhan penduduknya dan laju ekonomi induknya</td>
<td>Berobat ke dokter, bidan, paramedis dibiaya APBD KTP gratis</td>
<td>Prosedur dan persyaratan pelayanan lebih mudah</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tingkat kesejahteraan masyarakat rendah</td>
<td>Subsidi pupuk Pasang listrik gratis (2012)</td>
<td>Pelayanan lebih cepat</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Basis pertanian</td>
<td></td>
<td>Keadilan dalam pelayanan baik</td>
</tr>
<tr>
<td>Mamasa</td>
<td>Laju pertumbuhan ekonomi meningkat dan lebih tinggi dari pada pertumbuhan penduduknya &lt; laju ekonomi induknya</td>
<td>Tidak ada program khusus untuk rakyat miskin</td>
<td>Prosedur dan persyaratan pelayanan mudah</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tingkat kesejahteraan masyarakat rendah</td>
<td></td>
<td>Pelayanan lebih cepat</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Basis pertanian</td>
<td></td>
<td>Keadilan dan jadwal tidak jelas</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kenyamanan kurang, keamanan baik</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: BPS, 2011 dan data primer, 2011
*) lihat Lampiran 5, Tabel 3a  *)) lihat Tabel 8a

Mohri Yulistiani menyatakan, pelayanan publik merupakan salah satu poin yang krusial untuk wujudkan good local governance. Hal ini karena pelayanan publik menjadi area dominan para stakeholder dalam sebuah negara bersinggungan secara langsung. Di sini terjadi interaksi yang intensif antara pemerintah dan warga negaranya. Oleh karena
itu, tujuan utama proses desentralisasi adalah untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat (Yulistiani et al. 2007).

4.2.3.1 Kabupaten Rokan Hilir


Perlu dicermati adanya anggota masyarakat yang mengeluh karena diperlakukan tidak adil. Walaupun Kabupaten Rokan Hilir kaya raya, tetapi program-program pengentasan kemiskinan belum dapat mentuntaskananya. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Bapak Sym, SH mengatakan: "Pemerintah telah menggratiskan masyarakat untuk berobat, tidak hanya rakyat miskin, tapi semua masyarakat menikmati pengobatan gratis. Saya waktu berobat hanya membayar Rp. 9.000,00 saja. Kalau tidak ada subsidi dari pemerintah bisa mencapai 300 ribuan rupiah. Penduduk miskin mencapai 10,5% atau 57.282 orang (2009) atau 12.562 KK, hal itu berarti pembangunan rumah gratis 5 (lima) unit per desa per tahun selama lima tahun baru mencapai 140 desa x 5 unit x 5 tahun = 3.500 unit atau baru memenuhi 27,86% dari kebutuhan KK miskin. Jadi ketidak-adilan terjadi karena belum terpenuhinya kebutuhan perumahan yang mereka harapkan”.

Sedangkan menurut masyarakat di Rokan Hilir, kepastian besarnya biaya yang harus dikeluarkan pada umumnya mengatakan ‘tidak tahu’, dan ada yang mengatakan tidak pasti’ besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menerima pelayanan. Kata seorang warga, Bapak Skr yang sedang meminta pelayanan di suatu instansi: “Saya tidak tahu harus bayar berapa, kita lihat saja nanti”. Sedangkan jadwal atau jam
pelayanan yang diberikan pada umumnya mereka sepakat pasti artinya jadwal atau jam
pelayanan yang diberikan instansi pemerintah kabupaten pasti. Dikatakan bahwa jam
pelayanan yang diberikan sesuai dengan jam yang telah ditentukan oleh instansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Persepsi masyarakat terhadap disiplin petugas pelayanan pada umumnya
menyatakan disiplin, walaupun begitu persepsi mereka terbelah sebagian mengatakan
disiplin dan di lain pihak mengatakan tidak disiplin. Hal ini menunjukkan bahwa
petugas pelayanan yang ada di instansi-instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan
Hilir tidak sama dalam menerapkan aturan kedisiplinan petugas pelayanan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Wawancara dengan salah seorang aparat
Bapak pada tanggal 20 Oktober 2011 di kantornya mengatakan : “Kami tidak dapat
melayani permintaan bapak, karena petugas yang bersangkutan anaknya sakit jadi tidak
masuk kantor. Sekarang sedang musim DB pak dan komputernya di
password”. Di
instansi lain hal sama juga terjadi, Ibu X mengatakan : “Maaf bapak petugasnya tidak
ada”, “apa yang lain tidak dapat memberi data yang saya butuhkan?”; jawabnya :
“Tidak bisa bapak, karena kami tidak tahu”.

Persepsi masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir terhadap kemampuan petugas
pelayanan pada umumnya mengatakan ‘mampu’ memberikan pelayanan, walaupun ada
yang mengatakan tidak tahu. Hal ini menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat yang
meragukan kemampuan petugas pelayanan. Pada umumnya masyarakat dalam meminta
pelayanan di instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir merasa nyaman dan aman.
Walaupun begitu ternyata ada beberapa anggota masyarakat yang merasa tidak nyaman
dan tidak aman dalam meminta pelayanan di instansi pemerintah kabupaten. Kata Bapak
Skr : “Instansi di sini halamannya sempit, dan gedungnya juga sempit sehingga kalau
kita minta pelayanan tidak nyaman dan merasa tidak aman”. Banyak gedung instansi
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Bagan Siapi-api yang masih menyewa, sehingga
terbatas halaman dan kapasitasnya.

4.2.3.2 Kabupaten Rote Ndao

Walaupun Kabupaten Rote Ndao masuk pada klasifikasi ‘daerah maju dengan
cepat’ walaupun kabupaten tidak kaya dan perekonomian utamanya didukung sektor
pertanian yang semakin menurun karena berkembangnya sektor jasa, kontribusi PAD
pada APBD kurang dari lima persen. Walaupun begitu, pemerintah daerah mempunyai
banyak program untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakatnya. Dengan program-program ini masyarakat merasakan bahwa pemerintah daerah telah berusaha mensejahterakan masyarakatnya.

Masyarakat di Kabupaten Rote Ndao mempunyai persepsi pelayanan yang lebih baik daripada di dua kabupaten lainnya. Persepsi masyarakat di Kabupaten Rote Ndao tentang prosedur dan kemudahan pelayanan adalah mudah didapat, tetapi sebagian mereka mengatakan berbelit-belit untuk memperoleh pelayanan. Sebagaimana dalam penjelasannya sebagian responden mengatakan bahwa, kadang-kadang pelayanan yang diibarkan berbelit-belit seperti yang terjadi pada pelayanan di Puskesmas.


Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan salah satu Kepala Bagian di Sekretariat Daerah yang mengatakan: “Beliau dari jalur independen, sehingga berani mengambil tindakan yang mungkin tidak sesuai dengan para elit politik, yang penting untuk kepentingan masyarakat banyak”.

Kuncoro (2006) mengatakan, terlihat jelas dari rendahnya proporsi PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap total pendapatan daerah dibanding besarnya subsidi (grants) yang didrop dari pusat. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah. PAD terdiri dari pajak-pajak daerah, retribusi daerah, ikrar/jenewa dari dinas, laba bersih dari perusahaan daerah (BUMD) dan lain-lain penerima.

Selanjutnya Kuncoro (2006) mengatakan setidaknya ada lima penyebab utama rendahnya PAD yang pada gilirannya menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap subsidi dari Pusat. Pertama, kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber


Faktor penyebab ketergantungan fiskal yang keempat bersifat politis. Ada yang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme. Faktor terakhir penyebab adanya ketergantungan
tersebut adalah kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selama ini pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk blok (block grants) dan spesifik (specific grants). Subsidi yang bersifat blok terdiri dari Inpres Dati I, Inpres Dati II dan Inpres Desa. Subsidi yang bersifat spesifik meliputi inpres pengembangan wilayah, Sekolah Dasar, kesehatan, penghijauan dan reboisasi, serta jalan dan jembatan. Perbedaan utama antara subsidi blok dengan subsidi spesifik adalah bahwa daerah memiliki keleluasaan dalam penggunaan dana subsidi blok, sedang penggunaan dana subsidi spesifik sudah ditentukan oleh pemerintah pusat dan daerahidak punya keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut. Apabila dilihat dari sisi umlah bantuan yang diterima oleh pemerintah daerah sejak Repelita I, maka bantuan yang bersifat spesifik jauh lebih besar dari pada blok. Tidak berlebihan bila disimpulkan bahwa pemerintah pusat hanya memberi kewenangan yang lebih kecil kepada pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan di daerahnya.

Selanjutnya, persepsi masyarakat terhadap keadilan pelayanan yang dilakukan parat pemerintah di Kabupaten Rote Ndao pada umumnya ‘adil’, tetapi dalam penjelasannya ada beberapa masyarakat yang mengatakan tidak adil, bahkan sangat tidak adil. Salah satu warga yang sedang meminta pelayanan di suatu instansi mengatakan : "Kami tidak iri Bapak, dengan ibu itu karena beliau sudah tua dan sakit, saya justru hormat dengan petugas yang mendahulukan beliau daripada lainnya. Tapi bapak melihat sendiri, ada beberapa orang yang tidak setuju dengan tindakan petugas” (hasil wawancara dengan Bapak Hns warga yang sedang mengantri meminta pelayanan di suatu Puskesmas pada hari Rabu, tanggal 8 September 2011).

Persepsi masyarakat di Kabupaten Rote Ndao terhadap kemampuan petugas pelayanan pada umumnya mengatakan ‘mampu’ memberikan pelayanan, walaupun ada yang mengatakan tidak tahu. “Kalau saya ke kecamatan menanyakan bagaimana mengurus surat-surat yang saya butuhkan, petugas menjawabnya dan saya senang dan puas dengan jawabannya” kata Bapak Hns.

Pada umumnya masyarakat dalam meminta pelayanan di instansi pemerintah kabupaten merasa nyaman dan aman. Walaupun begitu, ternyata ada beberapa anggota masyarakat yang merasa tidak nyaman dan tidak aman dalam meminta pelayanan di instansi pemerintah kabupaten. Hal ini disebabkan kantor Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang masih dalam tahap penyelesaian, sehingga lingkungan kantor masih belum tertata dengan baik.

4.3 Kabupaten Mamasa

Persepsi umum masyarakat di Kabupaten Mamasa menyatakan bahwa ‘tidak tahu’ apakah pelayanan yang diterimanya adil atau tidak. Artinya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam penjelasannya kadang-kadang masih ada KKN, dan ada hal-
hal tertentu yang tidak dapat dilakukan sehingga terpaksa berlaku tidak adil. Bapak Frd mengatakan: “Kalau kita punya saudara atau kenalan di sini, kita dapat minta bantuaanya untuk menguruskan keperluan kita”.

Kabupaten Mamasa tidak ada program-program yang seperti di Rote Ndao dan Rokan Hilir, tetapi warga secara umum masih menganggap ‘wajar’ biaya yang harus dibayarkan untuk memperoleh pelayanan. Meskipun ada yang mengatakan tidak wajar, sebagaimana katanya: “Mestinya untuk memperoleh KTP itu gratis, seperti di daerah lain. Di sini harus bayar, mahal lagi” (wawancara dengan Bapak Frd, hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011).


Kejelasan petugas pelayanan yang harus memberikan pelayanan menurut responden pada umumnya ‘jelas’ kepada siapa mereka harus meminta pelayanan, namun ada yang mengatakan tidak jelas karena tidak ada pembagian tugas yang jelas untuk setiap petugas. Wawancara dengan salah seorang warga yang meminta pelayanan (Bapak Erw, Mamasa) di suatu instansi mengatakan: “Sudah cukup lama Bapak, tapi tanya orang yang menangani baru ke luar. Jadi harus menunggu dia datang”.

Persepsi masyarakat terhadap kemampuan petugas pelayanan pada umumnya mengatakan ‘mampu’ memberikan pelayanan, walaupun begitu ada yang mengatakan tidak tahu dan tidak mampu. Hal ini menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat yang beragakan kemampuan petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Saya pernah meminta keterangan untuk memperoleh surat yang saya butuhkan, petugas itu malah meminta saya untuk bertanya kepada yang lain saja” kata

Umumnya masyarakat dalam meminta pelayanan di instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa menyatakan ‘tidak tahu’, nyaman atau tidak, tetapi dalam hal keamanan sepakat menyatakan ‘aman’. Walauapun ada beberapa anggota masyarakat yang merasa tidak nyaman dan tidak aman dalam meminta pelayanan di instansi pemerintah kabupaten karena dibayangi oleh kebohongan dan gedung yang sempit. Sedangkan yang menyatakan nyaman dan aman karena petugas ramah dan ada petugas pengaman.

Jadi persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik di tiga kabupaten adalah ‘baik’. Tapi apabila dicermati, persepsi masyarakat di Kabupaten Rote Ndao lebih baik daripada dua kabupaten lainnya dan pelayanan publik di Kabupaten Rokan Hilir paling rendah, artinya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat dalam meminta pelayanan paling mahal pasti dan keadilan pelayanan juga kurang. Jadwal waktu pelayanan di Kabupaten Rote Ndao paling meragukan, artinya jadwal pelayanan tidak pasti (lihat Lampiran 6, Tabel 4.5a)


Kabupaten Rote Ndao relatif pelayanannya lebih baik dari pada Kabupaten Mamasa, dan laju pertumbuhan perekonomiannya lebih tinggi dari pada kabupaten induknya. Untuk dapat mencapai kondisi ideal, Kabupaten Mamasa seharusnya memprioritaskan sektor-sektor riil di masyarakat yang menjadi sektor basis dan menjadi unggulan untuk menggerakkan perekonomiannya. Dengan bekal kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dapat membentuk program-program lain seperti TU’U dan koperasi sebagai dasar perekonomian rakyat.

4.2.4 Kesejahteraan masyarakat ditinjau kondisi sosial kemasyarakatan di tiga kabupaten pemekaran

Dalam kehidupan bermasyarakat adanya anggapan (stereotype), prasangka (prejudice), dan stigma adalah gejala sosial yang wajar dalam bergaul dan berinteraksi. Sutudito (2007:76) mengatakan, perbedaan-perbedaan persepsi antargolongan sosial yang ada ini tidak dapat dipungkiri lagi bisa menjadi pemicu dalam konflik antargolongan atau kelompok sosial. Konflik-konflik yang terjadi akhir-akhir ini pada dasarnya merupakan perkembangan dari adanya stereotype dan prasangka yang berlebihan pada masing-masing golongan atau kelompok sosial dalam memandang satu dengan lainnya, walaupun pemicunya dapat terjadi dari berbagai aspek seperti ekonomi, politik dan sosial.


Soekanto (2006) menyatakan, bahwa peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yaitu apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai engan kedudukannya, maka dia menjalankan peranan. Peranan secara umum dapat diartikan sebagai keikutsertaan atau partisipasi secara lahiriah dan batiniah. Peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa

Dikatakan oleh Soekanto, peranan tersebut mencakup tiga hal, yaitu (1) peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang atau tempat seseorang dalam masyarakat, dapat juga diartikan bahwa peranan merupakan serangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatannya, (2) peranan merupakan konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu atau kelompok yang ada dalam masyarakat sebagai organisasi, (3) peranan dapat didefinisikan pula sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2006).

Jadi golongan-golongan terpenting yang ada dalam masyarakat tersebut menjalankan perannya di dalam masyarakat. Kalau terjadi konflik mereka biasanya menangani perannya dan dilibatkan atau melibatkan diri dalam penyelesaiannya.

Kondisi sosial kemasyarakatan di tiga kabupaten pemekaran dapat dilihat dalam matrik berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kabupaten</th>
<th>Peran tokoh adat/masyarakat</th>
<th>Kondisi sosial kemasyarakatan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Rokan Hilir</td>
<td>Tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, diabaikan</td>
<td>Aktivitas masyarakat banyak; Sangat jarang terjadi konflik; kalau ada karena Pilkada/kades; tindak tegas sesuai hukum</td>
</tr>
<tr>
<td>Rote Ndao</td>
<td>Dilibatkan dalam penyelesaian konflik, diakui dan didengar</td>
<td>Aktivitas masyarakat banyak; Jarang terjadi konflik; kalau ada karena Pilkada/kades; tindak tegas sesuai hukum</td>
</tr>
<tr>
<td>Mamasa</td>
<td>Dilibatkan dalam penanganan konflik, diakui dan didengar</td>
<td>Aktivitas masyarakat banyak; Jarang terjadi konflik; kalau ada karena batas wilayah; Ditindak tegas sesuai hukum</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: data primer, 2011 (lihat Lampiran 8, Tabel 9a)

4.2.4.1 Kabupaten Rokan Hilir

Masyarakat Rokan Hilir termasuk tinggi aktivitasnya, hal tersebut juga ditunjang adanya organisasi masyarakat yang cukup banyak dan beragam di Kabupaten Rokan Hilir. Terdapat sekolah dari tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SMP, sampai Sekolah Menengah Umum di setiap kecamatan, adanya tempat ibadah, adanya kader yang ribuan banyaknya, organisasi kelompok belajar (kejar) dengan warga...


4.2.4.2 Kabupaten Rote Ndao

Kehidupan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Rote Ndao cukup harmonis. Hal ini tercermin pada keberadaan tempat ibadah (masjid dan gereja) yang berdampingan bahkan dapat dikatakan bersebelahan seperti di Kecamatan Labalain, Kelurahan Ba’a, di mana umat masing-masing agama dapat melaksanakan aktivitas ibadahnya sehari-hari tanpa merasa terganggu dan diganggu dengan kegiatan ibadah umat lainnya.

Masyarakat Rote Ndao termasuk tinggi aktivitasnya, hal tersebut juga ditunjang adanya organisasi masyarakat yang cukup banyak dan beragam di Kabupaten Rote Ndao. Keberadaan sekolah dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Umum (SLTA) di setiap kecamatan, adanya tempat ibadah, adanya pekerja sosial emasyarakat, organisasi sosial, adanya tokoh wanita yang banyak tersebar di setiap kecamatan, adanya karang taruna yang banyak tersebar di setiap kecamatan. Adanya uskesmas dan puskemas pembantu meningkatkan kegiatan masyarakat, begitu pula
adanya tiga bank yang beroperasi dan koperasi yang berbadan hukum dengan anggota yang cukup banyak dan menyimpan uangnya di koperasi, dan dana bergulir yang berkembang untuk pemberdayaan usaha kecil dan menengah.


4.2.4.3 Kabupaten Mamasa


Konflik yang terjadi menurut persepsi masyarakat di tiga kabupaten dalam setahun kurang lebih 4 (empat) kali, walaupun ada yang menyebutkan antara 4 – 6 kali kejadian. Konflik kalaupun terjadi biasanya pada saat adanya pemilihan kepala desa maupun kepala daerah (Pemilukada). Menurut penjelasannya responden, pemimpin tidak memenuhi janjinya atau atupun karena tidak sesuai dengan janji-janji yang dikatakan.
pada saat kampanye. Konflik karena pelanggaran adat tidak pernah terjadi dan yang sering terjadi konflik karena masalah anak muda.


4.2.5 Kesejahteraan masyarakat ditinjau dari kondisi lingkungan hidup di tiga kabupaten pemekaran

4.2.5.1 Kabupaten Rokan Hilir


Industri di Rokan Hilir cukup berkembang dan jumlahnya ratusan, seperti industri logam, mesin dan kimia ada; industri aneka dan industri pertanian dan kehutanan.


Rosyadi (2010) mengatakan menurut beberapa literatur dikatakan bahwa desentralisasi dapat mendorong pengelolaan sumberdaya alam yang lebih berkelanjutan dalam hal pemerataan, efisiensi, dan keberlanjutan lingkungan, penciptaan insentif

4.2.5.2 Kabupaten Rote Ndao

Kabupaten Rote Ndao terdiri dari hampir seratus pulau dan yang dihuni sebanyak enam pulau, sisanya belum dihuni. Jumlah pulau yang mempunyai nama hampir delapan puluh buah, dan sisanya belum mempunyai nama. Ada tiga pantai yang terkenal di dunia, yaitu Pantai Nembrala, Pantai Bo’a dan Pantai Do’o yang terkenal untuk surfing (selancar). Pada waktu penelitian, sedang berlangsung lomba selancar tingkat internasional, kata seorang aparat kecamatan Bapak S: “Walaupun daerah terpencil tapi lomba selancar tingkatnya internasional lho Pak!”.

Tanaman lontar mendominasi di semua wilayah kabupaten dan menurut informasi masyarakat setempat merupakan tanaman serba guna, yaitu untuk gula dan minuman (niranya), kerajinan (daunnya), obat (bunganya), pewangi kue (sabutnya), merekat/lem (getahnya), dan bangunan (batang dan daunnya), sebagaimana katanya: “Pohon lontar itu banyak dibudidayakan masyarakat Rote. Pohon lontar itu semuanyaermanfaat, dari akar sampai daunnya, tidak ada yang tidak dapat dimanfaatkan” (wawancara dengan Bapak Y, hari Rabu, tanggal 6 September 2010 di rumahnya). Jenis tanaman yang banyak dibudidayakan selain itu adalah kelapa, jambu mete, dan kapuk.

Kabupaten Rote Ndao yang beriklim kering yang dipengaruhi oleh angin Muson engan musim hujan pendek yang jatuh sekitar bulan Desember sampai April, sehingga
mempengaruhi lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang ada. Jenis barang tambang yang ada di Kabupaten Rote Ndao termasuk bahan galian golongan B (PP No. 27 Tahun 1980 dalam Sukandarrumidi, 1999) seperti besi (Fe) hampir di semua kecamatan ada; dan mangaan (Mn) di Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya. Bahan tambang golongan C seperti kalsedon, lempung, gypsum, gamping, kalsit, barit, dan sirtu tidak terdapat data pasti berapa cadangannya (Rote Ndao Dalam Angka 2010).


Kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Rote Ndao semakin baik, terbukti dari banyaknya pohon yang telah ditanam dan dipelihara masyarakat yang diperkirakan mencapai 100 pohon per kepala keluarga. Dengan jumlah kepala keluarga
yang mencapai hampir tigapuluh ribu, maka jumlah pohon tertanam diperkirakan sudah mencapai tiga juta pohon.


Kawasan hutan di Kabupaten Rote Ndao perlu dilestarikan sesuai dengan fungsi sebagai hutan lindung, hutan produksi, hutan konversi, dan hutan mangrove. penataan batas kawasan hutan perlu dilanjutkan, hal itu diperlukan untuk mempertegas atas-batas kawasan. Program pembangunan “embung” dan wajib tanam dan memelihara 5 – 10 batang perlu dilestarikan, karena akan berdampak positif terhadap lingkungan. Manfaat “embung” dapat langsung dirasakan masyarakat ketika musim hujan tiba, sedangkan manfaat penanaman dan pemeliharaan pohon akan dirasakan ma sampai sepuluh tahun kemudian, bahkan bisa lebih lama tergantung jenis pohon yang ditanam. Sebaiknya pohon yang ditanam adalah pohon yang dapat menyimpan air, tahan terhadap kekeringan dan dengan laju evapotranspirasi yang rendah. Soemarwoto (1991) menulis, hutan mempunyai laju evapotranspirasi yang besar, hutan tidak didapatkan air, melainkan menguranginya. Tetapi hutan menaikkan peresapan air ke dalam tanah sehingga memperbesar pengisian air simpanan. Mengingat hal tersebut, reboisasi dan penghijauan mempunyai dua efek yang berlawanan, yaitu pada satu pihak mengurangi aliran air tetapi pada lain pihak menambah pengisian air simpanan. Sehingga dengan itu, reboisasi dan penghijauan haruslah dilakukan dengan hati-hati, terutama di daerah yang curah hujannya rendah atau musim kemaraunya panjang, agar efek pertamanya tidak berlebihan sehingga tidak mengurangi air yang tersedia dalam aliran air. Hutan juga mengurangi terjadinya bahaya banjir, terutama banjir bandang. lamun, adanya hutan yang cukup luas pun tidak meniadakan bahaya banjir.

Dengan kondisi alamnya yang miskin sumberdaya alam dan beriklim kering menjadikan masyarakat Rote Ndao ulet dan teguh serta sederhana hidupnya. Masyarakat Rote Ndao, Sabu, dan masyarakat berbudaya lontar lainnya, dikategorikan

Kabupaten Rote Ndao yang terletak di ujung paling selatan di Indonesia, yang dekat dengan Australia dan berbatasan dengan Samodea Hindia, yang gersang dan tandus mulai berubah dengan adanya penghijauan dengan mewajibkan setiap kepala keluarga menanam dan memelihara 5 – 10 pohon yang telah mencapai lebih kurang 100 pohon per kepala keluarga, dan ‘embung-embung’ yang dibuat oleh pemerintah daerah yang telah mencapai 426 buah. Embung telah dibuat sebelum otonomi tahun 1990, jumlah ‘embung’ saat ini mencapai 426 buah, sebanyak 324 buah dibangun era bupati sekarang (Bapak Drs, LH, MM), dan pembangunan ‘embung’ terus ditambah.

Pulau Rote sebagai pulau terbesar dan Kecamatan Rote Timur adalah kecamatan terluas, dengan adanya kesadaran dan kepedulian pemerintah dan warga masyarakat Rote Ndao untuk memelihara ‘embung’ dan tanaman akan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang telah baik.


Kesadaran akan lingkungan hidup yang demikian itulah yang mendorong pemerintah Kabupaten Rote Ndao membangun ‘embung’ dan mewajibkan masyarakat untuk menanam dan memelihara pohon. Kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Rote Ndao lebih baik daripada sebelumnya karena ketersediaan sumberdaya air semakin baik, hutan semakin terpelihara dan tanaman semakin banyak. Pernyataan di atas sesuai dengan kondisi masyarakat di Rote Ndao, yang berusaha mengoptimalkan lingkungan hidupnya dan mengoptimalkan hidupnya untuk meraih masa depan yang lebih baik. ‘Embung-embung’ yang telah dibangun dan pohon-pohon telah ditanam akan meningkatkan kualitas masyarakat di Kabupaten Rote Ndao.

Walaupun demikian, persepsi masyarakat akan lingkungan hidup paling rendah di antara tiga kabupaten. Mungkin hal ini dikarenakan masyarakat tidak terus puas dengan eadaan yang telah ada dan akan terus berusaha untuk memelihara lingkungan hidupnya yang sangat rentan terhadap bencana kekeringan.


4.2.5.3 Kabupaten Mamasa

Lingkungan yang ada di Kabupaten Mamasa relatif masih asri, terjaga dengan baik. Kalaupun ada yang menyatakan tidak terjaga hal itu dikarenakan dipicu oleh perilaku masyarakat yang membuat kandang babi di pinggir jalan raya, membungun remukukan di kawasan hutan. Hal ini tidak dapat dihindari karena lebih dari 60% Kabupaten Mamasa berupa hutan. Kata seorang aparat : “Masyarakat membuat kandang babi di pinggir jalan dikarenakan mereka tinggal di sepanjang jalan poros Mamasa dan alamannya sempit, terpaksa membuat kandang di pinggir jalan”.

Bencana banjir memang tidak pernah terjadi di Kabupaten Mamasa karena topografi yang bergunung-gunung, tetapi bencana alam seperti tanah longsor sering terjadi. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa, Bapak Drs. BBT, MH juga menjelaskan “Karena topografinya Kabupaten Mamasa yang bergunung-gunung dengan ketinggian
1. Dibangun penangkap air untuk membantu menangani air hujan yang terus menerus. Tetapi, penangkap air tersebut seringkali tidak digunakan dengan benar, sehingga air hujan yang terus menerus tidak dapat disembunyikan dan mengakibatkan banjir.


4.2.5.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Rote Ndao mempunyai PAD yang kecil sepersepuh lebih sedikit dibandingkan PAD Kabupaten Rokan Hilir, dan lebih dari satu setengahnya PAD Kabupaten Mamasa. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mamasa sangat kecil, hal itu disebabkan karena di Mamasa merupakan kabupaten agraris yang tidak mempunyai industri atau perusahaan yang besar. Kontribusi PAD terbesar dari retribusi daerah, yang berarti pemerintah daerah telah menyediakan fasilitas terlebih dahulu guna kepentingan umum, seperti pasar. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan eenerimaan PADnya sesuai dengan potensi daerahnya, tanpa merusak lingkungan hidup.
Permasalahan lingkungan dapat diartikan sebagai masalah habisnya sumberdaya alam karena eksploitasi yang berlebihan yang melebihi tingkat pemulihannya, sehingga membahayakan keberlangsungan makhluk hidup. Persepsi masyarakat terhadap lingkungan hidup di tiga kabupaten terlihat dalam tabel berikut.

Kontribusi PAD terhadap APBD yang rendah dan dominannya dana perimbangan dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten pemekaran menunjukkan ketergantungan fiskal kabupaten pemekaran pada dana perimbangan daripada mengandalkan pembiayaan dari PAD. Kuncoro (2004) telah mengidentifikasi faktor penyebab utama ketergantungan fiskal di Indonesia, setidaknya meliputi: (1) kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah; (2) tingginya derajat desentralisasi dalam bidang perpajakan; (3) kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan; (4) adanya kekhawatiran apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi, maka ada kecendrungan terjadi disintegrasi dan separatisme; (5) kelemahan dalam pemberian subsidi.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kabupaten</th>
<th>PAD/APBD (%)</th>
<th>Program lingkungan hidup</th>
<th>Persepsi masyarakat</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Rokan Hilir</td>
<td>Kecil, jasa gir-iro dan lain-2 PAD yang sah</td>
<td>- Tidak ada program</td>
<td>- Relatif baik</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Embung penampung air</td>
<td>- Banjir dan kebakaran lahan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Hutan yg tertata batas sdh setengahnya</td>
<td>- Disengaja</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Wajib tanam dan memelihara 5-10 pohon /KK</td>
<td>- Masyarakat kurang peduli LH</td>
</tr>
<tr>
<td>Rote Ndao</td>
<td>Kecil, berasal dari retribusi dan lain-2 PAD yang sah</td>
<td>- Embung penampung air</td>
<td>- Kondisi LH tidak tahu</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Hutan yg tertata batas sdh setengahnya</td>
<td>- Kadang terjadi tanah longsor</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Wajib tanam dan memelihara 5-10 pohon /KK</td>
<td>- Hutan gundul</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Reboisasi &lt; 5% (2009)</td>
<td>- Masyarakat cukup peduli LH</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Tidak ada kelanjutan</td>
<td>- Pemda serius menangani</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Tidak ada program lain</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Mamasa</td>
<td>Kecil sekali, dari kekayaan daerah yang dipisahkan</td>
<td>- Relatif baik</td>
<td>- Relatif baik</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Bencana tanah longsor</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Struktur tanah dan hujan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Masyarakat kurang peduli LH</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Pemda kurang serius menangani</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


Pemerintah daerah juga dapat melakukan upay peningkatan PAD melalui optimalisasi peran BUMD dan BUMN. Peran investasi swasta dan perusahaan milik Negara diharapkan dapat berfungsi sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (engine of growth dan sebagai center of economic activity). Dari sisi eksternal, daerah dituntut untuk menarik investasi asing agar bersama-
sama swasata domestic mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan *multiplier effect* yang besar (Mardiasmo 2002).


Penyebab bencana menurut persepsi masyarakat Rote Ndao yang utama adalah dikarenakan ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan serta hutan yang telah rusak. Hal itu diperkuat pernyataan Bupati Rote Ndao “Penyebab longsor, hutan gundul. Setiap KK wajib menanam pohon 5 – 10 batang dan wajib memeliharanya”. Walau pun begitu, masyarakat ada yang menganggap pemerintah masih kurang dapat mengendalikan lingkungan.

Kondisi sumberdaya alam (hutan dan sumberdaya air) yang ada di Kabupaten Rote Ndao masih baik menurut persepsi masyarakat. Hal tersebut juga ditunjang oleh program Bupati Kabupaten Rote Ndao, Drs. LH, MM yang mengatakan: “Membangun embung-embung’ di beberapa tempat untuk menampung air. Dengan harapan pada musim kemarau, tandon air masih tersedia dan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. ‘Embung’ ini merupakan salah satu usaha untuk mengembalikan kelestarian lingkungan dan sumberdaya air yang memang rawan dan kurang baik di Kabupaten Rote Ndao”
(hasil wawancara dengan Bupati Rote Ndao di ruang kerjanya pada hari Senin, tanggal 19 September 2011). Embung telah dibuat sebelum otonomi tahun 1990, jumlah embung saat ini mencapai 426 buah, sebanyak 324 buah dibangun era bupati sekarang (Bapak Drs, LH, MM), dan pembangunan embung terus ditambah. Walaupun begitu, ada juga responden yang menganggap sumberdaya yang ada sudah rusak bahkan sangat rusak.


Jadi pelanggaran yang terjadi disebabkan ketidaktahuan masyarakat akan tataguna lahan yang ada di Kabupaten Rote Ndao.


Kabupaten Mamasa dengan alamnya yang indah akan dikembangkan sebagai laerah wisata, memiliki objek wisata di setiap kecamatan yang kesemuanya sebanyak 62


Penyebab bencana menurut persepsi masyarakat Rokan Hilir yang utama adalah dikarenakan ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungannya. Menurut seorang warga, Bapak Sb mengatakan: “Membakar hutan atau lahan sudah menjadi kebiasaan penduduk di sini Pak, untuk membersihkan lahan dari alang-alang dan semak belukar, karena lebih cepat daripada dengan membabatnya, lebih murah dan praktis. Dengan lahan yang luas, kalau dibabat kapan selesai?”. Walaupun begitu, masyarakat ada yang menganggap bahwa pemerintah kurang dapat mengendalikan lingkungan.
Berbasarkan wawancara dengan salah seorang aparat, Bapak R : “Pemerintah telah menghimbau untuk tidak membakar lahan atau hutan pada waktu membersihkan lahan, karena dapat menimbulkan bahaya seperti kabut asap yang dapat menyebabkan penyakit dan mengganggu penerbangan. Tetapi karena lahan warga masyarakat yang luas dan tidak punya peralatan lain yang memadai, maka warga terpaksa melakukan pembakaran”. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Bapak H. S, SH juga mengatakan : “Kerusakan lingkungan terutama karena kebakaran lahan, terutama terjadi pada lahan pengusaha HPH. Untuk membersihkan alang-alang di lahannya dengan dibakar”.

Kondisi sumberdaya alam (hutan dan sumberdaya air) yang ada di Kabupaten Rokan Hilir masih baik menurut persepsi masyarakat. Walau pun begitu, ada juga responden yang menganggap sumberdaya yang ada sudah rusak bahkan sangat rusak. Ial ini apabila dikaitkan dengan adanya lahan kritis di Kabupaten Rokan Hilir seluas 08.073,87 hektar atau 23,43% dari seluruh laus wilayah, maka jawaban responden tersebut sangat sesuai. Lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang ada di Kabupaten Rokan Hilir keadaan masih terjaga dengan baik, menurut persepsi masyarakat. Walau pun begitu, ada sebagian responden yang mengatakan tidak terjaga dan dalam penjelasannya, hal tersebut dipicu oleh adanya pencurian kayu di hutan-hutan.


Kabupaten Mamasa yang terletak di pegunungan sering terjadi bencana alam, seharusnya pemerintah daerah sudah mengantisipasinya dengan larangan mendirikan bangunan di lereng-lereng bukit dan di hutan-hutan untuk mengurangi bencana. Reboisasi perlu diteruskan untuk memperbaiki hutan yang rusak.
BAB V
ANALISIS KEWILAYAHAN SOSIAL-EKONOMI-LINGKUNGAN DI DAERAH PEMEKARAN

Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pengembangan sektor unggulan daerah, arahan untuk memprioritaskan kawasan-kawasan andalan sebagai lokasi pengembangan produksi daerah secara terpadu perlu lebih ditingkatkan. Upaya untuk memprioritaskan kawasan-kawasan andalan yang akan difokuskan pada peran serta aktif dari investasi dunia usaha, perlu didukung dengan pengembangan infrastruktur wilayah yang dibutuhkan investasi swasta yang akan dikembangkan di masing-masing kawasan. Untuk itu, investasi pemerintah sangat perlu diarahkan untuk mendukung ketersediaan infrastruktur dasar penunjang investasi kawasan andalan tersebut (Mawardi, 2009).


Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan dengan memanfaatkan sebaik-baiknya sumberdaya yang tersedia. Efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemerintahan dan birokrasinya tercermin dari struktur organisasi yang ada, penggunaan anggaran yang ada, pemberian pelayanan kepada masyarakat, dan kinerjanya dalam menggali potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Rudito (2007) menulis, organisasi yang efektif dan efisien mempunyai visi yang jelas bertolak dari mana
mereka melakukan sebuah aktivitas dan juga berkена dengan bagaimana aktivitas organisasi yang bersangkutan.

Hasil perhitungan data sekunder dan data primer yang digunakan dalam pembahasan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 17 Pembangunan ekonomi di tiga kabupaten pemekaran

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kabupaten</th>
<th>Pertumbuhan ekonomi</th>
<th>IW</th>
<th>LQ</th>
<th>IDE</th>
<th>IS</th>
<th>PAD/APBD (%)</th>
<th>Persepsi masyarakat</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Rokan Hilir</td>
<td>3,41 (dengan migas)</td>
<td>-</td>
<td>&gt;1, pertambangan dan penggalian (12,76); pertanian (5,14); perdagangan, restoran dan hotel (1,12)</td>
<td>0,376</td>
<td>1,688</td>
<td>7,16</td>
<td>-Pelayanan baik (66,61); -Sosial kemasyarakatan (59,17); -SDA/LH (66,04)</td>
</tr>
<tr>
<td>Rote Ndao</td>
<td>5,63</td>
<td>0,27</td>
<td>&gt;1, pertanian (4,29); jasa (2,20); perdagangan restoran dan hotel (1,21)</td>
<td>0,698</td>
<td>0,494</td>
<td>4,07</td>
<td>-Pelayanan baik (68,3); -Sosial kemasyarakatan (75); -SDA/LH (62,58)</td>
</tr>
<tr>
<td>Mamasoa</td>
<td>5,61</td>
<td>-</td>
<td>&gt;1, pertanian (5,70); listrik, gas dan air bersih (2,18); jasa (1,43)</td>
<td>0,636</td>
<td>0,544</td>
<td>2,25</td>
<td>-Pelayanan baik (67,74); -Sosial kemasyarakatan (64,56); -SDA/LH (66,14)</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Keterangan: IW = indeks Williamson, LQ = location quotient, IDE = indeks diversitas entropy, IS = indeks spesialisasi, PAD/APBD = kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5.1 Kesejahteraan masyarakat di tiga kabupaten pemekaran

Modifikasi Klassen Tipology

Analisis Klassen yang telah dipergunakan dalam pemetaan 114 kabupaten pemekaran banyak kelemahannya, seperti ‘daerah maju dan cepat tumbuh’ ternyata mempunyai beberapa indikator seperti angka harapan hidup, pengeluaran per kapita dan pendapatan asli daerahnya mempunyai nilai rata-rata yang lebih rendah dari daerah lainnya. Begitu pula untuk klasifikasi lainnya, tidak mencerminkan daerah yang bersangkutan sebagai ‘daerah maju dan cepat tumbuh’. ‘Daerah yang
relatif tertinggal’ ternyata mempunyai Angka Harapan Hidup (AHH) rata-rata di bawah AHH nasional tetapi paling tinggi di semua kelas, pengeluaran per kapita rata-rata melebihi pengeluaran per kapita nasional dan lebih tinggi dari ‘daerah maju dan cepat tumbuh’. Kontribusi PAD terhadap APBD empat persen lebih dan lebih tinggi daripada ‘daerah maju dan cepat tumbuh’ serta ‘daerah maju tetapi tertekan’. Selain hal itu, jarak antara kabupaten pemekaran tidak dapat diketahui, baik dalam satu kelompok maupun kabupaten antar kelompok.

Oleh karena itu, guna memperoleh gambaran yang lebih baik dalam pemetaan, maka tipologi Klassen diperbaiki sebagai berikut, didekati dengan indikator-indikator:

1) Laju pertumbuhan ekonomi karena angka pertumbuhan ekonomi mewakili kinerja ekonomi daerah.

2) Pendapatan perkapita (PDRB per kapita) dapat mewakili tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat.

3) Laju pertumbuhan penduduk, dapat menunjang (atau sebaliknya justru menghambat) peluang mereka dalam meraih tujuan-tujuan pembangunan.

4) Indek Pembangunan Manusia (IPM), mencerminkan kemampuan dasar penduduk pada tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat kemampuan daya beli.

5) Tingkat kemiskinan merupakan ukuran yang umum digunakan untuk merepresentasikan kesejahteraan masyarakat dari sisi materiil.

6) Pendapatan asli daerah (PAD) kontribusinya pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi daerahnya.

7) Pelayanan publik menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi tujuan pembentukan daerah otonom.

8) Kondisi sosial kemasyarakatan mencerminkan kehidupan penduduk di daerah pemekaran, aktivitasnya, peranan tokoh masyarakat dan sebagainya.

9) Kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, dapat menggambarkan ada dan tidaknya kerusakan lingkungan, kepedulian pemerintah daerah dalam menangani lingkungan hidup, dan kesadaran penduduk akan lingkungan hidupnya.
Selanjutnya untuk memperoleh gambaran yang lengkap akan kondisi 114 kabupaten pemekaran, maka laju pertumbuhan ekonomi ditempatkan pada sumbu x dan PDRB per kapita ditempatkan pada sumbu y yang membentuk empat kuadran. Berdasarkan hal tersebut, tidak ada satupun kabupaten pemekaran yang masuk kategori kuadran I, “daerah pemekaran yang ideal” dengan laju ekonomi tinggi dan PDRB per kapita tinggi. Kebanyakan kabupaten pemekaran terkelompok di nilai PDRB per kapita di bawah Rp. 21.000.000,- dan laju ekonomi di sekitar 4 – 7 persen. Oleh karena itu, dilakukan kontrol (cut-off) dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional dan PDRB per kapita nasional.

Gambar 5 Matrik pengelompokan 114 kabupaten pemekaran berdasarkan Klassen Tipology yang dimodifikasi

Berdasarkan sumber rujukan dari BPS (2010), laju pertumbuhan ekonomi mencapai 6,01 persen (2008) dan PDRB per kapita sebesar Rp. 21.666.747,80 (2008) yang dipergunakan sebagai cut-off. maka terjadi pergeseran kuadran, pada (laju ekonomi dan PDRB per kapita lebih tinggi nasional, “daerah maju dan...
cepat tumbuh") terdapat enam kabupaten pemekaran, yaitu: Kabupaten Kutai Timur, Pelalawan, Boven Digoel, Rokan Hulu, Kutai Barat, dan Kuantan Singingi.


Kuadran IV adalah kabupaten pemekaran yang mempunyai nilai PDRB per kapita lebih tinggi dari nasional tetapi mempunyai laju pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari pertumbuhan nasional (“daerah maju tetapi tertekan”), sebanyak sembilan kabupaten, yaitu: Kabupaten Sukamara, Rokan Hilir, Bangka Barat, Natuna, Tanjung Jabung Timur, Luwu Timur, Sumbawa Barat, Mimika dan Siak.

Dengan klasisifikasi yang dimodifikasi ini, dari ploting kabupaten pemekaran dalam kuadran dapat diketahui jarak dari masing-masing kabupaten dalam satu kelas maupun antar kelas. Sedangkan pada tipologi Klassen tidak dapat diketahui jarak dari
masing-masing kabupaten pemekaran. Penerapan modifikasi Klassen ini lebih fleksibel untuk memetakan kabupaten atau kota atau provinsi dengan indikator yang lebih luas lagi.

Pemilihan tiga kabupaten pemekaran secara acak sederhana pada 114 kabupaten pemekaran, terpilih Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Mamasa. Berdasarkan modifikasi Klassen tersebut, Kabupaten Rokan Hilir masuk pada klasifikasi “daerah maju tetapi tertekan”, Kabupaten Mamasa masuk pada klasifikasi “daerah berkembang cepat” dan Kabupaten Rote Ndao masuk dalam klasifikasi “daerah relatif tertinggal”.

5.1.2 Kesejahteraan masyarakat ditinjau dari pembangunan ekonomi di tiga kabupaten pemekaran

Dengan pendekatan Klassen yang telah dimodifikasi, diuji seperti apa kinerja pemerintah daerah di tiga kabupaten pemekaran apabila dianalisis secara dua dimensi dalam pembangunan ekonominya. Pertama, ditinjau dari laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang dikontrol dengan rata-rata nilai laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita kabupaten induknya. Laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita di tiga kabupaten pemekaran, terlihat dalam gambar berikut.

### Gambar 6
Matrik hubungan laju ekonomi dan PDRB per kapita tiga kabupaten
Kabupaten Rokan Hilir masuk pada kuadran I, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Rote Ndao masuk pada kuadran yang sama, kuadran III dengan jarak yang berbeda. Kabupaten Rote Ndao nilai PDRB per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi lebih rendah daripada Kabupaten Mamasa. Nilai PDRB per kapita Rp. 7,37 juta merupakan rata-rata PDRB per kapita kabupaten induknya, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata kabupaten induknya sebesar 6,0 persen. Dari analisis silang indikator laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita di tiga kabupaten tersebut dihasilkan fakta-fakta sebagai berikut.

1) Kabupaten Rokan Hilir masuk kategori ‘daerah maju dan tumbuh cepat’ terutama disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:
   a. Secara spasial Kabupaten Rokan Hilir strategis, dengan Bagan Siapi-api sebagai ibukotanya yang merupakan persinggahan pedagang.
   b. Memiliki kelimpahan sumberdaya alam yang sangat besar.
   d. Sektor basis adalah pertambangan dan penggalian, serta di sektor pertanian.
   e. Banyak industri besar, kegiatan ekspor dan impor berjalan dengan lancar.
   f. Dengan nilai indeks diversitas entropy yang kecil (0,376) menunjukkan kegiatan ekonominya tidak merata dan tidak seimbang, terjadi ketimpangan ekonomi yang terkonsentrasi pada sektor pertambangan dan penggalian saja.
   g. Perekonomiannya terspesialisasi pada sektor pertambangan dan penggalian (IS = 1,688).
   h. Pendapatan per kapita sangat tinggi mencapai Rp. 25,97 juta (2009) melebihi pendapatan per kapita nasional.
   i. Memiliki empat pelabuhan laut muat.
   j. Laju pertumbuhan penduduk rata-rata (5,38 persen) lebih tinggi daripada laju pertumbuhan ekonominya (3,41 persen) apabila dihitung dengan minyak dan gas. Tetapi apabila minyak dan gas dihilangkan, maka laju pertumbuhan ekonominya (7,82 persen) lebih tinggi daripada laju petumbuhan penduduknya. Laju pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduknya lebih tinggi dari kabupaten induknya.
2) Kabupaten Rote Ndao masuk pada klasifikasi III merupakan ‘daerah relatif tertinggal’ secara ekonomi. Hal ini disebabkan terutama oleh faktor-faktor:

a. Secara spasial Kabupaten Rote Ndao merupakan daerah paling ujung selatan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Australia. Akses ke Rote Ndao dapat ditempuh dengan pesawat (pelabuhan udara Lekunik) dan dengan ferry (ada empat pelabuhan laut, Ba’a, Pantai Baru, Papela dan Ndao).


c. Basis ekonomi utamanya pada sektor pertanian, sektor jasa dan perdagangan, restoran dan hotel.

b. Berdasarkan indeks diversitas entropy = 0,698 mendekati satu, yang berarti mempunyai tingkat keberagaman dan keberimbangan di sektor-sektor ekonominya.

e. Perekonomiannya menyebar, tidak terkonsentrasi pada satu sektor pertanian saja (nilai indeks spesialisasi = 0,494 mendekati setengah).


h. Laju pertumbuhan ekonominya fluktuatif dan cenderung melambat dan melebihi laju pertumbuhan penduduknya yang cenderung menurun.

h. Kabupaten Rote Ndao yang miskin akan sumberdaya alam dan lingkungannya yang tandus dan gersang dapat membangun daerahnya karena adanya kepemimpinan yang baik dan mempunyai legitimatisasi yang tinggi. Dengan kestasinya yang dapat mencapai pertumbuhan ekonominya melebihi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kupang, pertumbuhan IPM yang lebih tinggi daripada Kabupaten Kupang, mengurangi penduduk miskin yang signifikan tambah program-program yang pro rakyat miskin dan program-program pengkajuan hidup yang nyata dan berhasil dilaksanakan. Walaupun begitu, pencapaian PDRB per kapita, PDRB atas dasar harga berlaku dan atas harga konstan masih di bawah Kabupaten Kupang sebagai induknya.

i. Untuk dapat mendekati posisi sebagaimana kuadran I, Kabupaten Rote Ndao harus meningkatkan laju ekonominya dengan jalan meningkatkan peran dari...
sektor basisnya, seperti sektor pertanian yang menjadi sektor basis, terutama pada sub sektor peternakan dan perikanan dengan memberi bantuan bibit ternak dan kredit ringan untuk nelayan. Pendapatan per kapita penduduk ditingkatkan melalui koperasi yang khusus menampung hasil kerajinan masyarakat dan industri rumah tangga. Sektor jasa yang juga merupakan sektor basis diperkuat dengan mengundang investor untuk pengelolaan bisnis pariwisata pantai yang terlah terkenal, sehingga dapat membawa *multiplier effect* pada perdagangan, restoran dan hotel dan bagi pemerintah daerah serta masyarakat Rote Ndao pada umumnya.

3) Kabupaten Mamasa juga masuk pada klasifikasi ‘daerah relatif tertinggal’ sebagaimana Kabupaten Rote Ndao. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor:
   c. Basis ekonomi adalah sektor pertanian, sektor listrik, gas dan air bersih serta jasa.
   d. Indeks diversitas entropy sebesar 0,638 yang berarti mempunyai keberimbangan dan keberagaman sektor-sektor ekonomi.
   e. Nilai indeks spesialisasi sebesar 0,544 yang berarti tidak ada sektor yang menjadi konsentrasi perekonomian, perekonomiannya menyebar, utamanya di sektor pertanian, khususnya di sub sektor perkebunan.
   g. Laju pertumbuhan ekonominya berfluktuatif dan cenderung menurun dan lebih rendah dari kabupaten induknya, Kabupaten Polewali Mandar.
   h. Penduduk miskin semakin meningkat, tahun 2004 sebesar 29,77 persen dan di tahun 2008 sebesar 68,88 persen. Tidak ada program untuk masyarakat miskin yang signifikan, begitu pula program untuk lingkungan hidupnya. Kabupaten Mamasa telah dapat melampaui induknya dalam hal PDRB per kapitanya,
tetapi secara keseluruhan Kabupaten Mamasa tidak berkembang dengan baik sebagaimana tujuan awal pembentukannya, ditambah adanya kepemimpinan yang kurang baik dan tidak ada legitimasi dari masyarakat.

i. Untuk mencapai posisi sebagaimana kuadran I, maka Pemerintah Kabupaten Mamasa harus dapat meningkatkan peran sektor basis bagi perekonomiannya, seperti di sub sektor perkebunan yang terkenal dengan hasil kopinya, diolah di alayah Mamasa sehingga dapat menimbulkan multiplier effect bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Sektor jasa ditingkatkan dengan memasarkan obyek-obyek wisata yang banyak tersebar di Mamasa, dan dibentuk bengkel kerja untuk menampung hasil kerajinan cinderamata khas Mamasa. Semuanya itu perlu keberadaan infrastruktur yang memadai yang selama ini menjadi kendala.

2.1 Hubungan PDRB per kapita dengan pembangunan manusia

Rustiadi et al. (2009), menyatakan, sebagai tolok ukur sumberdaya manusia, secara konseptual HDI yang merupakan indikator komposit tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (basic capability) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah (1) tingkat kesehatan yang tercermin dengan umur panjang dan sehat yang mengukur peluang hidup, (2) berpengetahuan dan berketerampilan, serta (3) akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

UNDP (Laporan Pembangunan Manusia 1996) dalam BPS (2009) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara laju pertumbuhan PDRB per kapita dengan pembangunan manusia, dimana hubungan yang terjadi bersifat timbal balik. Laju pertumbuhan PDRB per kapita berpengaruh terhadap pembangunan manusia, sebaliknya pembangunan manusia juga mempengaruhi laju pertumbuhan PDRB per kapita melalui terciptanya tenaga yang berkualitas. Namun telah terbukti secara empiris bahwa hubungan yang terjadi tidak bersifat otomatis. Dalam lingkup global, banyak Negara yang mengalami laju pertumbuhan PDRB per kapita yang pesat tanpa diikuti dengan peningatan kinerja pembangunan manusia yang memadai. Namun sebaliknya, banyak pula Negara yang mengalami laju pertumbuhan PDRB per kapita yang tidak terlalu cepat tetapi mampu meningkatkan kinerja pembangunan manusia dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam kontek ini, peran pemerintah menjadi sangat...
penting dalam memperkuat hubungan diantara keduanya melalui kebijakan yang tepat. Kebijakan yang menempatkan laju pertumbuhan PDRB per kapita sebagai sarana dan pembangunan manusia sebagai tujuan akhir (BPS, 2009).

Nilai 68,35 dan 15,08 adalah nilai rata-rata IPM dan rata-rata PDRB per kapita di tiga kabupaten induk untuk tahun 2008. Posisi ideal pada kuadran I, IPM dan porsi PDRB per kapita tinggi (Kabupaten Rokan Hilir), Kabupaten Rote Ndao ada pada kuadran III dan Kabupaten Mamasa pada kuadran IV.

Rustiadi et al. (2009) menulis, secara eksplisit disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan menitikberatkan pada pembangunan sumberdaya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

Dari hasil analisis silang indikator IPM dan PDRB per kapita tersebut, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1) Kabupaten Rokan Hilir mempunyai PDRB per kapita dan IPM melebihi dua kabupaten lainnya. Hal ini disebabkan karena:

Gambar 7 Matrik hubungan PDRB per kapita dengan IPM tiga kabupaten
b. Pemerintah daerah menggratiskan anak sekolah dan berobat untuk semua kalangan.
c. Sekolah baik negeri maupun swasta dari tingkat taman kanak-kanak sampai sekolah menengah umum tersebar di Rokan Hilir.
d. Kelompok belajar ada di setiap kecamatan.
e. Pemerintah daerah setiap tahun membangun rumah tipe-36 sebanyak lima unit untuk setiap desa diberikan pada masyarakat miskin.
f. Angka melek huruf mencapai 97,3 persen dan angka harapan hidup mencapai 70,94 tahun.
g. Pendapatan per kapita penduduk sangat tinggi Rp. 25,97 juta (2009) melebihi nasional.

Kabupaten Rote Ndao masuk pada kuadran III yang berarti mempunyai IPM dan pendapatan per kapita lebih rendah dari rata-rata tiga kabupaten induk. Hal ini disebabkan karena:
a. Pencapaian IPM Kabupaten Rote Ndao termasuk dalam kategori sedang (nilainya menengah ke bawah), tetapi capaian nilai ini lebih baik daripada
pencapaian IPM Kabupaten Kupang. PDRB per kapita yang besarnya mencapai Rp. 4.510,- lebih rendah daripada PDRB per kapita Kabupaten Kupang. IPM dan PDRB per kapita selalu meningkat setiap tahunnya.

b. Lama sekolah rata-rata penduduk kurang dari tujuh tahun, dan lebih rendah dari rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Kupang. Jadi pendidikan rata-rata masyarakat Kabupaten Rote Ndao adalah tingkat sekolah dasar


d. Sebanyak 12,35 persen penduduknya buta huruf. Tidak ada belajar Paket B maupun C di Rote Ndao.

f. Pendapatan per kapita masyarakat Rote Ndao relatif masih rendah dan masih di bawah kabupaten induknya, tetapi laju pertumbuhan ekonomi dan IPM atau HDI melebihi kabupaten induknya, walaupun masih pada kategori menengah ke bawah atau sedang.

g. Angka kemiskinan masih tinggi mencapai 32,19 persen. Untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

h. Menyadari akan hal tersebut, langkah-langkah yang dilakukan Bupati Rote Ndao (untuk dapat mencapai posisi pada kuadran I) adalah dengan memberikan subsidi pupuk, layanan kesehatan gratis di semua tingkat pelayanan, pasang listrik gratis di tahun 2012 dan menggalakkan budaya TU’U untuk meningkatkan pendidikan anak-anak Rote.

Kabupaten Mamasa masuk kuadran IV yang mempunyai IPM lebih tinggi dari Kabupaten Rote Ndao tetapi lebih rendah dari Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Mamasa masuk kategori “daerah maju tetapi tertekan” hal itu disebabkan karena:

a. Jumlah sekolah dan murid, mulai dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) yang lebih banyak dari Kabupaten Rote Ndao.

b. Kemampuan membaca dan menulis huruf latin, arab dan lainnya dari penduduk yang berumur 10 tahun ke atas mencapai 84,62 persen; angka harapan hidup 70,94 tahun. Hal itu didukung oleh keberadaan sekolah dari tingkat taman kanak-kanak sampai sekolah menengah atas negeri maupun swasta yang tersebar di Mamasa.


d. Rumah sakit di Mamasa ada dua, RSU dan swasta; di setiap kecamatan terdapat Puskesmas, Puskesmas pembantu dan Puskesdes. Dokter umum sebanyak sepuluh orang dan bidan 67 orang, perawat lebih dari seratus
orang, dan ditambah dukun yang jumlahnya lebih dari duaratus orang. Petugas tenaga medis di Mamasa lebih sedikit dibandingkan di Rote Ndao yang tidak punya RSU. Partisipasi keluarga berencana (KB) tinggi mencapai 82,13 persen dari total PUS.


5.1.3 Kesejahteraan masyarakat ditinjau dari persentase penduduk miskin dan pembangunan manusia


<table>
<thead>
<tr>
<th>Penduduk miskin (%)</th>
<th>64.00</th>
<th>66.00</th>
<th>68.00</th>
<th>70.00</th>
<th>72.00</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ROKAN HI</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MAMASA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ROTE NDA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>I</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>II</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>III</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Gambar 8 Matrik hubungan IPM dengan penduduk miskin
Nilai untuk IPM 68,35 adalah nilai rata-rata IPM kabupaten induknya, begitu pula persentase kemiskinan 17,37 adalah persentase kemiskinan rata-rata kabupaten induknya. Adanya cut-off tersebut tidak merubah kedudukan atau posisi masing-masing kabupaten. Kabupaten Rokan Hilir pada kuadran IV, Kabupaten Rote Ndao pada kuadran II dan Kabupaten Mamasa pada kuadran I. Dari gambar matrik tersebut maka diperoleh fakta bahwa:

Kabupaten Rokan Hilir pada posisi ideal dengan IPM tinggi dan penduduk miskin rendah. Hal tersebut disebabkan karena:


b. Angka melek huruf mencapai 97,37 persen dan lama sekolah mencapai 7,20 tahun.

c. IPM Kabupaten Rokan Hilir paling tinggi dibandingkan dua kabupaten lainnya dan melebihi IPM nasional. Dengan jumlah penduduk miskin yang kecil, berarti Kabupaten Rokan Hilir berhasil membangun manusia dan dapat mensejahterakannya.

d. Persebaran penduduk tidak merata. Kecamatan Bagan Sinembah mempunyai kepadatan penduduk tertinggi (157 jiwa per kilometer persegi), dan yang terjarang penduduknya adalah Kecamatan Batu Hampar (24 jiwa per kilometer persegi).

e. Keseriusan pemerintah daerah untuk mencerdaskan masyarakatnya terlihat dari pemerintah menggratiskan sekolah untuk tingkat SD, bahkan Pemerintah Daerah memberi subsidi untuk berobat di tingkat manapun dan untuk semua kalangan, dengan gratis. Kepedulian pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dengan membangun rumah tipe 36 setiap tahun lima unit per desa, yang diberikan kepada masyarakat miskin.

Kabupaten Rote Ndao pada posisis kuadran II dengan IPM lebih rendah daripada Kabupaten Rokan Hilir maupun Kabupaten Mamasa, tetapi mempunyai persentase penduduk miskin yang lebih rendah dari Kabupaten
Mamasa dan lebih tinggi daripada Kabupaten Rokan Hilir. Oleh karena itu untuk mencapai posisi ideal sebagaimana pada kuadran IV:

a. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah melakukan beberapa hal yang signifikan, yaitu program-program yang pro rakyat.

b. Dengan legitimasi yang tinggi dari masyarakat, Bupati yang sangat pro rakyat membuat program-program untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

c. Pemerintah daerah memberikan bantuan subsidi pupuk kepada petani, terutama petani tanaman pangan yang meyerap tenaga kerja lebih dari enampuluh persen.

d. Bupati menggratiskan pengobatan di semua tingkatan pelayanan medis.

e. Budaya TU’U digalakkan untuk menunjang pendidikan dasar serta bantuan pemasangan listrik di tahun 2012..

3) Kabupaten Mamasa pada posisi kuadran I, dengan jumlah penduduk miskin yang sangat tinggi tetapi mempunyai IPM yang tinggi pula (melebihi Kabupaten Rote Ndao). Hal tersebut terjadi karena:

a. Di bidang pendidikan di Mamasa lebih maju dibandingkan Rote Ndao, selain dari IPM-nya yang lebih tinggi, juga terlihat dari jumlah sekolah dan murid, mulai dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) yang lebih banyak.

b. Kemampuan membaca dan menulis huruf latin, arab dan lainnya dari penduduk yang berumur 10 tahun ke atas mencapai 93,60 persen; yang tidak/belum sekolah 9,36 persen; masih sekolah 22,49 persen; tidak sekolah lagi 68,14 persen. Hal itu didukung oleh keberadaan sekolah dari tingkat taman kanak-kanak sampai sekolah menengah atas negeri maupun swasta yang berjumlah 422 sekolah dengan 1.443.336 murid.

c. PDRB per kapita yang lebih rendah daripada PDRB per kapita nasional, tetapi lebih tinggi daripada kabupaten induknya, Kabupaten Polewali Mandar.

d. Masyarakat Kabupaten Mamasa mempunyai harapan hidup mencapai 70,94 tahun, lebih baik daripada masyarakat di Kabupaten Rote Ndao.
Angka harapan hidup yang tinggi tersebut mungkin dipengaruhi kehidupan masyarakat petani yang relatif tenang.

e. Angka melek huruf mencapai 84,62 persen dan rata-rata lama sekolah mencapai 6,38 tahun menunjukkan bahwa masyarakat Mamasa yang buta huruf sedikit, walaupun dengan pendidikan rata-ratanya hanya sekolah dasar.

f. Masyarakat Mamasa menggantung hidup utamanya pada subsektor perkebunan. Hasil pertanian umumnya hanya menjadi komoditas yang diperjual-belikan, karena belum ada industri pengolahnya.


h. Penduduk miskin tinggi, ada kecenderungan bertambah, di mana pada tahun 2004 sebesar 29,77 persen dan di tahun 2008 (Mamasa Dalam Angka 2010) ada 73,64 persen rumah tangga miskin atau 22.762,86 rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga empat, maka penduduk miskin jumlahnya lebih dari 91 ribu atau 72,19 persen.

i. Pemerintah kurang peduli dalam pengentasan kemiskinan.

5.1.4 Kesejahteraan masyarakat ditinjau dari pelayanan publik di tiga kabupaten pemekaran

Pemekaran daerah menjadi daerah otonom baru diharapkan dapat meningkatkan prakarsa dan peran serta masyarakat yang terlihat dalam partisipasi warga masyarakat pada pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, ikut serta dalam pemilihan umum, ikut serta dalam pengontrol pelaksanaan pembangunan, ikut serta memelihara hasil-hasil pembangunan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang berupa kesadaran membantu kesengsaraan atau musibah yang dialami masyarakat di tempat dan di Indonesia, tidak diskrimatif, tidak membedakan asal suku bangsa. Selain itu, otonomi daerah diarahkan untuk peningkatan pelayanan publik yang ditandai
oleh semakin cepat, murah, akurat dan tidak diskriminatifnya dalam pelayanan, dan
daya saing daerah yang semakin tinggi dengan adanya perekonomian daerah yang
semakin meningkat, sarana dan prasarana yang semakin banyak dan memadai,
semakin banyak investasi yang masuk, pendidikan masyarakat yang semakin tinggi
dan angka ketergantungan yang semakin rendah.

Pelayanan publik yang dilakukan pemerintah pada umumnya dicerminkan oleh
kinerja birokrasi pemerintah. Sampai sekarang masih terjadi ekonomi biaya tinggi
hampir di setiap bentuk pelayanan dan terjadi inefisiensi di sektor pemerintah, hal ini
setidaknya bersumber dari kinerja birokrasi yang masih belum baik dan memuaskan
masyarakat. Sinambela, dkk (2008) mengatakan dalam iklim demokratis diharapkan
adanya perubahan performa dari birokrasi, artinya birokrasi pemerintah diharapkan
lebih optimal dalam memberikan pelayanan dan menjadikan masyarakat sebagai pihak
paling utama yang harus dilayani. Kinerja birokrasi yang menampilkan red tape atau
inefisiensi dalam pelayanan, termasuk masih terdapat patologi (korupsi), tampaknya
masih ada resistensi dalam sikap dan perilaku para birokratnya (pegawai) dalam
memandang tugas dan fungsinya yang telah terpupuk lama.

Kinerja birokrasi terlihat salah satunya pada pencapaian penurunan angka
kemiskinan dan pelayanan publik yang diberikan. Matrik di bawah menggambarkan
pelayanan publik dan capaian penurunan angka kemiskinan di tiga kabupaten pemekaran.
Kondisi pelayanan publik dan penurunan angka kemiskinan dikontrol
dengan nilai rata-rata dari pencapaian ketiga kabupaten pemekaran.

Gambar 9 Matrik pelayanan publik dan porsi PAD/APBD tiga kabupaten
Nilai 67,55 persen dan 37,11 persen adalah nilai rata-rata persepsi pelayanan publik diri tiga kabupaten dan nilai rata-rata persentase penduduk miskin di tiga kabupaten pemekaran. Posisi ideal pada kuadran II, pelayanan publik tinggi dan kinerja pemerintah bagus dilihat dari penurunan angka kemiskinan yang tinggi. Dari analisis indikator silang antara persentase penduduk miskin dan pelayanan publik diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1) Kabupaten Rokan Hilir yang berada pada kuadran III mempunyai penduduk miskin paling rendah di antara tiga kabupaten dan persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah daerah masih lebih rendah daripada di Kabupaten Rote Ndao, maupun daripada Kabupaten Mamasa. Hal ini disebabkan karena:
   b. Sebagian besar kantor pelayanan publik masih menggunakan gedung sewa dari penduduk, sehingga masyarakat kadang tidak puas dengan kondisi ini.
   c. Pelayanan kesehatan dan pendidikan disubsidi pemerintah daerah.
   d. Pemerintah daerah membangun rumah tipe 36 untuk masyarakat miskin sebanyak lima unit per desa per tahun.
   e. Anggaran pegawai lebih rendah daripada anggaran pembangunan.
   f. Penerimaan pendapatan asli daerah berasal dari pajak yang cukup besar dari usaha-mura-perusahaan sedang dan besar yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.
   g. Untuk mencapai posisi pada kuadran II, yaitu meningkatkan pelayanan publik dengan cara segera menyelesaikan pembangunan perkantoran di Kecamatan Batuenam sehingga pelayanan akan lebih baik.

2) Kabupaten Rote Ndao berada kuadran I II ternyata persepsi masyarakatnya dalam pelayanan tertinggi dibandingkan dengan dua kabupaten lainnya. Persentase kemiskinannya lebih tinggi daripada Kabupaten Rokan Hilir tetapi lebih rendah daripada Kabupaten Mamasa. Hal ini disebabkan karena:
   a. Prosedur dan persyaratan pelayanan tidak berbelit-belit.
b. Pemerintah daerah memberi subsidi pupuk, pemasangan listrik dan mendorong budaya TU’U.

c. Masyarakat kebanyakan hidup dari sektor pertanian, khususnya perikanan dan peternakan.


e. Anggaran pembangunan lebih tinggi daripada alokasi anggaran pegawai.

f. Pemerintah berusaha menarik investor untuk menanamkan modalnya di bisnis pariwisata pantai. Penjajakan telah dilakukan dan tinggal menanti realisasinya. Apabila bisnis pariwisata pantai dapat diwujudkan dan berkembang, maka akan memberi kontribusi peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Rote Ndao, begitu pula masyarakat akan dapat memperoleh lapangan pekerjaan yang layak (multiplier effect).

3) Kabupaten Mamasa pada kuadran I mempunyai persentase penduduk miskin paling tinggi dan persepsi masyarakat pada pelayanan masih lebih baik daripada di Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini disebabkan karena:

a. Masyarakat hidupnya bergantung pada hasil perkebunan.

Jika ada hasil industri ini yang dipasarkan ke luar daerah, biasanya berdasarkan pesanan konsumen yang sifatnya tidak berkesinambungan (Santoso, ed., 2005).

c. Pemerintah tidak mempunyai program-program untuk pengentasan kemiskinan yang tinggi di Mamasa.

d. Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui pembuatan bengkel kerja (workshop) untuk pembuatan cindera mata yang dapat menunjang pariwisata. Sebagaimana harapan salah satu tohok masyarakat (Bapak Dm), yang pernah mendatangkan turis dari Perancis dengan menjual hasil karya seni masyarakat.

e. Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui pengolahan hasil perkebunan masyarakat (kopi) di wilayah Mamasa sehingga dapat menimbulkan multiplier effect.

5.1.5 Kesejahteraan masyarakat ditinjau dari kondisi sosial kemasyarakatan di tiga kabupaten pemekaran


Dikutip oleh Soekanto, peranan tersebut mencakup tiga hal, yaitu (1) peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang atau tempat seseorang dalam masyarakat, dapat juga diartikan bahwa peranan merupakan serangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemas karnya, (2) peranan merupakan konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu atau kelompok yang ada dalam masyarakat sebagai organisasi, (3) peranan dapat dikatakan pula sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2006).

![Diagram matrik hubungan antara kondisi sosial masyarakat dengan PDRB per kapita](image.png)

Gambar 10 Matrik hubungan antara kondisi sosial masyarakat dengan PDRB per kapita.

Kondisi kemasyarakatan dinilai dari persepsi masyarakat terhadap aktivitas masyarakat, konflik di masyarakat, penyebab konflik, peranan tokoh masyarakat atau tokoh adat dalam konflik, peranan tokoh masyarakat atau tokoh adat di masyarakat dan bagaimana penanganan konflik. Nilai rata-rata dari kondisi sosial kemasyarakatan (66,24 persen) di tiga kabupaten pemekaran dijadikan kontrol terhadap kondisi sosial kemasyarakatan di tiga kabupaten. Pendapatan per kapita merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang akan berpengaruh dalam aktivitas masyarakat dan peranan tokoh masyarakat atau tokoh adat dalam kehidupan kemasyarakatan. PDRB per kapita tiga kabupaten rata-ratanya (Rp. 12,54 juta) menjadi kontrolnya.

Dari analisis silang indikator sosial kemasyarakatan dan pendapatan asli daerah tersebut diperoleh fakta-fakta bahwa:

1) Kecamatan Rokan Hilir berada pada kuadran IV yang berarti PDRB per kapita sangat tinggi tetapi kondisi sosial kemasyarakatannya lebih rendah daripada Kabupaten Mamasa. Hal ini disebabkan karena:

2. Toleransi beragama cukup baik terlihat dari pegawai pemerintah daerah yang bermacam-macam agamanya.


4. Masyarakat menyetujui kalau ada masalah pidana atau perdata yang melibatkan orang-orang yang berlaian agama dibawa ke ranah hukum, tidak main hakim sendiri. Masyarakat disibukkan dengan ikut berorganisasi, baik menjadi pengurus maupun anggota organisasi kemasyarakatan, seperti karang taruna, pekerja sosial, dan sebagainya.

5. Untuk meningkatkan peran tokoh adat atau tokoh masyarakat yang duduk dalam Lembaga Musyarawarah Adat sebaiknya dipilih oleh masyarakat sehingga legitimasinya diakui dan dapat mewakili masyarakatnya.

Kabupaten Rote Ndao pada posisi di kuadran II yang berarti kehidupan sosial kemasyarakatannya paling baik, walaupun PDRB per kapitanya paling rendah. Hal ini disebabkan karena:


7. Masyarakat sangat menjaga kerukunan hidup beragama, kehidupan antar umat beragama sangat harmonis, terbukti dari keberadaan masjid dan gereja yang berdampingan di Kelurahan Ba’a Kecamatan Lobalain. Umat masing-masing agama menjalankan ibadahnya tanpa merasa terganggu dan diganggu oleh umat lainnya.


9. Pekerja sosial masyarakat tersebar di setiap kecamatan dengan jumlah mencapai hampir enam puluh orang, organisasi sosial ada enam buah, tokoh wanita hampir seratus orang dan karang taruna sebanyak
delapanpuluh. Semua itu menunjukkan bahwa masyarakat Rote Ndao cukup aktif dan hidup rukun dan damai.

e. Masyarakat sampai saat ini masih memanfaatkan pohon lontar untuk segala keperluannya, dari akar, batang, daun bunga, buah dan getahnya. Hirarkhi masyarakat masih jelas, terlihat dari perlakuan masyarakat umum yang sangat hormat terhadap keturunan raja-raja yang ada di Rote Ndao, yang relatif lebih mapan hidupnya.

f. Masyarakat juga menyetujui kalau ada masalah pidana atau perdata yang melibatkan orang-orang yang berlaian agama dibawa ke ranah hukum, tidak main hakim sendiri. Masyarakat disibukkan dengan ikut berorganisasi, baik menjadi pengurus maupun anggota organisasi kemasyarakatan, seperti karang taruna, pekerja sosial, dan sebagainya.

g. Dalam penanganan konflik melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh adat.

3) Kabupaten Mamasa yang berada pada kuadran III menunjukkan bahwa Kabupaten Mamasa mempunyai kondisi sosial kemasyarakatan yang lebih baik daripada Kabupaten Rokan Hilir, tetapi lebih rendah daripada Kabupaten Rote Ndao. Hal ini terjadi karena:


b. Penduduk yang berusia 10 tahun ke atas lebih dari delapanpuluh persen bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan. Lebih dari sepuluh persen di sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan; lebih tiga persen di sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi; hampir dua persen di sektor industri; sisanya di sektor transportasi, pertambangan dan penggalian; listrik, gas dan air minum. Sektor listrik dan air minum merupakan sektor basis di Mamasa tetapi yang terlibat di sektor ini sangat sedikit hanya setengah persen saja.

c. Di bidang politik, partisipasi masyarakat sangat besar terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam Panitia Pemungutan Suara (PPS) hampir


f. Kalau ada konflik, tokoh adat atau tokoh masyarakat dilibatkan dalam penyelesaiannya.

6 Kesejahteraan masyarakat ditinjau dari sumberdaya alam dan lingkungan hidup di tiga kabupaten pemekaran

Lingkungan hidup menyediakan sumberdaya pada manusia berupa air, tumbuhan dan hewan untuk bahan pangan, pakaian, obat-obatan, bahan bangunan, peneduh dan keperluan hidup. Lebih lanjut dikatakan, Manusia mempengaruhi lingkungan dan manusia dipengaruhi lingkungan hidupnya. Demikian pula manusia dapat memberi dampak lingkungan hidupnya dan manusia dibentuk oleh lingkungan hidupnya.
Laporan Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran pada bulan Mei 1972 menyatakan: “Hanya dalam lingkungan hidup yang optimal, manusia dapat berkembang dengan baik, dan hanya dengan manusia yang baik lingkungan akan berkembang ke arah yang optimal” (Soemarwoto, 2001).

Persepsi masyarakat akan lingkungan hidupnya terlihat dari tanggapan masyarakat yang menjawab pertanyaan tentang kondisi lingkungan hidup, bencana alam dan penyebabnya, kondisi sumberdaya alam, pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah kabupaten dan pelanggaran pemanfaatan ruang. Kepedulian pemerintah kabupaten terhadap lingkungan hidup dan sumberdaya alam bergantung dari anggaran yang tersedia. Selain hal itu adalah kemauan dari pemerintah kabupaten untuk mau atau tidak mengelola lingkungan hidupnya.

Permasalahan lingkungan dapat diartikan sebagai masalah habisnya sumberdaya alam karena eksploitasi yang berlebihan yang melebihi tingkat pemulihannya, sehingga membahayakan keberlangsungan makhluk hidup. Matrik di bawah menggambarkan persepsi masyarakat terhadap lingkungan hidup dan sumberdaya alam di tiga kabupaten.

Gambar 11 Matrik hubungan persepsi masyarakat terhadap lingkungan hidup dengan persentase penduduk miskin
Persepsi masyarakat di tiga kabupaten pemekaran terhadap lingkungan hidup rata-ratanya 64,92 persen yang berarti masuk kategori ‘baik’. Persepsi masyarakat ini sangat bertentangan dengan fakta yang ada di lapangan. Ada yang salah dalam persepsi masyarakat pada lingkungan atau mungkin karena kebiasaan menghadapi lingkungan yang tidak baik, maka hal yang tidak baik tersebut menjadi hal biasa, hal yang tidak mengganggu. Sedangkan rata-rata persentase penduduk miskin di tiga kabupaten pemekaran sebesar 17,11 persen. Nilai rata-rata ini dijadikan kontrol untuk nilai persepsi masyarakat dan ternyata tidak merubah letak kuadran masing-masing kabupaten.

G. Hasil analisis silang indikator diperoleh fakta sebagai berikut.

1) Kabupaten Rokan Hilir terletak pada kuadran II yang berarti persepsi masyarakatnya terhadap kondisi lingkungan hidup adalah ‘baik’. Terjadi paradoks antara persepsi masyarakat dengan fakta di lapangan. Hal ini disebabkan karena:
   a. Ada lima pulau dan 16 sungai yang dimiliki Kabupaten Rokan Hilir.
   c. Masyarakat memandang kondisi lingkungan hidupnya masih baik, walaupun infrastruktur yang ada sudah tidak mulus lagi.
   d. Instansi yang menangani lingkungan hidup kurang berfungsi dengan baik.
   e. Tidak ada program-program mengenai lingkungan hidup.
   f. Masyarakat dan pengusaha HTI sudah biasa membakar lahannya untuk menghilangkan ilalang dan semak-semak.
   g. Kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup kurang.
   h. Pemerintah kurang serius menangani lingkungan hidup.
   i. Untuk mengatasi kebakaran lahan yang terjadi pada setiap musim, perlu dibuat peraturan daerah yang melarang pembakaran lahan.
2) Kabupaten Rote Ndao terletak pada kuadran III dengan persepsi masyarakat terhadap lingkungan hidup ‘baik’, tetapi lebih rendah dari Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Rokan Hilir. Hal itu terjadi karena:


b. Kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Rote Ndao semakin baik, terlihat dari banyaknya pohon yang telah ditanam dan dipelihara masyarakat yang diperkirakan mencapai 100 pohon per kepala keluarga. Dengan jumlah kepala keluarga yang mencapai hampir tigapuluh ribu, maka jumlah pohon tertanam diperkirakan sudah mencapai tiga juta pohon.


d. Program pembangunan “embung” dan wajib tanam dan memelihara 5 – 10 batang berdampak positif terhadap lingkungan. Manfaat “embung” dapat langsung dirasakan masyarakat ketika musim kering tiba, sedangkan manfaat penanaman dan pemeliharaan pohon akan dirasakan lima sampai sepuluh tahun kemudian, bahkan bisa lebih lama tegantung jenis pohon yang ditanam.
e. Dengan kondisi alamnya yang miskin sumberdaya alam dan beriklim kering menjadikan masyarakat Rote Ndao ulet dan tangguh serta sederhana hidupnya. Masyarakat Rote Ndao, Sabu, dan masyarakat berbudaya lontar lainnya, dikategorikan sebagai *non-eating people*, karena penduduk Rote Ndao, seperti juga Sabu, lebih banyak minum dibandingkan dengan makan. Kebiasaan ini mulai berubah apabila dilihat pada saat ini banyak rumah makan, warung makan dan di pasar banyak yang menjajakan makanan.

f. Kabupaten Rote Ndao yang terletak di ujung paling selatan di Indonesia, yang dekat dengan Australia dan berbatasan dengan Samodera Hindia, yang gersang dan tandus mulai berubah dengan adanya penghijauan dengan mewajibkan setiap kepala keluarga menanam dan memelihara 5 – 10 pohon yang telah mencapai lebih kurang 100 pohon per kepala keluarga, dan ‘embung-embung’ yang dibuat oleh pemerintah daerah yang telah mencapai 426 buah. Embung telah dibuat jauh sebelum otonomi tahun 1990, jumlah ‘embung’ saat ini mencapai yang 426 buah, sebanyak 324 buah dibangun di era bupati sekarang (Bapak Drs, LH, MM), dan pembangunan ‘embung’ terus ditambah.

g. Pulau Rote sebagai pulau terbesar dan Kecamatan Rote Timur adalah kecamatan terluas. Dengan adanya kesadaran dan kepedulian pemerintah dan warga masyarakat Rote Ndao untuk memelihara ‘embung’ dan tanaman akan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang telah baik.


i. Kesadaran masyarakat akan lingkungan hidup yang baik sangat tinggi. ‘Embung-embung’ yang telah dibangun dan pohon-pohon yang telah ditanam membuat perubahan lingkungan hidup mereka. Masyarakat
harus memelihara apa yang telah mereka lakukan untuk memperbaiki lingkungan hidupnya.

j. Kesadaran akan lingkungan hidup yang demikian itulah yang mendorong pemerintah Kabupaten Rote Ndao membangun ‘embung’ dan mewajibkan masyarakat untuk menanam dan memelihara pohon. Kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Rote Ndao lebih baik daripada sebelumnya karena ketersediaan sumberdaya air semakin baik, hutan semakin terpelihara dan tanaman semakin banyak.

k. Walaupun demikian, persepsi masyarakat akan lingkungan hidup paling rendah di antara tiga kabupaten. Mungkin hal ini dikarenakan masyarakat tidak terus puas dengan keadaan yang telah ada dan akan terus berusaha untuk memelihara lingkungan hidupnya yang sangat rentan terhadap bencana kekeringan.

3) Kabupaten Mamasa pada posisi di kuadran I, persepsi masyarakat terhadap lingkungan hidupnya ‘baik’ paling tinggi di antara ketiga kabupaten. Terjadi paradoks antara persepsi masyarakat terhadap lingkungan hidup dengan fakta di lapangan. Hal ini dipengaruhi oleh:

a. Lebih dari setengahnya wilayah Kabupaten Mamasa adalah hutan. Luas kawasan hutan lindung lebih dari tiga per empatnya luas hutan, dan hutan produksi terbatas kurang dari sepertiganya.

b. Pemerintah daerah tidak menetapkan adanya suaka alam pada awal terbentuknya Kabupaten Mamasa, yang sangat disayangkan oleh beberapa penduduk. Sehingga orang dapat memanfaatkan lahan di mana saja yang sekiranya cocok untuk keperluannya.

c. Kecamatan Pana adalah kecamatan terjauh dari Mamasa, dan yang terdekat Kecamatan Tawalian. Pada musim hujan beberapa wilayah Mamasa rawan longsor. Perambahan hutan dan penggalian yang tidak terkendali menyebabkan lahan kritis yang luas, masih dikatakan untung karena kayu-kayu yang ada tidak dibawa keluar karena akses jalan yang rusak.

d. Pemerintah pada umumnya belum dapat melaksanakan tujuan dari pembentukan daerah, yaitu mensejahterakan masyarakatnya. Sehubungan
dengan lingkungan hidup, instansi yang menanganiinya belum berfungsi dengan baik. Hal itu terlihat dari banyaknya masalah lingkungan hidup yang tidak tertangani, seperti lahan kritis, tanah rawan longsor, perambahan hutan, membuat bangunan di zona rawan bencana dan sebagainya.

e. Pemanfaatan lahan untuk sawah tergolong kecil, yang banyak adalah lahan untuk perkebunan yang mencapai lebih duakali lahan sawah. Hal tersebut disebabkan lahan yang datar sempit, sehingga menyulitkan dimanfaatkan untuk sawah.


g. Kesadaran masyarakat akan lingkungan hidup rendah, perlu ditingkatkan untuk tidak membangun rumah ataupun lainnya di lereng-lereng bukit yang terjal, apalagi di daerah yang dilarang untuk membangun. Sosialisasi rencana tata ruang (RTRW ataupun RDTR) perlu digiatkan, kalau belum ada segera dibuat untuk menjadikan pedoman dalam menata wilayah Mamasa. Sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang perlu ditegakkan.

h. Potensi wisata tersebar di Mamasa belum digali dan dipasarkan sehingga tidak dapat memberi manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat sekitar lokasi obyek wisata, dan bermanfaat bagi peningkatan PAD.

5.2 Perkembangan tiga kabupaten pemekaran dibandingkan induknya

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat dibuat suatu rangkuman perkembangan di masing-masing kabupaten pemekaran yang menjadi lokasi penelitian, meliputi pembangunan ekonomi (laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan indeks pembangunan manusia), tingkat kemiskinan, persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik sosial kemasyarakatan, dan lingkungan hidup sebagai berikut:
## Tabel 18 Perkembangan tiga kabupaten pemekaran

<table>
<thead>
<tr>
<th>Indikator kesejahteraan Masyarakat</th>
<th>Kabupaten</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Rokan Hilir</td>
</tr>
<tr>
<td>Pembangunan ekonomi:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Pertumbuhan ekonomi:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Dengan migas ada</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Cenderung menurun</td>
<td>- Cenderung</td>
</tr>
<tr>
<td>menurun dari 4,16% (2005)</td>
<td>melambat dari</td>
</tr>
<tr>
<td>7,92% (2005) menjadi 7,26% (2009)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- PDRB per kapita</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Meningkat cenderung</td>
<td>- Cenderung</td>
</tr>
<tr>
<td>menurun, Rp 37,93 juta (2005),</td>
<td>meningkat,</td>
</tr>
<tr>
<td>Rp 55,06 juta (2008), Rp 60,83</td>
<td>Rp 3,18 juta (2005),</td>
</tr>
<tr>
<td>Rp 16,63 juta (2005), Rp 21,88</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>juta (2008), Rp 25,97 juta (2009)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Selalu meningkat, 70,89 (2006),</td>
<td>Selalu meningkat,</td>
</tr>
<tr>
<td>10,26% (2009)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tingkat kemiskinan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Menurun, 77,63% menjadi</td>
<td>- Meningkat</td>
</tr>
<tr>
<td>32,19% (2009)</td>
<td>29,77% menjadi</td>
</tr>
<tr>
<td>- Menurun, 10,26% menjadi</td>
<td>68,88% (2008)</td>
</tr>
<tr>
<td>32,19% (2009)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Program pengentasan kemiskinan</td>
<td>- Sekolah, berobat,</td>
</tr>
<tr>
<td>- Menurug semua wilayah, kondisinya kurang baik</td>
<td>KTP, dan rumah :</td>
</tr>
<tr>
<td>- Menurun semua wilayah, kondisinya baik</td>
<td>gratis</td>
</tr>
<tr>
<td>Infrastruktur</td>
<td>- Menurug semua wilayah, kondisinya baik</td>
</tr>
<tr>
<td>Pelayanan publik</td>
<td>- 66,61%</td>
</tr>
<tr>
<td>Sosial kemasarayakan</td>
<td>- 59,17%</td>
</tr>
<tr>
<td>Kondisi lingkungan hidup</td>
<td>- 66,04%</td>
</tr>
<tr>
<td>Program-program untuk lingkungan hidup</td>
<td>- Tidak ada</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Selanjutnya, ketiga kabupaten pemekaran dibandingkan dengan kabupaten induknya ditinjau dari kesejahteraan masyarakatnya, yang tercermin dari PDRB per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, IPM, angka kemiskinan, pelayanan publik, PAD, dan lingkungan hidup sebagaimana bahasan sebelumnya, maka dapat ditentukan sebagai berikut, akan diperoleh nilai (+) yaitu apabila kabupaten pemekaran melebihi...
kabupaten induknya dalam hal laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan, nilai IPM. Nilai (+) juga diperoleh apabila kabupaten pemekaran mempunyai program-program pro rakyat miskin yang tujuannya adalah membantu mengentaskan atau memberdayakan masyarakat miskin, nilai (+) juga diperoleh apabila kabupaten pemekaran mempunyai program-program penanggulangan bencana alam, bencana lingkungan hidup atau program-program untuk konservasi lingkungan seperti reboisasi, penanggulangan sampah, penanggulangan longsor, penanggulangan banjir, dan sebagainya. Nilai (+) juga akan diperoleh apabila melebihi rata-rata kabupaten induknya. Nilai (-) adalah kabupaten pemekaran yang berlawanan dengan hal-hal tersebut di atas, atau penduduk miskin tidak berkurang malahan bertambah. Oleh karena itu, maka dapat dibuat dalam matrik berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Indikator</th>
<th>Kabupaten</th>
<th>Rokan Hilir</th>
<th>Rote Ndao</th>
<th>Mamasa</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Laju pertumbuhan ekonomi dibanding (rata-2) induknya</td>
<td>Lebih tinggi</td>
<td>Lebih tinggi</td>
<td>Lebih rendah</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>PDRB/kapita dibanding (rata-2) induknya</td>
<td>Lebih rendah</td>
<td>Lebih rendah (-)</td>
<td>Lebih tinggi (+)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>PDRBadhb dibanding induknya (rata-2)</td>
<td>Lebih rendah</td>
<td>Lebih rendah (-)</td>
<td>Lebih rendah (-)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>PDRBadhk dibanding induknya (rata-2)</td>
<td>Lebih rendah</td>
<td>Lebih rendah (-)</td>
<td>Lebih rendah (-)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>IPM dibanding rata-2 induknya</td>
<td>Lebih rendah</td>
<td>Lebih tinggi</td>
<td>Lebih rendah</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Penduduk miskin (%) dibanding rata-2 induknya</td>
<td>Berkurang banyak (+)</td>
<td>Berkurang (+)</td>
<td>Bertambah (-)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Program untuk masyarakat miskin</td>
<td>Ada (+)</td>
<td>Ada (+)</td>
<td>Tidak ada (-)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>PAD/APBD dibanding rata-ratanya</td>
<td>Lebih tinggi (+)</td>
<td>Lebih tinggi (+)</td>
<td>Lebih rendah (-)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Program-program penanggulangan bencana alam, bencana lingkungan hidup</td>
<td>Tidak ada program (-)</td>
<td>Banyak program (+)</td>
<td>Tidak ada program (-)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Laju pertumbuhan penduduk dibanding induknya, rata-2</td>
<td>Lebih besar (-)</td>
<td>Lebih besar (-)</td>
<td>Lebih besar (-)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Persentase pelayanan dibanding rata-ratanya</td>
<td>Lebih rendah (-)</td>
<td>Lebih besar (+)</td>
<td>Lebih besar (+)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Persentase sosial kemasyarakatan dibanding rata-ratanya</td>
<td>Lebih rendah (-)</td>
<td>Lebih rendah (+)</td>
<td>Lebih tinggi (-)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Persentase lingkungan hidup terhadap rata-ratanya</td>
<td>Lebih tinggi (+)</td>
<td>Lebih tinggi (+)</td>
<td>Lebih rendah (-)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Tabel-tabel sebelumnya (lihat Tabel 1c, 4a, 5a, 6a, 8a, 9a, 10a).
Berdasarkan Tabel 18 dan 19 memperlihatkan bahwa Kabupaten Rokan Hilir sudah mencapai kemajuan, artinya dalam penyelenggaraan pemerintahannya telah berhasil meningkatkan perekonomian, membangun manusianya dan dapat mengentaskan kemiskinan yang signifikan. Tetapi apabila dibandingkan dengan kabupaten induknya, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir masih ketinggalan, hanya beberapa indikator saja yang melebihi induknya dan infrastruktur yang ada kurang baik kondisinya.

Kabupaten Rote Ndao secara umum mengalami kemajuan dalam menyelenggarakan pemerintahannya yang telah dapat meningkatkan perekonomiannya, memperbaiki pembangunan manusianya dan dapat menurunkan persentase kemiskinan yang signifikan. Apabila dibandingkan dengan kabupaten induknya, Kabupaten Kupang memperlihatkan kemajuan yang hampir di semua indikator pembangunan ekonomi dalam mensejahterakan masyarakatnya dan infrastruktur yang menjangkau semua wilayah sehingga arus barang dan jasa dapat berjalan lancar.

Kabupaten Mamasa memang memperlihatkan kemajuan dalam pembangunan ekonominya dan pembangunan manusianya, tetapi apabila dibandingkan dengan induknya, Kabupaten Polewali Mandar masih jauh ketinggalan. Dengan infrastruktur yang rusak parah dan tidak semua kecamatan dapat diakses dengan mudah, apalagi ke desa-desa menyebabkan perekonomiannya tidak lancar, arus barang dan jasa terkendala infrastruktur yang ada.

Jadi Kabupaten Rote Ndao merupakan daerah yang paling berhasil dalam menyelenggarakan pemerintahannya, karena dapat mengurangi kemiskinan secara signifikan, mendapat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Perkembangannya melebihi Kabupaten Kupang sebagai induknya hampir di semua indikator. dapat dipertahankan keberlanjutannya. Kabupaten Rokan Hilir dapat dikatakan kurang berhasil menyelenggarakan pemerintahannya karena kemajuan yang dicapai masih lebih rendah dari Kabupaten Bengkalis sebagai induknya, walaupun telah mampu mengentaskan kemiskinan dan dapat mensejahterakannya, sehingga keberlanjutannya perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan dari pusat. Sedangkan Kabupaten Mamasa memperlihatkan ketidakberhasilannya dalam menyelenggarakan pemerintahannya karena kemiskinan bertambah, infrastruktur yang ada tidak
bertambah baik dan semua indikator pembangunan ekonomi lebih rendah daripada Kabupaten Polewali Mandar sebagai induknya. Perlu ditingkat kembali dan dibina atau digabung kembali dengan induknya apabila di akhir pembinaan tidak ada perkembangannya.

5.3 Mengkontruk teoritik untuk kebijakan perkembangan wilayah

Teori mesin pertumbuhan (Growth Machine Theory) dari Molotch (1976) pada intinya adalah suatu daerah atau wilayah dapat berkembang dengan baik apabila didorong oleh birokrasi yang kuat dan baik sebagai mesin pertumbuhannya. Sedangkan Christaller dengan teorinya ‘central place theory’ pada intinya adalah suatu daerah atau wilayah dapat berkembang dengan baik apabila daerah atau wilayah tersebut mempunyai perencanaan wilayah yang baik sesuai dengan fungsi-fungsi spasial apabila birokrasi atau pemerintah atau organisasi pemerintahannya kuat, berjalan efektif, efisien dan mempunyai kerangka yang jelas dalam perencanaan wilayahnya.

Dengan demikian, maka dapat diajukan sebuah refleksi teoritik sebagai berikut:

1) Suatu daerah atau wilayah seperti apapun keadaannya, misalkan daerah atau wilayah yang miskin akan sumberdaya alam dan rendah kualitas sumberdaya manusianya, tetapi karena mempunyai birokrasi pemerintahan yang kuat, pemerintahannya berjalan efektif, efisien dan mempunyai perencanaan wilayah sesuai dengan fungsi-fungsi spasial yang jelas dapat berkembang dengan baik sebagaimana dicerminkan oleh Kabupaten Rote Ndao. Jadi setuju dengan teori mesin pertumbuhan (Growth Machine Theory) Molotch (1976) dan teori lokasi pusat (Central Place Theory) Christaller, karena Kabupaten Rote Ndao yang tandus dan miskin akan sumberdaya alam, dan kualitas penduduknya yang pada umumnya berpendidikan setingkat sekolah dasar tetapi karena birokrasinya kuat yang tercermin dari legitimasi kepemimpinan Bupati sangat tinggi, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berjalan dengan efektif dan efisien yang terlihat dari keberhasilan program-program pengentasan kemiskinan dan lingkungan hidup serta secara spasial infrastruktur yang ada memadai terlihat dari jalan-jalan yang menghubungkan antar kecamatan maupun antar desa yang cukup mulus,
maka Kabupaten Rote Ndao dapat berkembang dengan baik melebihi kabupaten induknya.

Artinya, organisasi pemerintah atau birokrasi pemerintah, sistem spasial dan legitimasi akan menentukan sukses tidaknya atau survival atau tidaknya keberadaan daerah otonom baru. Birokrasi dan sistem yang baik akan menjamin keberlanjutan suatu daerah otonom baru.

2) Teori mesin pertumbuhan Molotch dan teori lokasi pusat Christaller tidak dapat bekerja dengan baik apabila birokrasi pemerintah daerah tidak kuat sebagai mesin penggerak pertumbuhan dan tidak ada perencanaan wilayahnya secara spasial yang jelas, walaupun daerah memiliki kekayaan sumberdaya alam yang melimpah dan sumberdaya manusia yang memadai. Hal itu tercermin di Kabupaten Rokan Hilir yang kaya akan sumberdaya alam, mempunyai sumberdaya manusia yang baik dilihat dari IPM yang tinggi dan angka kemiskinan rendah, tetapi perkembangannya masih ketinggalan dari Kabupaten Bengkalis sebagai induknya. Hal ini disebabkan karena birokrasi pemerintah sebagai mesin pertumbuhannya tidak bekerja maksimal, terlihat dari aparaturnya dalam melaksanakan tugas yang kurang profesional, walaupun kepemimpinan daerah sangat inovatif. Fungsi spasial wilayah kurang mendukung kinerja birokrasi karena infrastruktur yang ada tidak mulus.

Untuk dapat menerapkan teori-teori tersebut, diperlukan teori lain yang dapat mendukungnya seperti teori *path-goal* untuk menggerakkan mesin birokrasi yaitu pemimpin berusaha membuat jalan kecil (*path*) untuk pencapaian tujuan-tujuan (*goals*) para bawahan sebaik mungkin dengan gaya yang paling sesuai terhadap variabel-variabel lingkungan yang ada (Thoha, 2002). Jadi daerah yang mempunyai kelimpahan sumberdaya alam yang besar, mempunyai sistem yang bagus dan kepemimpinan daerah yang inovatif ternyata kurang survive karena mesin birokrasi kurang efektif, seperti terlihat dari perilaku aparatnya yang kurang profesional dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka daerah kurang berkembang dengan baik. Jadi sistem organisasi birokrasi menentukan keberlanjutan daerah otonom selain sumberdaya alam.
3) Teori mesin tertumbuhan Molotch dan teori lokasi pusat Christaller tidak dapat bekerja apabila birokrasi pemerintahan tidak bekerja dengan baik, terjadi bad governance dan secara spasial terisolir, walaupun daerah tersebut kaya akan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang berkualitas. Hal ini tercermin pada Kabupaten Mamasa yang memiliki sumberdaya alam yang cukup tetapi daerannya terisolir dan mempunyai kondisi spasial yang tidak menguntungkan sehingga menjadi penghalang nyata dalam perkembangan daerah ditambah dengan adanya bad governance, maka daerah tidak dapat survive. Jadi sistem birokrasi sangat menentukan selain sumberdaya alam untuk keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom.

4) Jadi dengan ini dapat disimpulkan bahwa, untuk bekerjanya teori mesin pertumbuhan (Growth Machine Theory) dari Molotch dan teori lokasi pusat dari Christaller diperlukan adanya pra kondisi untuk bekerjanya. Seperti birokrasi atau pemerintahan yang kuat dan fungsi-fungsi spasial dari infrastuktur yang ada. Peran organisasi pemerintah atau birokrasi sangat menentukan di dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan karena tidak semua interaksi sosial ekonomi dan sosial dapat dikelola dengan cara altruisme, anarkhi atau mekanisme pasar (Rachbini, 2006).


Jadi pembangunan sektoral yang selama ini dilakukan sebaiknya ditinggalkan dan dilakukan pembangunan yang berimbang dan berwawasan wilayah. Apalagi kewenangan pemerintah daerah sangat luas dalam mengelola potensi di wilayahnya dan dapat menerapkan pembangunan berimbang dan berwawasan kewilayahan.

### 5.4 Ikhtisar

Modifikasi Klassen tipologi mempunyai kelebihan yaitu dapat mengetahui jarak masing-masing kabupaten dan dapat diterapkan pada semua indikator yang diperlukan. Dengan Klassen tipology yang dimodifikasi, Kabupaten Rokan Hilir masuk pada klasifikasi “daerah maju tetapi tertekan”, Kabupaten Rote Ndao masuk dalam klasifikasi “daerah relatif tertinggal”, sedangkan Kabupaten Mamasa masuk klasifikasi “daerah berkembang cepat”.

pengolahan non migas. Kabupaten Mamasa sebagai ‘daerah cepat berkembang’.
Perekonomiannya menyebar dan berimbang di semua sektor, utamanya di sektor pertanian. Mamasa tidak mempunyai sektor ekonomi yang berdaya saing. Sektor basis perekonomiannya di sektor pertanian utamanya sub sektor perkebunan kopi. Infrastruktur di Mamasa sangat memprihatinkan sehingga menghambat arus barang dan jasa. Sektor yang paling maju adalah sektor pertanian, utamanya perkebunan yang juga merupakan sektor basis.

Pembangunan manusia di Kabupaten Rokan Hilir paling tinggi dan dengan pendapatan per kapita yang melebihi nasional serta penduduk miskin yang relatif rendah, maka Kabupaten Rokan Hilir berhasil membangun manusianya dan sekaligus mengurangi penduduk miskin. Kabupaten Rote Ndao mempunyai IPM dan pendapatan per kapita yang paling rendah, tetapi Kabupaten Rote Ndao paling banyak program-program yang pro-rakyat dan pengentasan kemiskinan. Sedangkan Kabupaten Mamasa yang mempunyai penduduk miskin besar tidak mempunyai program-program pengentasan kemiskinan. Kabupaten Rokan Hilir yang mempunyai penduduk miskin rendah mempunyai program-program pengentasan kemiskinan.


Teori mesin pertumbuhan (Growth Machine Theory) Molotch dan teori lokasi pusat Christaller dapat berlaku penuh di Kabupaten Rote Ndao. Di Kabupaten Rokan Hilir kedua teori dapat berlaku apabila didukung oleh teori path-goal. Untuk di Kabupaten Mamasa kedua teori tidak berlaku karena tidak didukung oleh sistem birokrasi dan fungsi spasial yang memadai.
BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

1. Kesejahteraan masyarakat di tiga kabupaten pemekaran:
   a. Berdasarkan Klassen Typology yang dimodifikasi, Kabupaten Rokan Hilir adalah kabupaten pemekaran yang “daerah maju tetapi tertekan”, Kabupaten Rote Ndao yang merupakan “daerah relatif tertinggal”, dan Kabupaten Mamasa sebagai daerah pemekaran yang “daerah berkembang cepat”.
   c. Kabupaten Rokan Hilir memiliki IPM tinggi dan persentase penduduk miskin relatifcil. Kategori ini adalah kondisi yang ideal, karena mampu menekan angka kemiskinan dan sekaligus dapat meraih capaian pembangunan manusia yang tinggi. Kabupaten Rote Ndao dengan IPM rendah dan persentase penduduk miskin tinggi, meskipun dalam empat


f. Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Rokan Hilir dengan iklim tropis dan curah hujan rata-rata 277,94 mm/tahun (2009), temperatur udara berkisar antara 26° – 32° C. Musim kemarau umumnya terjadi pada bulan Februari sampai dengan Agustus, sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan September sampai Januari dengan jumlah hari hujan rata-rata 52 hari. Tidak ada program untuk menanggulangi bencana lingkungan hidup seperti kebakaran lahan yang sering terjadi. Kesadaran masyarakat akan lingkungan dup rendah dan pemerintah daerah kurang serius menanganinya.

Kabupaten Mamasa yang terletak di pegunungan dapat dikatakan sebagai wilayah yang terisolir karena akses ke Mamasa hanya ada satu jalan dengan kondisi sempit, menanjak, berkelok-kelok dan rusak. Berhawa dingin, dan lebih dari setengah wilayahnya hutan. Apabila hujan, sering terjadi longsor, apalagi hutan banyak yang rusak. Tidak ada program-program penanggulangan lingkungan dan kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap lingkungan hidup kurang.


6.2 Saran

1. Kabupaten Rokan Hilir dan pendukung utama perekonomiannya adalah sektor pertambangan dan penggalian yang berkontribusi terhadap PDRBAdhk kecenderungannya menurun, maka untuk dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya melalui sektor basis: pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang berkontribusi selalu meningkat setiap tahunnya. Untuk mengendalikan pendatang emang tidak mudah, oleh karena itu untuk dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut, lapangan pekerjaan harus diperbanyak dan diperluas, investor undang untuk mengolah hasil perkebunan rakyat kelapa sawit yang melimpah dielay Rokan Hilir.

2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rote Ndao masih bisa ditingkatkan dari sektor jasa (sektor basis) yang setiap tahunnya meningkat, dengan cara mempromosikan wisata pantai yang telah dikenal melalui internet dan jejaring lainnya. Sektor industri terutama industri rumah tangga (kerajinan tangan dan produk lainnya) perlu digalakkan dan bentuk koperasi untuk menampung dan membantu memasarkan produknya. Walaupun sektor pertanian, terutama sub sektor peternakan dan perikanan sebagai sektor bahan perlu didorong sehingga tidak terus melambat. Keluarga berencana tetap harus digalakkan, sehingga pertumbuhan penduduknya tetap lebih rendah dari pertumbuhan ekonominya.

3. Kabupaten Mamasa untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dapat dilakukan dengan mendorong sektor basis terutama perkebunan dengan megolah hasil kebun (kopi) di wilayah Mamasa, sehingga dapat menimbulkan **multiplexer effect**. Potensi wisata yang banyak dan luar biasa dapat didorong dengan membangun akses jalan yang memadai.

4. Program kesehatan gratis bagi masyarakat miskin di Kabupaten Rote Ndao perlu diperluas dengan pemberian gizi makanan tambahan untuk anak sekolah sehingga dapat mengurangi persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, karena menurut perhitungan BPS (2009), berpengaruh negatif terhadap IPM. Artinya semakin tinggi persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan angka kesakitan di suatu provinsi menyebabkan IPM provinsi itu justru semakin rendah. Selain itu, program TU’U untuk pendidikan diperluas tidak hanya untuk sekolah tingkat dasar saja, tetapi untuk anak-anak yang cerdas bisa sampai perguruan tinggi. Sektor informal seperti kerajinan
169

lontar, tenun ikat dan sebagainya perlu diperkuat dengan memberikan wadah koperasi dan bantuan modal.

5. Untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rote Ndao, selain menggerakkan sektor informal, juga dapat melalui pemberian bantuan bibit ternak pada masyarakat (sistem bagi hasil), dan bantuan modal untuk nelayan. Dengan luasnya padang pengembalaan dan lautan, maka akan dapat menunjang program tersebut.

6. Pelayanan publik merupakan tujuan dari pembentukan daerah otonom, oleh karena itu di kabupaten pemekaran perlu segera dibuat SOP (standard operating procedure) pelayanan dalam peraturan bupati dan disosialisasikan di tempat-tempat pelayanan publik hingga masyarakat mengetahui dan memahaminya.

7. Forum komunikasi budaya yang anggotanya tokoh adat dan tokoh masyarakat diperkuat dengan rekuitmen anggota yang mengakar di masyarakat, sehingga berwibawa dan dapat berperan dengan baik dalam menghidupkan budaya lokal dan dapat membantu meredam jolak di masyarakat.


10. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; serta tingkat efisiensi, efektivitas dan kemandirian kabupaten pemekaran.
DAFTAR PUSTAKA


Lampiran 1. Pertumbuhan Ekonomi, PDRB/kapita 114 Kabupaten Pemekaran
Tabel 1a Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Daerah Pemekaran dibandingkan Kabupaten Induknya Tahun 2005

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Kabupaten Pemekaran</th>
<th>Pertumb. Ekonomi (%)</th>
<th>Kabupaten Induknya</th>
<th>Pertumb. Ekon (%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Aceh Jaya</td>
<td>-33,87</td>
<td>Aceh Barat</td>
<td>-13,15</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Nagan Raya</td>
<td>-3,89</td>
<td>Aceh Barat</td>
<td>-13,15</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Simeuleu</td>
<td>0,64</td>
<td>Aceh Barat</td>
<td>-13,15</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Aceh Barat Daya</td>
<td>2,75</td>
<td>Aceh Selatan</td>
<td>3,76</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Aceh Singkil</td>
<td>3,70</td>
<td>Aceh Selatan</td>
<td>3,76</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Bener Meriah</td>
<td>2,58</td>
<td>Aceh Tengah</td>
<td>5,20</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Gayo Luess</td>
<td>4,24</td>
<td>Aceh Tenggara</td>
<td>-0,17</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Aceh Tamiang</td>
<td>5,97</td>
<td>Aceh Timur</td>
<td>4,87</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Bireun</td>
<td>3,39</td>
<td>Aceh Utara</td>
<td>-5,43</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Banggai Kepulauan</td>
<td>7,51</td>
<td>Banggai</td>
<td>7,18</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Bangka Barat</td>
<td>5,98</td>
<td>Bangka</td>
<td>5,92</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Bangka Selatan</td>
<td>5,05</td>
<td>Bangka</td>
<td>5,92</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Bangka Tengah</td>
<td>5,55</td>
<td>Bangka</td>
<td>5,92</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Barito Timur</td>
<td>4,87</td>
<td>Barito Selatan</td>
<td>5,12</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Murung Raya</td>
<td>2,33</td>
<td>Barito Utara</td>
<td>3,90</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Muaro Jambi</td>
<td>5,39</td>
<td>Batanghari</td>
<td>6,18</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Belitung Timur</td>
<td>5,65</td>
<td>Belitung</td>
<td>4,81</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Rokan Hilir</td>
<td>7,92</td>
<td>Bengkalis</td>
<td>7,40</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Siak</td>
<td>6,88</td>
<td>Bengkalis</td>
<td>7,40</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Kaur</td>
<td>5,71</td>
<td>Bengkulu Selatan</td>
<td>5,38</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Seluma</td>
<td>6,14</td>
<td>Bengkulu Selatan</td>
<td>5,38</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Muko-Muko</td>
<td>5,58</td>
<td>Bengkulu Utara</td>
<td>5,65</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Supiori</td>
<td>8,24</td>
<td>Biak Numfor</td>
<td>6,77</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Karimun</td>
<td>5,61</td>
<td>Bintan</td>
<td>19,01</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Lingga</td>
<td>6,05</td>
<td>Bintan</td>
<td>19,01</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Natuna</td>
<td>5,88</td>
<td>Bintan</td>
<td>19,01</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Malinau</td>
<td>3,44</td>
<td>Bulungan</td>
<td>15,14</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Nunukan</td>
<td>16,89</td>
<td>Bulungan</td>
<td>15,14</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Tebo</td>
<td>4,74</td>
<td>Bungo</td>
<td>5,39</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Bombana</td>
<td>6,81</td>
<td>Buton</td>
<td>7,80</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Watubali</td>
<td>7,88</td>
<td>Buton</td>
<td>7,80</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Pak-Pak Bharat</td>
<td>5,92</td>
<td>Dairi</td>
<td>5,34</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>Serdang Bedagai</td>
<td>5,91</td>
<td>Deli Serdang</td>
<td>4,88</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>Parigi Moutong</td>
<td>7,40</td>
<td>Donggala</td>
<td>7,20</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>Kaimana</td>
<td>6,63</td>
<td>Fak-Fak</td>
<td>6,38</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>Mimika</td>
<td>58,58</td>
<td>Fak-Fak</td>
<td>6,38</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>Lembata</td>
<td>2,23</td>
<td>Flores Timur</td>
<td>2,98</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>Boalemo</td>
<td>6,28</td>
<td>Gorontalo</td>
<td>7,06</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Bone Bolango</td>
<td>5,09</td>
<td>Gorontalo</td>
<td>7,06</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>Pohuwato</td>
<td>7,24</td>
<td>Gorontalo</td>
<td>7,06</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-----------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>-------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>Halmahera Selatan</td>
<td>4,25</td>
<td>Halmahera Barat</td>
<td>2,65</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>Halmahera Barat</td>
<td>2,65</td>
<td>Halmahera Timur</td>
<td>5,55</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>Halmahera Barat</td>
<td>2,65</td>
<td>Balangan</td>
<td>5,11</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>Halmahera Utara</td>
<td>3,54</td>
<td>Halmahera Barat</td>
<td>2,65</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>Halmahera Utara</td>
<td>3,54</td>
<td>Prokak Jaya</td>
<td>6,27</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>Halmahera Utara</td>
<td>3,54</td>
<td>Tabin</td>
<td>6,31</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>Halmahera Utara</td>
<td>3,54</td>
<td>Yohukimo</td>
<td>6,40</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>Halmahera Utara</td>
<td>3,54</td>
<td>Pululawan</td>
<td>7,11</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>Halmahera Utara</td>
<td>3,54</td>
<td>Hulu Hulu</td>
<td>7,38</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>Halmahera Utara</td>
<td>3,54</td>
<td>Gugung Mas</td>
<td>4,96</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>Halmahera Utara</td>
<td>3,54</td>
<td>Pulung Pisau</td>
<td>4,48</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>Halmahera Utara</td>
<td>3,54</td>
<td>Kapuluan Talaud</td>
<td>4,85</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>Halmahera Utara</td>
<td>3,54</td>
<td>Kolaka</td>
<td>6,77</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>Halmahera Utara</td>
<td>3,54</td>
<td>Kolawe Selatan</td>
<td>6,76</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>Halmahera Utara</td>
<td>3,54</td>
<td>Tempah Bumbu</td>
<td>7,82</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>Halmahera Utara</td>
<td>3,54</td>
<td>Lamandau</td>
<td>5,83</td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>Halmahera Utara</td>
<td>3,54</td>
<td>Sawamara</td>
<td>4,90</td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>Halmahera Utara</td>
<td>3,54</td>
<td>Kotawaringin Barat</td>
<td>5,38</td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td>Halmahera Utara</td>
<td>3,54</td>
<td>Konawe</td>
<td>6,76</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>Halmahera Utara</td>
<td>3,54</td>
<td>Kotabaru</td>
<td>7,82</td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td>Halmahera Utara</td>
<td>3,54</td>
<td>Konawe</td>
<td>6,76</td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>Halmahera Utara</td>
<td>3,54</td>
<td>Lampung Timur</td>
<td>4,57</td>
</tr>
<tr>
<td>63</td>
<td>Halmahera Utara</td>
<td>3,54</td>
<td>Way Kanan</td>
<td>4,08</td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td>Halmahera Utara</td>
<td>3,54</td>
<td>Luwu Utara</td>
<td>8,69</td>
</tr>
<tr>
<td>65</td>
<td>Halmahera Utara</td>
<td>3,54</td>
<td>Luwu Timur</td>
<td>5,57</td>
</tr>
<tr>
<td>66</td>
<td>Halmahera Utara</td>
<td>3,54</td>
<td>Buru</td>
<td>3,60</td>
</tr>
<tr>
<td>67</td>
<td>Halmahera Utara</td>
<td>3,54</td>
<td>Seram Bagian Barat</td>
<td>4,68</td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
<td>Halmahera Utara</td>
<td>3,54</td>
<td>Seram Bagian Timur</td>
<td>5,48</td>
</tr>
<tr>
<td>69</td>
<td>Halmahera Utara</td>
<td>3,54</td>
<td>Kapuluan Aru</td>
<td>7,92</td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>Halmahera Utara</td>
<td>3,54</td>
<td>Maluku Tenggara Barat</td>
<td>3,74</td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
<td>Halmahera Utara</td>
<td>3,54</td>
<td>Maluku Tenggara</td>
<td>5,90</td>
</tr>
<tr>
<td>72</td>
<td>Halmahera Utara</td>
<td>3,54</td>
<td>Manggarai Barat</td>
<td>3,07</td>
</tr>
<tr>
<td>73</td>
<td>Halmahera Utara</td>
<td>3,54</td>
<td>Maluku Tenggarai</td>
<td>6,50</td>
</tr>
<tr>
<td>74</td>
<td>Halmahera Utara</td>
<td>3,54</td>
<td>Maluku Wondama</td>
<td>7,40</td>
</tr>
<tr>
<td>75</td>
<td>Halmahera Utara</td>
<td>3,54</td>
<td>Minahasa Selatan</td>
<td>3,31</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Lanjutan Tabel 1a*
Lanjutan Tabel 1a

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Kabupaten Pemekaran</th>
<th>PDRB/kapita (ribu)</th>
<th>Kabupaten Induknya</th>
<th>PDRB/kapita (ribu)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>85</td>
<td>Minahasa Utara</td>
<td>4,70</td>
<td>Minahasa</td>
<td>4,49</td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td>Banyuasin</td>
<td>5,16</td>
<td>Musi Banyuasin</td>
<td>8,04</td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>Panai</td>
<td>8,15</td>
<td>Nabire</td>
<td>5,58</td>
</tr>
<tr>
<td>88</td>
<td>Nias Selatan</td>
<td>-2,12</td>
<td>Nias</td>
<td>-3,33</td>
</tr>
<tr>
<td>89</td>
<td>Ogan Ilir</td>
<td>4,70</td>
<td>Ogan Komering Ilir</td>
<td>5,62</td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>OKU Selatan</td>
<td>4,72</td>
<td>OKUlu</td>
<td>5,19</td>
</tr>
<tr>
<td>91</td>
<td>OKU Timur</td>
<td>5,72</td>
<td>OKUlu</td>
<td>5,19</td>
</tr>
<tr>
<td>92</td>
<td>Kepulauan Mentawai</td>
<td>3,38</td>
<td>Padang Pariaman</td>
<td>9,96</td>
</tr>
<tr>
<td>93</td>
<td>Pasaman Barat</td>
<td>6,54</td>
<td>Pasaman</td>
<td>5,61</td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>Penajam Paser Utara</td>
<td>6,18</td>
<td>Pasir</td>
<td>7,82</td>
</tr>
<tr>
<td>95</td>
<td>Mamasa</td>
<td>3,83</td>
<td>Polmas</td>
<td>3,78</td>
</tr>
<tr>
<td>96</td>
<td>Landak</td>
<td>3,72</td>
<td>Pontianak</td>
<td>4,13</td>
</tr>
<tr>
<td>97</td>
<td>Morowali</td>
<td>7,22</td>
<td>Poiso</td>
<td>7,59</td>
</tr>
<tr>
<td>98</td>
<td>Tujo Una-Una</td>
<td>6,83</td>
<td>Poiso</td>
<td>7,59</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>Kepahiang</td>
<td>5,90</td>
<td>Rejang Lebong</td>
<td>6,98</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>Bengkayang</td>
<td>5,47</td>
<td>Rejang Lebong</td>
<td>6,98</td>
</tr>
<tr>
<td>101</td>
<td>Sekadau</td>
<td>9,07</td>
<td>Sambas</td>
<td>5,76</td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td>Sarolangun</td>
<td>5,68</td>
<td>Sintang</td>
<td>3,94</td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td>Aceh Jaya</td>
<td>5,91</td>
<td>Aceh Barat</td>
<td>8,76</td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td>Nagan Raya</td>
<td>10,17</td>
<td>Aceh Barat</td>
<td>8,76</td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td>Simeuleu</td>
<td>3,26</td>
<td>Aceh Barat</td>
<td>8,76</td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>Aceh Barat Daya</td>
<td>6,72</td>
<td>Aceh Selatan</td>
<td>7,89</td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td>Aceh Singkil</td>
<td>4,99</td>
<td>Aceh Selatan</td>
<td>7,89</td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td>Bener Meriah</td>
<td>7,13</td>
<td>Aceh Tengah</td>
<td>7,39</td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td>Gayo Lues</td>
<td>5,69</td>
<td>Aceh Tenggara</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>110</td>
<td>Waropen</td>
<td>5,79</td>
<td>Aceh Timur</td>
<td>6,08</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Yulistiani, dkk (2007)

Tabel 1b PDRB per Kapita Kabupaten Daerah Pemekaran dibandingkan Kabupaten Induknya Tahun 2005
<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Kabupaten/Kota</th>
<th>Penduduk (ibu kota)</th>
<th>Kabupaten/Kota</th>
<th>Penduduk (ibu kota)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>9</td>
<td>Bireun</td>
<td>7,24</td>
<td>Aceh Utara</td>
<td>6,13</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Banggai Kepulauan</td>
<td>4,49</td>
<td>Banggai</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Bangka Barat</td>
<td>25,92</td>
<td>Bangka</td>
<td>10,76</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Bangka Selatan</td>
<td>11,65</td>
<td>Bangka</td>
<td>10,76</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Bangka Tengah</td>
<td>15,09</td>
<td>Bangka</td>
<td>10,76</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Barito Timur</td>
<td>8,93</td>
<td>Barito Selatan</td>
<td>9,51</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Murung Raya</td>
<td>15,04</td>
<td>Barito Utara</td>
<td>10,43</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Muaro Jambi</td>
<td>4,50</td>
<td>Batanghari</td>
<td>6,90</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Belitung Timur</td>
<td>12,33</td>
<td>Belitung</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Rokan Hilir</td>
<td>14,82</td>
<td>Bengkalis</td>
<td>12,71</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Sinai</td>
<td>27,32</td>
<td>Bengkalis</td>
<td>12,71</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Kepulauan Banggai</td>
<td>3,06</td>
<td>Bengkulu Selatan</td>
<td>5,17</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Seluma</td>
<td>2,54</td>
<td>Bengkulu Selatan</td>
<td>5,17</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Muara-Moko</td>
<td>5,40</td>
<td>Bengkulu Utara</td>
<td>4,12</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Supiori</td>
<td>6,98</td>
<td>Biak Numfor</td>
<td>8,1</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Kaimun</td>
<td>11,81</td>
<td>Bintan</td>
<td>19,32</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Lintau</td>
<td>7,40</td>
<td>Bintan</td>
<td>19,32</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Nagan</td>
<td>12,07</td>
<td>Bintan</td>
<td>19,32</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Malau</td>
<td>14,86</td>
<td>Bulungan</td>
<td>12,29</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Namakan</td>
<td>8,85</td>
<td>Bulungan</td>
<td>12,29</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Telabo</td>
<td>4,68</td>
<td>Bungo</td>
<td>5,61</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Boe-bana</td>
<td>4,69</td>
<td>Buton</td>
<td>3,19</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Wairatobi</td>
<td>3,74</td>
<td>Buton</td>
<td>3,19</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Puncak Pak Bharat</td>
<td>4,98</td>
<td>Dairi</td>
<td>8,33</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>Sei Lang Bedagai</td>
<td>8,55</td>
<td>Deli Serdang</td>
<td>16,75</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>Parigi Moutong</td>
<td>8,09</td>
<td>Donggala</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>Kaimana</td>
<td>10,40</td>
<td>Fak-Fak</td>
<td>13,00</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>Mimika</td>
<td>213,16</td>
<td>Fak-Fak</td>
<td>13,00</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>Lembata</td>
<td>1,68</td>
<td>Flores Timur</td>
<td>2,94</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>Boalemo</td>
<td>3,54</td>
<td>Gorontalo</td>
<td>2,81</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Bonebolango</td>
<td>3,42</td>
<td>Gorontalo</td>
<td>2,81</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>Pohuwato</td>
<td>4,31</td>
<td>Gorontalo</td>
<td>2,81</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>Halmahera Selatan</td>
<td>3,12</td>
<td>Halmahera Barat</td>
<td>2,22</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>Halmahera Utara</td>
<td>2,07</td>
<td>Halmahera Barat</td>
<td>2,22</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>Kepulauan Sula</td>
<td>2,45</td>
<td>Halmahera Barat</td>
<td>2,22</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>Halmahera Timur</td>
<td>3,73</td>
<td>Halmahera Tengah</td>
<td>5,37</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>Belungan</td>
<td>15,53</td>
<td>Hulu Sungai Utara</td>
<td>4,16</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>Kepulauan Singingi</td>
<td>19,47</td>
<td>Indragiri Hulu</td>
<td>18,30</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>Kepulauan Torom</td>
<td>8,39</td>
<td>Jayapura</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>Saini</td>
<td>-</td>
<td>Jayapura</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>Kecamatan Bintang</td>
<td>1,85</td>
<td>Jayawijaya</td>
<td>3,51</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>Kepulauan Bintang</td>
<td>3,76</td>
<td>Jayawijaya</td>
<td>3,51</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>Toepa</td>
<td>6,83</td>
<td>Jayawijaya</td>
<td>3,51</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>Yowukimo</td>
<td>-</td>
<td>Jayawijaya</td>
<td>3,51</td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>Kabupaten/Kota</td>
<td>Luas (Km²)</td>
<td>Kabupaten/Kota</td>
<td>Luas (Km²)</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>----------------------</td>
<td>------------</td>
<td>----------------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>Pelalawan</td>
<td>26,89</td>
<td>Kampar</td>
<td>10,79</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>Rokan Hulu</td>
<td>12,06</td>
<td>Kampar</td>
<td>10,79</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>Gunung Mas</td>
<td>9,44</td>
<td>Kapuas</td>
<td>7,18</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>Pulung Pisau</td>
<td>6,40</td>
<td>Kapuas</td>
<td>7,18</td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>Kepulauan Talaud</td>
<td>5,39</td>
<td>Kep. Sangihe Talaud</td>
<td>5,14</td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>Kolaka Utara</td>
<td>8,98</td>
<td>Kolaka</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td>Konawe Selatan</td>
<td>4,78</td>
<td>Konawe</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>Tanah Bumbu</td>
<td>15,35</td>
<td>Kotawaringin Barat</td>
<td>12,95</td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td>Lamandau</td>
<td>11,38</td>
<td>Kotawaringin Timur</td>
<td>12,29</td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>Sukamara</td>
<td>18,75</td>
<td>Kotawaringin Timur</td>
<td>12,29</td>
</tr>
<tr>
<td>63</td>
<td>Seruyan</td>
<td>11,22</td>
<td>Kotawaringin Timur</td>
<td>12,29</td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td>Rote Ndao</td>
<td>2,43</td>
<td>Kupang</td>
<td>6,25</td>
</tr>
<tr>
<td>65</td>
<td>Kutai Barat</td>
<td>19,91</td>
<td>Kutai</td>
<td>22,17</td>
</tr>
<tr>
<td>66</td>
<td>Kutai Timur</td>
<td>52,60</td>
<td>Kutai</td>
<td>22,17</td>
</tr>
<tr>
<td>67</td>
<td>Lampung Timur</td>
<td>4,79</td>
<td>Lampung Tengah</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
<td>Way Kanan</td>
<td>-</td>
<td>Lampung Utara</td>
<td>6,16</td>
</tr>
<tr>
<td>69</td>
<td>Luwu Utara</td>
<td>4,97</td>
<td>Luwu</td>
<td>5,60</td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>Luwu Timur</td>
<td>23,77</td>
<td>Luwu Utara</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
<td>Buru</td>
<td>2,54</td>
<td>Maluku Tengah</td>
<td>1,89</td>
</tr>
<tr>
<td>72</td>
<td>Seram Bagian Barat</td>
<td>2,31</td>
<td>Maluku Tengah</td>
<td>1,89</td>
</tr>
<tr>
<td>73</td>
<td>Seram Bagian Timur</td>
<td>1,44</td>
<td>Maluku Tengah</td>
<td>1,89</td>
</tr>
<tr>
<td>74</td>
<td>Kepulauan Aru</td>
<td>3,24</td>
<td>Maluku Tenggara</td>
<td>2,81</td>
</tr>
<tr>
<td>75</td>
<td>Maluku Tenggara Barat</td>
<td>3,35</td>
<td>Maluku Tenggara</td>
<td>2,81</td>
</tr>
<tr>
<td>76</td>
<td>Mamuju Utara</td>
<td>5,91</td>
<td>Mamuju</td>
<td>4,47</td>
</tr>
<tr>
<td>77</td>
<td>Manggarai Barat</td>
<td>2,46</td>
<td>Manggarai</td>
<td>2,12</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>Teluk Bintuni</td>
<td>-</td>
<td>Manokwari</td>
<td>7,61</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>Teluk Wondama</td>
<td>-</td>
<td>Manokwari</td>
<td>7,61</td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td>Asmat</td>
<td>-</td>
<td>Merauke</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>Boven Digul</td>
<td>11,47</td>
<td>Merauke</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>Mappi</td>
<td>2,94</td>
<td>Merauke</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>Minahasa Selatan</td>
<td>7,38</td>
<td>Minahasa</td>
<td>7,61</td>
</tr>
<tr>
<td>84</td>
<td>Minahasa Utara</td>
<td>8,66</td>
<td>Minahasa</td>
<td>7,61</td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td>Banyuasin</td>
<td>5,63</td>
<td>Musi Banyuasin</td>
<td>10,72</td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td>Paniai</td>
<td>2,58</td>
<td>Nabire</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>Nias Selatan</td>
<td>5,24</td>
<td>Nias</td>
<td>5,46</td>
</tr>
<tr>
<td>88</td>
<td>Ogan Ilir</td>
<td>5,35</td>
<td>Ogan Komering Ilir</td>
<td>5,37</td>
</tr>
<tr>
<td>89</td>
<td>OKU Selatan</td>
<td>4,34</td>
<td>Ogan Komering Ulu</td>
<td>8,23</td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>OKU Timur</td>
<td>4,54</td>
<td>Ogan Komering Ulu</td>
<td>8,23</td>
</tr>
<tr>
<td>91</td>
<td>Kepulauan Mentawai</td>
<td>10,27</td>
<td>Padang Pariaman</td>
<td>7,82</td>
</tr>
<tr>
<td>92</td>
<td>Pasaman Barat</td>
<td>9,08</td>
<td>Pasaman</td>
<td>6,38</td>
</tr>
<tr>
<td>93</td>
<td>Penajam Paser Utara</td>
<td>7,98</td>
<td>Pasir</td>
<td>19,12</td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>Mamasa</td>
<td>-</td>
<td>Polmas</td>
<td>3,67</td>
</tr>
<tr>
<td>95</td>
<td>Landak</td>
<td>5,50</td>
<td>Pontianak</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Lanjutan Tabel 1b

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kabupaten Pemekaran (DOB)</th>
<th>Tahun</th>
<th>PDRB adhb (Miliar)</th>
<th>PDRB adhk (Miliar)</th>
<th>Laju Pertumbuhan Ekonomi</th>
<th>PDRB adhb Induk (Miliar)</th>
<th>PDRB adhk Induk (Miliar)</th>
<th>Laju Pertumbuhan Ekonomi Induk</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>97</td>
<td>Morowali</td>
<td>2006</td>
<td>422.64</td>
<td>235.93</td>
<td>11.26</td>
<td>1,710.39</td>
<td>966.25</td>
<td>9.94</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2007</td>
<td>557.80</td>
<td>242.89</td>
<td>2.95</td>
<td>2,060.02</td>
<td>1,081.72</td>
<td>11.95</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>717.00</td>
<td>251.96</td>
<td>3.73</td>
<td>2,376.40</td>
<td>1,145.62</td>
<td>5.91</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>838.56</td>
<td>264.91</td>
<td>5.14</td>
<td>2,794.81</td>
<td>1,208.16</td>
<td>5.46</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>rata-2</td>
<td>634.00</td>
<td>248.92</td>
<td>5.77</td>
<td>2,235.41</td>
<td>1,100.44</td>
<td>8.31</td>
</tr>
<tr>
<td>98</td>
<td>Tujo Una-Una</td>
<td>2006</td>
<td>1,533.35</td>
<td>821.93</td>
<td>4.27</td>
<td>1,710.39</td>
<td>966.25</td>
<td>9.94</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2007</td>
<td>1,905.92</td>
<td>867.03</td>
<td>5.49</td>
<td>2,060.02</td>
<td>1,081.72</td>
<td>11.95</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>2,193.50</td>
<td>902.08</td>
<td>4.04</td>
<td>2,376.40</td>
<td>1,145.62</td>
<td>5.91</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>2,546.18</td>
<td>935.03</td>
<td>3.65</td>
<td>2,794.81</td>
<td>1,208.16</td>
<td>5.46</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>rata-2</td>
<td>2,044.74</td>
<td>881.52</td>
<td>4.36</td>
<td>2,235.41</td>
<td>1,100.44</td>
<td>8.31</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>Kepahiang</td>
<td>2006</td>
<td>331.69</td>
<td>201.41</td>
<td>20.68</td>
<td>1,710.39</td>
<td>966.25</td>
<td>9.94</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2007</td>
<td>374.78</td>
<td>224.75</td>
<td>11.59</td>
<td>2,060.02</td>
<td>1,081.72</td>
<td>11.95</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>433.00</td>
<td>235.62</td>
<td>4.83</td>
<td>2,376.40</td>
<td>1,145.62</td>
<td>5.91</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>504.43</td>
<td>246.66</td>
<td>4.68</td>
<td>2,794.81</td>
<td>1,208.16</td>
<td>5.46</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>rata-2</td>
<td>410.98</td>
<td>227.11</td>
<td>10.45</td>
<td>2,235.41</td>
<td>1,100.44</td>
<td>8.31</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>Lebong</td>
<td>2006</td>
<td>859.62</td>
<td>556.29</td>
<td>5.24</td>
<td>1,625.02</td>
<td>1,112.78</td>
<td>4.13</td>
</tr>
<tr>
<td>101</td>
<td>Bengkayang</td>
<td>2007</td>
<td>981.20</td>
<td>581.73</td>
<td>4.57</td>
<td>1,810.69</td>
<td>1,181.07</td>
<td>6.14</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Yulistiani, et al. (2007), dikembangkan
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Aceh Singkil</td>
<td>519.19</td>
<td>573.43</td>
<td>640.95</td>
<td>564.47</td>
<td>524.30</td>
<td>537.92</td>
<td>515.07</td>
</tr>
<tr>
<td>Bener Meriah</td>
<td>1,098.59</td>
<td>1,145.67</td>
<td>1,343.95</td>
<td>1,290.28</td>
<td>1,151.09</td>
<td>1,212.73</td>
<td>1,188.03</td>
</tr>
<tr>
<td>Gayo Lues</td>
<td>557.62</td>
<td>597.54</td>
<td>659.19</td>
<td>644.03</td>
<td>578.27</td>
<td>602.11</td>
<td>595.24</td>
</tr>
<tr>
<td>Aceh Tamiang</td>
<td>1,895.18</td>
<td>1,899.82</td>
<td>2,009.42</td>
<td>1,996.40</td>
<td>1,932.26</td>
<td>1,996.74</td>
<td>1,964.62</td>
</tr>
<tr>
<td>Bireun</td>
<td>3,321.23</td>
<td>3,784.90</td>
<td>4,338.53</td>
<td>4,148.62</td>
<td>3,610.43</td>
<td>3,942.81</td>
<td>3,776.05</td>
</tr>
<tr>
<td>Banggai Kepulauan</td>
<td>818.81</td>
<td>943.25</td>
<td>1,137.85</td>
<td>1,047.59</td>
<td>939.37</td>
<td>1,028.93</td>
<td>977.58</td>
</tr>
<tr>
<td>Bangka Barat</td>
<td>3,758.20</td>
<td>4,196.17</td>
<td>5,149.05</td>
<td>4,620.39</td>
<td>4,227.16</td>
<td>4,863.43</td>
<td>4,540.55</td>
</tr>
<tr>
<td>Bangka Slatan</td>
<td>1,768.17</td>
<td>1,974.98</td>
<td>2,353.61</td>
<td>2,353.61</td>
<td>1,915.44</td>
<td>2,201.87</td>
<td>2,021.93</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>Bangka Tengah</td>
<td>2,048.68</td>
<td>2,285.40</td>
<td>2,740.49</td>
<td>2,874.67</td>
<td>886.40</td>
<td>1,023.78</td>
<td>1,152.46</td>
</tr>
<tr>
<td>Barito Timur</td>
<td>462.73</td>
<td>595.90</td>
<td>595.90</td>
<td>628.20</td>
<td>531.85</td>
<td>562.32</td>
<td>595.90</td>
</tr>
<tr>
<td>Murung Raya</td>
<td>462.73</td>
<td>595.90</td>
<td>595.90</td>
<td>628.20</td>
<td>531.85</td>
<td>562.32</td>
<td>595.90</td>
</tr>
<tr>
<td>Muaro Jambi</td>
<td>462.73</td>
<td>595.90</td>
<td>595.90</td>
<td>628.20</td>
<td>531.85</td>
<td>562.32</td>
<td>595.90</td>
</tr>
<tr>
<td>Belitung Timur</td>
<td>462.73</td>
<td>595.90</td>
<td>595.90</td>
<td>628.20</td>
<td>531.85</td>
<td>562.32</td>
<td>595.90</td>
</tr>
<tr>
<td>Rokan Hilir</td>
<td>462.73</td>
<td>595.90</td>
<td>595.90</td>
<td>628.20</td>
<td>531.85</td>
<td>562.32</td>
<td>595.90</td>
</tr>
<tr>
<td>Siak</td>
<td>462.73</td>
<td>595.90</td>
<td>595.90</td>
<td>628.20</td>
<td>531.85</td>
<td>562.32</td>
<td>595.90</td>
</tr>
<tr>
<td>Kaur</td>
<td>462.73</td>
<td>595.90</td>
<td>595.90</td>
<td>628.20</td>
<td>531.85</td>
<td>562.32</td>
<td>595.90</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>----------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>-------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Muko-Muko</td>
<td>813.57</td>
<td>1,015.32</td>
<td>1,015.32</td>
<td>1,090.21</td>
<td>956.35</td>
<td>813.57</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Supiori</td>
<td>1,857.14</td>
<td>2,613.60</td>
<td>3,446.62</td>
<td>3,818.99</td>
<td>3,262.82</td>
<td>1,857.14</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Karimun</td>
<td>2,737.14</td>
<td>3,048.52</td>
<td>3,446.62</td>
<td>3,818.99</td>
<td>3,262.82</td>
<td>2,737.14</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Lingga</td>
<td>678.00</td>
<td>741.57</td>
<td>838.36</td>
<td>906.32</td>
<td>791.06</td>
<td>678.00</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Natuna</td>
<td>5,625.80</td>
<td>5,891.71</td>
<td>6,183.29</td>
<td>7,005.90</td>
<td>5,151.68</td>
<td>5,625.80</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Malinau</td>
<td>859.24</td>
<td>1,041.79</td>
<td>1,285.81</td>
<td>1,563.31</td>
<td>1,187.54</td>
<td>859.24</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Nunukan</td>
<td>2,194.54</td>
<td>2,570.82</td>
<td>3,122.33</td>
<td>3,121.12</td>
<td>2,752.20</td>
<td>2,194.54</td>
</tr>
<tr>
<td>Tahun</td>
<td>Tebo</td>
<td>Bombana</td>
<td>Wakatobi</td>
<td>Pakbharat</td>
<td>SerdangBedagai</td>
<td>ParigiMotong</td>
<td>Kaimana</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>------------</td>
<td>------------</td>
<td>------------</td>
<td>-----------</td>
<td>----------------</td>
<td>--------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td>1,424.40</td>
<td>727.53</td>
<td>800.59</td>
<td>34,221.04</td>
<td>3,468.15</td>
<td>454.26</td>
<td>34,221.04</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>1,619.04</td>
<td>770.81</td>
<td>817.65</td>
<td>39,235.06</td>
<td>4,034.75</td>
<td>2,241.34</td>
<td>454.26</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>1,951.81</td>
<td>817.65</td>
<td>817.65</td>
<td>34,459.51</td>
<td>4,851.01</td>
<td>2,417.31</td>
<td>534.43</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>2,185.81</td>
<td>858.59</td>
<td>858.59</td>
<td>34,549.51</td>
<td>5,514.61</td>
<td>2,796.10</td>
<td>601.59</td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td>1,795.27</td>
<td>793.65</td>
<td>817.65</td>
<td>37,897.21</td>
<td>4,467.13</td>
<td>2,513.41</td>
<td>572.46</td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td>605.28</td>
<td>311.23</td>
<td>311.23</td>
<td>408.56</td>
<td>460.04</td>
<td>605.28</td>
<td>408.56</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>690.51</td>
<td>333.44</td>
<td>333.44</td>
<td>460.04</td>
<td>568.04</td>
<td>690.51</td>
<td>460.04</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>878.38</td>
<td>360.93</td>
<td>360.93</td>
<td>568.04</td>
<td>706.03</td>
<td>878.38</td>
<td>568.04</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>1,012.40</td>
<td>388.85</td>
<td>388.85</td>
<td>706.03</td>
<td>706.03</td>
<td>1,012.40</td>
<td>706.03</td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td>796.64</td>
<td>348.61</td>
<td>348.61</td>
<td>796.64</td>
<td>796.64</td>
<td>796.64</td>
<td>796.64</td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td>207.59</td>
<td>130.09</td>
<td>130.09</td>
<td>207.59</td>
<td>207.59</td>
<td>207.59</td>
<td>207.59</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>231.07</td>
<td>137.83</td>
<td>137.83</td>
<td>231.07</td>
<td>290.30</td>
<td>231.07</td>
<td>231.07</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>258.92</td>
<td>145.92</td>
<td>145.92</td>
<td>258.92</td>
<td>290.30</td>
<td>258.92</td>
<td>258.92</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>290.30</td>
<td>154.42</td>
<td>154.42</td>
<td>290.30</td>
<td>306.02</td>
<td>290.30</td>
<td>290.30</td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td>246.97</td>
<td>142.06</td>
<td>142.06</td>
<td>246.97</td>
<td>246.97</td>
<td>246.97</td>
<td>246.97</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Daerah</td>
<td>Tahun</td>
<td>Nilai 1</td>
<td>Nilai 2</td>
<td>Nilai 3</td>
<td>Nilai 4</td>
<td>Nilai 5</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>------------</td>
<td>-------</td>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>Lembata</td>
<td>2006</td>
<td>238.93</td>
<td>127.20</td>
<td>5.62</td>
<td>1,000.98</td>
<td>527.07</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2007</td>
<td>270.23</td>
<td>134.53</td>
<td>5.76</td>
<td>1,049.68</td>
<td>545.45</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>315.98</td>
<td>141.44</td>
<td>5.13</td>
<td>1,116.10</td>
<td>570.96</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>356.81</td>
<td>147.61</td>
<td>4.36</td>
<td>1,243.79</td>
<td>594.40</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>rata-2</td>
<td></td>
<td>295.49</td>
<td>137.69</td>
<td>5.22</td>
<td>1,102.64</td>
<td>559.47</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>Boalemo</td>
<td>2006</td>
<td>438.26</td>
<td>254.64</td>
<td>6.65</td>
<td>1,034.38</td>
<td>644.12</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2007</td>
<td>517.44</td>
<td>272.68</td>
<td>7.09</td>
<td>1,203.63</td>
<td>692.13</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>613.53</td>
<td>292.77</td>
<td>7.37</td>
<td>1,560.53</td>
<td>744.97</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>710.77</td>
<td>310.75</td>
<td>6.14</td>
<td>1,881.98</td>
<td>800.68</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>rata-2</td>
<td></td>
<td>570.00</td>
<td>282.71</td>
<td>6.81</td>
<td>1,420.13</td>
<td>720.48</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>BoneBolango</td>
<td>2006</td>
<td>535.82</td>
<td>219.40</td>
<td>5.28</td>
<td>1,034.38</td>
<td>644.12</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2007</td>
<td>611.27</td>
<td>232.30</td>
<td>5.88</td>
<td>1,203.63</td>
<td>692.13</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>717.39</td>
<td>247.03</td>
<td>6.34</td>
<td>1,560.53</td>
<td>744.97</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>826.05</td>
<td>247.03</td>
<td>6.34</td>
<td>1,560.53</td>
<td>744.97</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>rata-2</td>
<td></td>
<td>570.00</td>
<td>282.71</td>
<td>6.81</td>
<td>1,420.13</td>
<td>720.48</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>Pahuwato</td>
<td>2006</td>
<td>585.37</td>
<td>392.64</td>
<td>7.25</td>
<td>1,034.38</td>
<td>644.12</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2007</td>
<td>712.38</td>
<td>421.34</td>
<td>7.31</td>
<td>1,203.63</td>
<td>692.13</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>888.55</td>
<td>452.56</td>
<td>7.41</td>
<td>1,560.53</td>
<td>744.97</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>1,036.34</td>
<td>484.96</td>
<td>7.16</td>
<td>1,881.98</td>
<td>800.68</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>rata-2</td>
<td></td>
<td>805.66</td>
<td>437.87</td>
<td>7.28</td>
<td>1,420.13</td>
<td>720.48</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>Halmahera</td>
<td>2006</td>
<td>539.48</td>
<td>450.18</td>
<td>5.42</td>
<td>219.62</td>
<td>190.33</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Selatan</td>
<td>2007</td>
<td>593.05</td>
<td>476.88</td>
<td>5.93</td>
<td>238.53</td>
<td>198.34</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>711.87</td>
<td>505.42</td>
<td>5.99</td>
<td>282.84</td>
<td>206.59</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>804.26</td>
<td>533.62</td>
<td>5.88</td>
<td>323.83</td>
<td>216.15</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>rata-2</td>
<td></td>
<td>662.16</td>
<td>491.52</td>
<td>5.73</td>
<td>266.20</td>
<td>202.85</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>Hakmehera</td>
<td>2006</td>
<td>499.34</td>
<td>392.32</td>
<td>4.98</td>
<td>219.62</td>
<td>190.33</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Utara</td>
<td>2007</td>
<td>557.38</td>
<td>413.92</td>
<td>5.51</td>
<td>238.53</td>
<td>198.34</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>514.28</td>
<td>343.89</td>
<td>5.46</td>
<td>282.84</td>
<td>206.59</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>655.55</td>
<td>368.33</td>
<td>6.90</td>
<td>323.83</td>
<td>216.15</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>rata-2</td>
<td></td>
<td>556.64</td>
<td>379.61</td>
<td>5.71</td>
<td>266.20</td>
<td>202.85</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>Kep. Sula</td>
<td>2006</td>
<td>344.82</td>
<td>267.34</td>
<td>5.14</td>
<td>219.62</td>
<td>190.33</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2007</td>
<td>381.18</td>
<td>282.37</td>
<td>5.62</td>
<td>238.53</td>
<td>198.34</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>447.84</td>
<td>297.12</td>
<td>5.23</td>
<td>282.84</td>
<td>206.59</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>522.27</td>
<td>312.89</td>
<td>5.31</td>
<td>323.83</td>
<td>216.15</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>rata-2</td>
<td></td>
<td>424.03</td>
<td>289.93</td>
<td>5.32</td>
<td>266.20</td>
<td>202.85</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>Halmahera</td>
<td>2006</td>
<td>236.18</td>
<td>186.57</td>
<td>6.27</td>
<td>222.48</td>
<td>188.77</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Timur</td>
<td>2007</td>
<td>282.49</td>
<td>205.60</td>
<td>10.20</td>
<td>245.60</td>
<td>196.82</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>489.34</td>
<td>312.17</td>
<td>6.79</td>
<td>288.04</td>
<td>207.50</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>589.56</td>
<td>333.59</td>
<td>7.16</td>
<td>375.94</td>
<td>218.86</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>rata-2</td>
<td></td>
<td>399.39</td>
<td>259.48</td>
<td>7.61</td>
<td>283.01</td>
<td>202.99</td>
</tr>
<tr>
<td>Balangan</td>
<td>2006</td>
<td>1,728.57</td>
<td>1,193.13</td>
<td>3.21</td>
<td>951.16</td>
<td>700.90</td>
<td>4.51</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
<td>-------</td>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2007</td>
<td>1,886.25</td>
<td>1,255.83</td>
<td>5.25</td>
<td>1,036.13</td>
<td>742.19</td>
<td>5.89</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>2,042.09</td>
<td>1,319.45</td>
<td>5.07</td>
<td>1,168.73</td>
<td>790.48</td>
<td>6.51</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>2,283.12</td>
<td>1,394.93</td>
<td>5.72</td>
<td>1,296.70</td>
<td>831.97</td>
<td>5.25</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2006</td>
<td>6,598.54</td>
<td>2,306.24</td>
<td>8.83</td>
<td>7,487.49</td>
<td>3,245.33</td>
<td>7.10</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2007</td>
<td>8,159.15</td>
<td>2,511.61</td>
<td>8.91</td>
<td>9,554.95</td>
<td>3,469.11</td>
<td>6.90</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>10,119.62</td>
<td>2,719.00</td>
<td>8.26</td>
<td>12,135.37</td>
<td>3,722.82</td>
<td>7.31</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>12,042.92</td>
<td>2,906.64</td>
<td>6.90</td>
<td>15,246.27</td>
<td>3,971.72</td>
<td>6.69</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2006</td>
<td>415.97</td>
<td>230.27</td>
<td>27.12</td>
<td>996.48</td>
<td>600.93</td>
<td>8.77</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2007</td>
<td>497.53</td>
<td>257.78</td>
<td>11.94</td>
<td>1,134.28</td>
<td>634.41</td>
<td>5.57</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>599.46</td>
<td>290.68</td>
<td>12.76</td>
<td>1,313.92</td>
<td>689.39</td>
<td>8.67</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>696.35</td>
<td>325.23</td>
<td>11.89</td>
<td>1,516.92</td>
<td>751.39</td>
<td>8.99</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2006</td>
<td>346.63</td>
<td>199.21</td>
<td>9.33</td>
<td>996.48</td>
<td>600.93</td>
<td>8.77</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2007</td>
<td>404.95</td>
<td>184.49</td>
<td>-7.39</td>
<td>1,134.28</td>
<td>634.41</td>
<td>5.57</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>500.48</td>
<td>200.49</td>
<td>8.67</td>
<td>1,313.92</td>
<td>689.39</td>
<td>8.67</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>579.90</td>
<td>216.90</td>
<td>8.19</td>
<td>1,516.92</td>
<td>751.39</td>
<td>8.99</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2006</td>
<td>193.32</td>
<td>137.72</td>
<td>8.63</td>
<td>852.94</td>
<td>579.26</td>
<td>3.49</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2007</td>
<td>245.34</td>
<td>153.69</td>
<td>11.59</td>
<td>999.11</td>
<td>623.35</td>
<td>7.61</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>365.03</td>
<td>182.61</td>
<td>18.82</td>
<td>1,183.70</td>
<td>676.51</td>
<td>8.53</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>442.77</td>
<td>200.65</td>
<td>9.88</td>
<td>931.49</td>
<td>470.81</td>
<td>9.62</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2006</td>
<td>311.62</td>
<td>168.67</td>
<td>12.23</td>
<td>999.11</td>
<td>623.35</td>
<td>7.61</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2007</td>
<td>465.15</td>
<td>244.00</td>
<td>6.88</td>
<td>852.94</td>
<td>579.26</td>
<td>3.49</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>555.35</td>
<td>266.44</td>
<td>9.20</td>
<td>999.11</td>
<td>623.35</td>
<td>7.61</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>533.90</td>
<td>208.77</td>
<td>9.00</td>
<td>931.49</td>
<td>470.81</td>
<td>9.62</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2006</td>
<td>185.02</td>
<td>126.38</td>
<td>8.48</td>
<td>852.94</td>
<td>579.26</td>
<td>3.49</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2007</td>
<td>239.24</td>
<td>148.33</td>
<td>17.37</td>
<td>999.11</td>
<td>623.35</td>
<td>7.61</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>305.48</td>
<td>172.28</td>
<td>16.15</td>
<td>1,183.70</td>
<td>676.51</td>
<td>8.53</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>353.23</td>
<td>185.97</td>
<td>7.95</td>
<td>931.49</td>
<td>470.81</td>
<td>9.62</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2006</td>
<td>270.73</td>
<td>158.24</td>
<td>12.49</td>
<td>999.11</td>
<td>623.35</td>
<td>7.61</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2007</td>
<td>168.77</td>
<td>112.32</td>
<td>9.25</td>
<td>999.11</td>
<td>623.35</td>
<td>7.61</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>204.95</td>
<td>123.85</td>
<td>10.26</td>
<td>1,183.70</td>
<td>676.51</td>
<td>8.53</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>239.71</td>
<td>132.81</td>
<td>7.24</td>
<td>931.49</td>
<td>470.81</td>
<td>9.62</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2006</td>
<td>189.47</td>
<td>117.95</td>
<td>8.29</td>
<td>991.81</td>
<td>587.48</td>
<td>7.31</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2007</td>
<td>223.24</td>
<td>148.33</td>
<td>17.37</td>
<td>999.11</td>
<td>623.35</td>
<td>7.61</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>324.44</td>
<td>172.28</td>
<td>16.15</td>
<td>1,183.70</td>
<td>676.51</td>
<td>8.53</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>353.23</td>
<td>185.97</td>
<td>7.95</td>
<td>931.49</td>
<td>470.81</td>
<td>9.62</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2006</td>
<td>270.73</td>
<td>158.24</td>
<td>12.49</td>
<td>999.11</td>
<td>623.35</td>
<td>7.61</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2007</td>
<td>168.77</td>
<td>112.32</td>
<td>9.25</td>
<td>999.11</td>
<td>623.35</td>
<td>7.61</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>204.95</td>
<td>123.85</td>
<td>10.26</td>
<td>1,183.70</td>
<td>676.51</td>
<td>8.53</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>239.71</td>
<td>132.81</td>
<td>7.24</td>
<td>931.49</td>
<td>470.81</td>
<td>9.62</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------</td>
<td>------------</td>
<td>------------</td>
<td>------------</td>
<td>------------</td>
<td>------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>8,263.26</td>
<td>10,211.55</td>
<td>12,626.38</td>
<td>15,235.29</td>
<td>11,584.12</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pelalawan</td>
<td>3,428.85</td>
<td>2,670.78</td>
<td>2,856.95</td>
<td>3,000.67</td>
<td>4,209.27</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6.95</td>
<td>6.79</td>
<td>6.97</td>
<td>6.62</td>
<td>6.83</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>13,046.19</td>
<td>16,553.69</td>
<td>21,370.81</td>
<td>24,685.13</td>
<td>18,913.95</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7,563.36</td>
<td>7,827.59</td>
<td>8,279.26</td>
<td>8,549.69</td>
<td>8,054.98</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4.30</td>
<td>3.49</td>
<td>5.77</td>
<td>3.27</td>
<td>4.21</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td>11,584.12</td>
<td>13,046.19</td>
<td>21,370.81</td>
<td>24,685.13</td>
<td>18,913.95</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rokan Hulu</td>
<td>6,501.44</td>
<td>7,836.23</td>
<td>9,320.11</td>
<td>10,761.19</td>
<td>8,604.74</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2,132.57</td>
<td>2,271.85</td>
<td>2,426.33</td>
<td>2,580.79</td>
<td>2,352.89</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6.86</td>
<td>6.53</td>
<td>6.80</td>
<td>6.37</td>
<td>6.64</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>13,046.19</td>
<td>16,553.69</td>
<td>21,370.81</td>
<td>24,685.13</td>
<td>18,913.95</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7,563.36</td>
<td>7,827.59</td>
<td>8,279.26</td>
<td>8,549.69</td>
<td>8,054.98</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4.30</td>
<td>3.49</td>
<td>5.77</td>
<td>3.27</td>
<td>4.21</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td>8,604.74</td>
<td>8,604.74</td>
<td>8,604.74</td>
<td>8,604.74</td>
<td>8,604.74</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gunung Mas</td>
<td>838.80</td>
<td>919.93</td>
<td>1,025.51</td>
<td>1,135.25</td>
<td>979.87</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>554.89</td>
<td>582.85</td>
<td>613.40</td>
<td>644.11</td>
<td>598.81</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4.98</td>
<td>5.04</td>
<td>5.24</td>
<td>5.01</td>
<td>5.07</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2,879.62</td>
<td>3,339.21</td>
<td>3,886.30</td>
<td>4,344.07</td>
<td>3,612.30</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1,773.65</td>
<td>1,863.22</td>
<td>1,958.98</td>
<td>2,058.66</td>
<td>1,913.63</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4.99</td>
<td>5.05</td>
<td>5.14</td>
<td>5.09</td>
<td>5.07</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td>979.87</td>
<td>1,025.51</td>
<td>1,135.25</td>
<td>1,300.17</td>
<td>1,013.64</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Plang Pisau</td>
<td>833.01</td>
<td>922.76</td>
<td>1,030.35</td>
<td>1,143.08</td>
<td>982.30</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>597.60</td>
<td>632.39</td>
<td>666.29</td>
<td>701.08</td>
<td>649.34</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5.21</td>
<td>5.04</td>
<td>5.36</td>
<td>5.22</td>
<td>5.40</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2,879.62</td>
<td>3,339.21</td>
<td>3,886.30</td>
<td>4,344.07</td>
<td>3,612.30</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1,773.65</td>
<td>1,863.22</td>
<td>1,958.98</td>
<td>2,058.66</td>
<td>1,913.63</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4.99</td>
<td>5.05</td>
<td>5.14</td>
<td>5.09</td>
<td>5.07</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td>982.30</td>
<td>1,030.35</td>
<td>1,143.08</td>
<td>1,321.82</td>
<td>1,033.64</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kepulauan</td>
<td>524.43</td>
<td>569.06</td>
<td>607.44</td>
<td>675.17</td>
<td>594.02</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>340.62</td>
<td>361.76</td>
<td>379.98</td>
<td>399.53</td>
<td>370.47</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4.67</td>
<td>6.21</td>
<td>5.04</td>
<td>5.15</td>
<td>5.26</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>813.12</td>
<td>909.82</td>
<td>1,049.34</td>
<td>1,231.15</td>
<td>1,000.86</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>592.69</td>
<td>624.79</td>
<td>659.07</td>
<td>697.30</td>
<td>643.46</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3.76</td>
<td>5.42</td>
<td>5.49</td>
<td>5.80</td>
<td>5.11</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td>524.43</td>
<td>569.06</td>
<td>607.44</td>
<td>675.17</td>
<td>594.02</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kolaka Utara</td>
<td>1,127.45</td>
<td>1,253.70</td>
<td>1,493.36</td>
<td>1,712.90</td>
<td>1,754.83</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>689.94</td>
<td>730.49</td>
<td>757.10</td>
<td>810.68</td>
<td>747.05</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5.64</td>
<td>5.88</td>
<td>5.36</td>
<td>7.08</td>
<td>5.56</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3,543.20</td>
<td>4,320.35</td>
<td>5,093.85</td>
<td>5,402.78</td>
<td>4,590.05</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2,298.59</td>
<td>2,510.71</td>
<td>2,565.24</td>
<td>2,615.47</td>
<td>2,497.50</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10.54</td>
<td>9.23</td>
<td>2.17</td>
<td>1.96</td>
<td>5.97</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td>1,127.45</td>
<td>1,253.70</td>
<td>1,493.36</td>
<td>1,712.90</td>
<td>1,754.83</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Konawe Selatan</td>
<td>1,286.56</td>
<td>1,253.70</td>
<td>1,493.36</td>
<td>1,712.90</td>
<td>1,754.83</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>718.82</td>
<td>730.49</td>
<td>757.10</td>
<td>810.68</td>
<td>747.05</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6.53</td>
<td>5.88</td>
<td>5.36</td>
<td>7.08</td>
<td>5.56</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1,381.61</td>
<td>1,582.05</td>
<td>1,957.63</td>
<td>2,319.27</td>
<td>1,810.14</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>683.53</td>
<td>728.93</td>
<td>782.13</td>
<td>858.06</td>
<td>763.16</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5.31</td>
<td>6.64</td>
<td>7.30</td>
<td>9.71</td>
<td>7.24</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td>1,286.56</td>
<td>1,253.70</td>
<td>1,493.36</td>
<td>1,712.90</td>
<td>1,754.83</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tnahbumbu</td>
<td>3,509.50</td>
<td>4,091.86</td>
<td>4,728.96</td>
<td>5,381.25</td>
<td>4,427.89</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2,402.45</td>
<td>2,664.79</td>
<td>2,878.60</td>
<td>3,041.89</td>
<td>2,746.93</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.74</td>
<td>10.92</td>
<td>8.02</td>
<td>5.67</td>
<td>6.59</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5,921.40</td>
<td>6,653.15</td>
<td>7,498.28</td>
<td>8,362.26</td>
<td>7,108.77</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3,940.14</td>
<td>4,125.35</td>
<td>4,381.00</td>
<td>4,616.03</td>
<td>4,265.63</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4.53</td>
<td>4.70</td>
<td>6.20</td>
<td>5.36</td>
<td>5.20</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kabupaten</td>
<td>2006</td>
<td>2007</td>
<td>2008</td>
<td>2009</td>
<td>rata-2</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lamandau</td>
<td>693.03</td>
<td>709.71</td>
<td>867.76</td>
<td>940.53</td>
<td>823.01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Suakama</td>
<td>747.22</td>
<td>790.71</td>
<td>864.89</td>
<td>925.27</td>
<td>836.38</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Katingan</td>
<td>1,695.54</td>
<td>1,898.13</td>
<td>2,165.54</td>
<td>2,399.80</td>
<td>2,039.75</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rote Ndao</td>
<td>374.57</td>
<td>416.71</td>
<td>464.67</td>
<td>522.27</td>
<td>444.56</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kutai Barat</td>
<td>3,597.81</td>
<td>3,977.91</td>
<td>4,975.89</td>
<td>5,508.88</td>
<td>4,515.12</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kutai Timur</td>
<td>16,264.63</td>
<td>18,394.19</td>
<td>24,312.29</td>
<td>27,369.97</td>
<td>21,585.27</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lampung Timur</td>
<td>6,462.75</td>
<td>7,157.05</td>
<td>8,177.98</td>
<td>8,958.87</td>
<td>7,689.16</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Hak Cipta Dilihurkan kepada Penulis dan/atau Penerbit**

**Referensi**

1. Dihargai kepada Penulis dan/atau Penerbit yang telah menyediakan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
2. Hak cipta dilindungi undang-undang, baik dalam keadaan asli maupun versi elektronik.
3. Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor) yang telah menyediakan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
Lanjutan Tabel 1c

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2006</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>rata-2</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>1,645.64</td>
<td>1,932.85</td>
<td>2,027.77</td>
<td>2,052.96</td>
<td>2,011.07</td>
</tr>
<tr>
<td>Way kanan</td>
<td>1,156.01</td>
<td>1,219.88</td>
<td>1,277.70</td>
<td>1,247.81</td>
<td>1,215.34</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4.04</td>
<td>5.52</td>
<td>5.26</td>
<td>4.75</td>
<td>5.14</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3,927.04</td>
<td>4,862.76</td>
<td>5,977.33</td>
<td>7,111.44</td>
<td>6,145.64</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2,686.70</td>
<td>2,855.12</td>
<td>3,018.01</td>
<td>3,194.21</td>
<td>2,938.51</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5.79</td>
<td>6.27</td>
<td>5.71</td>
<td>5.84</td>
<td>5.90</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2006</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>rata-2</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Luwu Utara</td>
<td>1,601.07</td>
<td>1,864.48</td>
<td>2,328.50</td>
<td>2,690.87</td>
<td>2,121.23</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1,158.34</td>
<td>1,337.66</td>
<td>1,356.83</td>
<td>1,450.44</td>
<td>1,300.75</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7.61</td>
<td>4.17</td>
<td>9.65</td>
<td>6.90</td>
<td>7.75</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1,968.50</td>
<td>2,254.16</td>
<td>2,696.36</td>
<td>3,195.65</td>
<td>2,528.67</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1,326.99</td>
<td>1,480.34</td>
<td>1,480.67</td>
<td>1,581.66</td>
<td>1,447.41</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5.51</td>
<td>5.53</td>
<td>5.74</td>
<td>6.82</td>
<td>5.90</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2006</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>rata-2</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Luwu Timur</td>
<td>5,777.76</td>
<td>6,508.18</td>
<td>6,959.79</td>
<td>6,416.03</td>
<td>6,415.44</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4,293.87</td>
<td>4,540.57</td>
<td>4,429.72</td>
<td>4,250.55</td>
<td>4,378.68</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6.86</td>
<td>5.75</td>
<td>-2.44</td>
<td>-4.04</td>
<td>1.53</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1,601.07</td>
<td>1,864.48</td>
<td>2,328.50</td>
<td>2,690.87</td>
<td>2,121.23</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1,158.34</td>
<td>1,337.66</td>
<td>1,356.83</td>
<td>1,450.44</td>
<td>1,300.75</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7.61</td>
<td>4.17</td>
<td>9.65</td>
<td>6.90</td>
<td>7.75</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2006</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>rata-2</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Buru</td>
<td>374.23</td>
<td>415.50</td>
<td>455.28</td>
<td>293.76</td>
<td>384.69</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>248.39</td>
<td>258.40</td>
<td>269.02</td>
<td>166.71</td>
<td>235.63</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4.41</td>
<td>4.03</td>
<td>4.11</td>
<td>5.25</td>
<td>4.45</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>753.09</td>
<td>840.25</td>
<td>933.88</td>
<td>1,046.80</td>
<td>893.50</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>508.16</td>
<td>534.17</td>
<td>561.76</td>
<td>591.47</td>
<td>548.89</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5.01</td>
<td>5.12</td>
<td>5.17</td>
<td>5.29</td>
<td>5.14</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2006</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>rata-2</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Seram Bag. Barat</td>
<td>384.43</td>
<td>430.45</td>
<td>478.35</td>
<td>532.15</td>
<td>456.35</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>264.42</td>
<td>276.92</td>
<td>291.77</td>
<td>306.84</td>
<td>284.99</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2.85</td>
<td>4.73</td>
<td>5.36</td>
<td>5.16</td>
<td>4.53</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>753.09</td>
<td>840.25</td>
<td>933.88</td>
<td>1,046.80</td>
<td>893.50</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>508.16</td>
<td>534.17</td>
<td>561.76</td>
<td>591.47</td>
<td>548.89</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5.01</td>
<td>5.12</td>
<td>5.17</td>
<td>5.29</td>
<td>5.14</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2006</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>rata-2</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Seram Bag. Timur</td>
<td>187.98</td>
<td>203.14</td>
<td>226.28</td>
<td>250.74</td>
<td>217.04</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>124.67</td>
<td>127.64</td>
<td>133.42</td>
<td>139.33</td>
<td>131.26</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4.97</td>
<td>2.38</td>
<td>4.53</td>
<td>4.42</td>
<td>4.08</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>753.09</td>
<td>840.25</td>
<td>933.88</td>
<td>1,046.80</td>
<td>893.50</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>508.16</td>
<td>534.17</td>
<td>561.76</td>
<td>591.47</td>
<td>548.89</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5.01</td>
<td>5.12</td>
<td>5.17</td>
<td>5.29</td>
<td>5.14</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2006</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>rata-2</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kep. Aru</td>
<td>264.57</td>
<td>295.96</td>
<td>328.99</td>
<td>364.61</td>
<td>313.53</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>168.97</td>
<td>178.22</td>
<td>187.09</td>
<td>197.28</td>
<td>182.89</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5.39</td>
<td>5.47</td>
<td>4.98</td>
<td>5.45</td>
<td>5.32</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>458.37</td>
<td>301.38</td>
<td>332.86</td>
<td>368.25</td>
<td>365.22</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>302.85</td>
<td>190.97</td>
<td>199.79</td>
<td>209.89</td>
<td>225.87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5.10</td>
<td>4.99</td>
<td>4.61</td>
<td>5.06</td>
<td>4.94</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2006</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>rata-2</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Maluku</td>
<td>597.31</td>
<td>663.13</td>
<td>734.32</td>
<td>487.55</td>
<td>620.58</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>391.62</td>
<td>411.63</td>
<td>429.59</td>
<td>271.99</td>
<td>376.21</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3.85</td>
<td>5.11</td>
<td>4.36</td>
<td>5.51</td>
<td>4.71</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>458.37</td>
<td>301.38</td>
<td>332.86</td>
<td>368.25</td>
<td>365.22</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>302.85</td>
<td>190.97</td>
<td>199.79</td>
<td>209.89</td>
<td>225.87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5.10</td>
<td>4.99</td>
<td>4.61</td>
<td>5.06</td>
<td>4.94</td>
</tr>
<tr>
<td>Kabupaten</td>
<td>Tahun</td>
<td>UMKM (Rupiah)</td>
<td>UMKM/1000 (Rupiah)</td>
<td>UMKM/1000 (Persen)</td>
<td>UMKM/1000 (Persen)</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------------</td>
<td>--------------------</td>
<td>--------------------</td>
<td>--------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Mamuju Utara</td>
<td>2006</td>
<td>673.80</td>
<td>423.92</td>
<td>8.09</td>
<td>1,612.12</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2007</td>
<td>816.34</td>
<td>455.47</td>
<td>7.44</td>
<td>1,952.21</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>1,002.08</td>
<td>489.97</td>
<td>7.57</td>
<td>2,495.81</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>1,136.97</td>
<td>532.47</td>
<td>6.87</td>
<td>2,915.19</td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td></td>
<td>907.30</td>
<td>475.46</td>
<td>5.36</td>
<td>1,829.86</td>
</tr>
<tr>
<td>Manggarai Barat</td>
<td>2006</td>
<td>592.33</td>
<td>344.50</td>
<td>5.36</td>
<td>1,267.53</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2007</td>
<td>694.48</td>
<td>359.29</td>
<td>4.29</td>
<td>1,447.89</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>827.21</td>
<td>378.12</td>
<td>5.24</td>
<td>1,768.03</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>918.40</td>
<td>390.19</td>
<td>3.19</td>
<td>1,875.62</td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td></td>
<td>758.11</td>
<td>368.03</td>
<td>4.52</td>
<td>1,573.01</td>
</tr>
<tr>
<td>Teluk Bintuni</td>
<td>2006</td>
<td>519.03</td>
<td>247.13</td>
<td>23.60</td>
<td>1,312.78</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2007</td>
<td>619.03</td>
<td>344.50</td>
<td>9.85</td>
<td>1,447.89</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>694.48</td>
<td>359.29</td>
<td>12.52</td>
<td>1,768.03</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>827.21</td>
<td>378.12</td>
<td>14.67</td>
<td>2,015.54</td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td></td>
<td>758.11</td>
<td>368.03</td>
<td>14.17</td>
<td>1,573.01</td>
</tr>
<tr>
<td>Teluk Wondama</td>
<td>2006</td>
<td>161.27</td>
<td>116.72</td>
<td>18.93</td>
<td>1,402.78</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2007</td>
<td>209.23</td>
<td>138.57</td>
<td>19.75</td>
<td>1,672.60</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>270.32</td>
<td>161.99</td>
<td>16.90</td>
<td>2,015.54</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>330.23</td>
<td>184.10</td>
<td>13.65</td>
<td>2,441.46</td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td></td>
<td>242.76</td>
<td>150.10</td>
<td>17.31</td>
<td>1,883.09</td>
</tr>
<tr>
<td>Asmat</td>
<td>2006</td>
<td>269.34</td>
<td>157.73</td>
<td>27.19</td>
<td>2,131.68</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2007</td>
<td>356.63</td>
<td>180.62</td>
<td>14.51</td>
<td>2,289.15</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>441.23</td>
<td>200.78</td>
<td>11.16</td>
<td>2,630.43</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>520.38</td>
<td>218.76</td>
<td>13.65</td>
<td>3,000.57</td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td></td>
<td>396.89</td>
<td>189.47</td>
<td>15.45</td>
<td>2,512.96</td>
</tr>
<tr>
<td>Boven Digul</td>
<td>2006</td>
<td>713.71</td>
<td>371.07</td>
<td>17.75</td>
<td>2,131.68</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2007</td>
<td>873.44</td>
<td>393.39</td>
<td>6.02</td>
<td>2,289.15</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>1,113.06</td>
<td>424.50</td>
<td>7.91</td>
<td>2,630.43</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>1,331.20</td>
<td>457.57</td>
<td>7.79</td>
<td>3,000.57</td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td></td>
<td>1,007.85</td>
<td>411.63</td>
<td>9.86</td>
<td>2,512.96</td>
</tr>
<tr>
<td>Mappi</td>
<td>2006</td>
<td>1,542.34</td>
<td>1,003.45</td>
<td>3.67</td>
<td>2,631.20</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2007</td>
<td>1,746.33</td>
<td>1,067.33</td>
<td>6.37</td>
<td>2,943.49</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>1,985.14</td>
<td>1,134.76</td>
<td>6.32</td>
<td>3,300.47</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>2,248.08</td>
<td>1,207.51</td>
<td>6.41</td>
<td>3,764.33</td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td></td>
<td>1,880.47</td>
<td>1,103.26</td>
<td>5.69</td>
<td>3,159.87</td>
</tr>
<tr>
<td>Kabupaten</td>
<td>2006</td>
<td>2007</td>
<td>2008</td>
<td>2009</td>
<td>2010</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>Minahasa</td>
<td>1,550.21</td>
<td>1,036.63</td>
<td>3.05</td>
<td>2,631.20</td>
<td>1,699.19</td>
</tr>
<tr>
<td>Utara</td>
<td>1,755.18</td>
<td>1,094.81</td>
<td>5.61</td>
<td>2,943.49</td>
<td>1,785.42</td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td>1,917.09</td>
<td>1,134.09</td>
<td>5.43</td>
<td>3,159.87</td>
<td>1,827.66</td>
</tr>
<tr>
<td>Banyuasin</td>
<td>7,029.27</td>
<td>3,800.76</td>
<td>6.28</td>
<td>18,940.14</td>
<td>10,260.64</td>
</tr>
<tr>
<td>Utara</td>
<td>8,158.99</td>
<td>4,033.48</td>
<td>6.12</td>
<td>21,805.98</td>
<td>10,541.01</td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td>8,864.84</td>
<td>4,142.41</td>
<td>5.82</td>
<td>22,979.37</td>
<td>10,691.56</td>
</tr>
<tr>
<td>Paniai</td>
<td>509.03</td>
<td>289.76</td>
<td>8.51</td>
<td>1,296.72</td>
<td>828.22</td>
</tr>
<tr>
<td>Utara</td>
<td>527.87</td>
<td>306.24</td>
<td>5.69</td>
<td>1,470.28</td>
<td>873.95</td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td>608.70</td>
<td>316.63</td>
<td>6.47</td>
<td>1,519.37</td>
<td>861.99</td>
</tr>
<tr>
<td>Nias Selatan</td>
<td>1,551.65</td>
<td>1,040.37</td>
<td>3.99</td>
<td>2,761.71</td>
<td>1,630.29</td>
</tr>
<tr>
<td>Utara</td>
<td>1,692.13</td>
<td>1,084.85</td>
<td>4.27</td>
<td>3,181.87</td>
<td>1,738.56</td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td>1,782.50</td>
<td>1,111.17</td>
<td>4.28</td>
<td>3,468.27</td>
<td>1,801.07</td>
</tr>
<tr>
<td>Ogan Ilir</td>
<td>2,233.21</td>
<td>1,421.56</td>
<td>5.17</td>
<td>4,106.42</td>
<td>2,653.83</td>
</tr>
<tr>
<td>Utara</td>
<td>2,539.69</td>
<td>1,492.71</td>
<td>5.01</td>
<td>4,800.97</td>
<td>2,828.42</td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td>2,735.56</td>
<td>1,533.48</td>
<td>5.13</td>
<td>5,155.99</td>
<td>2,897.19</td>
</tr>
<tr>
<td>OKU Seltn</td>
<td>1,683.17</td>
<td>1,027.49</td>
<td>8.71</td>
<td>3,616.29</td>
<td>2,348.26</td>
</tr>
<tr>
<td>Utara</td>
<td>1,929.50</td>
<td>1,085.76</td>
<td>5.67</td>
<td>4,183.21</td>
<td>2,468.62</td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td>2,105.48</td>
<td>1,113.59</td>
<td>6.25</td>
<td>4,469.27</td>
<td>2,525.47</td>
</tr>
<tr>
<td>OKU Timur</td>
<td>3,063.11</td>
<td>1,875.94</td>
<td>6.49</td>
<td>3,616.29</td>
<td>2,348.26</td>
</tr>
<tr>
<td>Utara</td>
<td>3,629.68</td>
<td>2,001.67</td>
<td>6.70</td>
<td>4,183.21</td>
<td>2,468.62</td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td>3,918.56</td>
<td>2,049.57</td>
<td>5.91</td>
<td>4,469.27</td>
<td>2,525.47</td>
</tr>
<tr>
<td>Kepulauan Mentawai</td>
<td>796.77</td>
<td>446.11</td>
<td>4.05</td>
<td>3,890.12</td>
<td>2,346.37</td>
</tr>
<tr>
<td>Utara</td>
<td>912.79</td>
<td>465.79</td>
<td>4.41</td>
<td>4,382.28</td>
<td>2,489.68</td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td>1,026.06</td>
<td>476.99</td>
<td>4.40</td>
<td>4,748.67</td>
<td>2,557.63</td>
</tr>
<tr>
<td>Pasmn Barat</td>
<td>2006</td>
<td>3,507.37</td>
<td>2,115.15</td>
<td>6.36</td>
<td>1,909.42</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>------</td>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
<td>------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2007</td>
<td>4,115.82</td>
<td>2,250.82</td>
<td>6.41</td>
<td>2,234.17</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>4,868.18</td>
<td>2,394.93</td>
<td>6.40</td>
<td>2,577.90</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>5,517.73</td>
<td>2,544.86</td>
<td>6.26</td>
<td>2,889.12</td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td></td>
<td>4,502.28</td>
<td>2,326.44</td>
<td>6.36</td>
<td>2,402.66</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2006</td>
<td>2,049.51</td>
<td>1,639.97</td>
<td>1.63</td>
<td>4,918.11</td>
</tr>
<tr>
<td>Panj Paser</td>
<td>2007</td>
<td>2,205.36</td>
<td>1,702.08</td>
<td>3.79</td>
<td>6,151.39</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>2,437.69</td>
<td>1,787.05</td>
<td>4.99</td>
<td>8,456.44</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>2,438.58</td>
<td>1,847.70</td>
<td>3.39</td>
<td>9,907.52</td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td></td>
<td>2,282.78</td>
<td>1,744.20</td>
<td>3.45</td>
<td>7,358.36</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2006</td>
<td>585.35</td>
<td>449.91</td>
<td>5.46</td>
<td>1,587.25</td>
</tr>
<tr>
<td>Mamasa</td>
<td>2007</td>
<td>675.82</td>
<td>479.90</td>
<td>6.67</td>
<td>1,814.38</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>815.79</td>
<td>517.66</td>
<td>7.87</td>
<td>2,192.04</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>901.41</td>
<td>540.06</td>
<td>4.33</td>
<td>2,547.25</td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td></td>
<td>744.59</td>
<td>496.88</td>
<td>6.08</td>
<td>2,035.23</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2006</td>
<td>1,933.07</td>
<td>1,329.15</td>
<td>4.78</td>
<td>6,864.59</td>
</tr>
<tr>
<td>Landak</td>
<td>2007</td>
<td>2,134.12</td>
<td>1,397.28</td>
<td>5.13</td>
<td>7,686.40</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>2,426.14</td>
<td>1,457.21</td>
<td>4.29</td>
<td>1,400.93</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>2,671.28</td>
<td>1,525.25</td>
<td>4.67</td>
<td>1,632.01</td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td></td>
<td>2,291.15</td>
<td>1,427.22</td>
<td>4.72</td>
<td>4,615.03</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2006</td>
<td>1,731.32</td>
<td>1,204.93</td>
<td>13.84</td>
<td>1,238.88</td>
</tr>
<tr>
<td>Morowali</td>
<td>2007</td>
<td>2,146.81</td>
<td>1,397.28</td>
<td>5.13</td>
<td>7,686.40</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>2,696.13</td>
<td>1,542.28</td>
<td>11.07</td>
<td>1,632.01</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>3,203.90</td>
<td>1,661.10</td>
<td>7.70</td>
<td>1,865.71</td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td></td>
<td>2,444.54</td>
<td>1,449.23</td>
<td>11.96</td>
<td>1,534.38</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2006</td>
<td>562.93</td>
<td>368.31</td>
<td>6.90</td>
<td>1,238.88</td>
</tr>
<tr>
<td>Kepahiang</td>
<td>2007</td>
<td>659.64</td>
<td>396.00</td>
<td>5.13</td>
<td>1,587.25</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>797.25</td>
<td>426.90</td>
<td>7.80</td>
<td>1,632.01</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>910.38</td>
<td>460.81</td>
<td>7.94</td>
<td>1,865.71</td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td></td>
<td>732.55</td>
<td>413.01</td>
<td>7.54</td>
<td>1,534.38</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2006</td>
<td>983.89</td>
<td>595.27</td>
<td>5.42</td>
<td>2,281.35</td>
</tr>
<tr>
<td>Lebong</td>
<td>2007</td>
<td>1,101.97</td>
<td>633.25</td>
<td>6.38</td>
<td>2,548.48</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>1,258.64</td>
<td>667.78</td>
<td>5.45</td>
<td>2,853.29</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>1,379.71</td>
<td>698.53</td>
<td>4.60</td>
<td>3,157.89</td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td></td>
<td>1,181.05</td>
<td>648.71</td>
<td>5.46</td>
<td>2,710.25</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2006</td>
<td>698.78</td>
<td>424.26</td>
<td>5.33</td>
<td>2,281.35</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2007</td>
<td>781.73</td>
<td>445.94</td>
<td>5.11</td>
<td>2,548.48</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>876.45</td>
<td>468.20</td>
<td>4.99</td>
<td>2,853.29</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>962.25</td>
<td>489.66</td>
<td>4.58</td>
<td>3,157.89</td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td></td>
<td>829.80</td>
<td>457.02</td>
<td>5.00</td>
<td>2,710.25</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Lanjutan Tabel 1c

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kabupaten</th>
<th>2006</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>Rata-Rata</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>1,460.85</td>
<td>1,681.06</td>
<td>1,925.13</td>
<td>2,146.18</td>
<td>1,803.31</td>
</tr>
<tr>
<td>Bengkayang</td>
<td>952.09</td>
<td>1,010.34</td>
<td>1,066.61</td>
<td>1,114.64</td>
<td>1,035.92</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3,675.93</td>
<td>4,152.70</td>
<td>4,673.55</td>
<td>5,287.29</td>
<td>4,447.37</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2,364.11</td>
<td>2,491.36</td>
<td>2,628.63</td>
<td>2,771.48</td>
<td>2,563.90</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3.95</td>
<td>5.38</td>
<td>5.51</td>
<td>5.43</td>
<td>5.07</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2006</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>Rata-Rata</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sekadau</td>
<td>754.83</td>
<td>868.38</td>
<td>974.68</td>
<td>1,089.09</td>
<td>921.74</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>527.29</td>
<td>568.18</td>
<td>600.92</td>
<td>633.06</td>
<td>582.36</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3,356.10</td>
<td>3,874.47</td>
<td>4,294.69</td>
<td>4,732.78</td>
<td>4,064.51</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2,234.16</td>
<td>2,356.49</td>
<td>2,438.81</td>
<td>2,575.10</td>
<td>2,401.14</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>8.23</td>
<td>5.48</td>
<td>3.49</td>
<td>5.59</td>
<td>5.70</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2006</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>Rata-Rata</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sarolangun</td>
<td>1,966.63</td>
<td>2,498.15</td>
<td>3,021.85</td>
<td>3,239.06</td>
<td>2,681.42</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>911.40</td>
<td>977.70</td>
<td>1,052.08</td>
<td>1,118.69</td>
<td>1,015.01</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1,638.79</td>
<td>1,910.09</td>
<td>2,262.56</td>
<td>2,750.31</td>
<td>2,140.44</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>892.42</td>
<td>955.06</td>
<td>1,012.32</td>
<td>1,097.54</td>
<td>989.33</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4.80</td>
<td>7.02</td>
<td>3.49</td>
<td>5.59</td>
<td>5.70</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2006</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>Rata-Rata</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Dharmsraya</td>
<td>1,513.32</td>
<td>2,498.15</td>
<td>3,021.85</td>
<td>3,239.06</td>
<td>2,681.42</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>899.31</td>
<td>977.70</td>
<td>1,052.08</td>
<td>1,118.69</td>
<td>1,015.01</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>677.51</td>
<td>756.25</td>
<td>861.96</td>
<td>976.28</td>
<td>818.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>449.26</td>
<td>458.65</td>
<td>474.38</td>
<td>494.39</td>
<td>469.17</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.03</td>
<td>2.09</td>
<td>3.43</td>
<td>4.22</td>
<td>2.69</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2006</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>Rata-Rata</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Melawi</td>
<td>624.92</td>
<td>692.85</td>
<td>773.95</td>
<td>846.75</td>
<td>1,939.28</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>438.98</td>
<td>462.85</td>
<td>486.52</td>
<td>507.00</td>
<td>991.25</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2,429.99</td>
<td>2,745.69</td>
<td>3,105.96</td>
<td>3,484.74</td>
<td>2,140.44</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1,708.44</td>
<td>1,797.36</td>
<td>1,881.76</td>
<td>1,982.99</td>
<td>1,469.17</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5.01</td>
<td>5.20</td>
<td>4.70</td>
<td>5.38</td>
<td>2.69</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2006</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>Rata-Rata</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>SolokSlatan</td>
<td>817.87</td>
<td>796.19</td>
<td>1,066.50</td>
<td>1,220.62</td>
<td>1,006.57</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>514.76</td>
<td>529.37</td>
<td>579.48</td>
<td>614.81</td>
<td>563.78</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2,888.48</td>
<td>2,745.69</td>
<td>4,042.81</td>
<td>4,639.07</td>
<td>3,747.76</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1,705.50</td>
<td>1,797.36</td>
<td>1,926.83</td>
<td>2,047.62</td>
<td>1,872.95</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6.02</td>
<td>5.20</td>
<td>6.35</td>
<td>6.27</td>
<td>6.22</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2006</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>Rata-Rata</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kepulauan</td>
<td>732.45</td>
<td>796.19</td>
<td>1,066.50</td>
<td>1,220.62</td>
<td>1,006.57</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>515.24</td>
<td>529.37</td>
<td>579.48</td>
<td>614.81</td>
<td>563.78</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2,921.69</td>
<td>3,345.64</td>
<td>4,042.81</td>
<td>5,163.08</td>
<td>3,747.76</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1,587.63</td>
<td>1,636.34</td>
<td>1,926.83</td>
<td>1,925.30</td>
<td>1,747.96</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0.45</td>
<td>3.07</td>
<td>8.85</td>
<td>4.54</td>
<td>4.23</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2006</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>Rata-Rata</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Raja Ampat</td>
<td>286.94</td>
<td>327.50</td>
<td>263.07</td>
<td>307.51</td>
<td>296.25</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>193.82</td>
<td>210.62</td>
<td>165.58</td>
<td>182.63</td>
<td>188.16</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2,921.69</td>
<td>3,345.64</td>
<td>4,482.92</td>
<td>5,163.08</td>
<td>3,978.33</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1,587.63</td>
<td>1,636.34</td>
<td>1,842.56</td>
<td>1,925.30</td>
<td>1,747.96</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0.45</td>
<td>3.07</td>
<td>8.85</td>
<td>4.54</td>
<td>4.23</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>Sumbawa Barat</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td>10,152.83</td>
<td>4,094.67</td>
<td>-2.76</td>
<td>2,339.42</td>
<td>1,493.10</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>12,725.37</td>
<td>4,208.15</td>
<td>2.77</td>
<td>2,637.99</td>
<td>1,564.57</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>10,929.51</td>
<td>3,825.48</td>
<td>-9.09</td>
<td>3,019.67</td>
<td>1,635.73</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>12,965.93</td>
<td>4,274.22</td>
<td>11.73</td>
<td>3,432.02</td>
<td>1,720.93</td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td>11,693.41</td>
<td>4,100.63</td>
<td>0.66</td>
<td>2,857.28</td>
<td>1,603.58</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Tanjung Timur</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td>4,104.72</td>
<td>1,954.58</td>
<td>5.88</td>
<td>3,363.66</td>
<td>1,746.20</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>4,737.68</td>
<td>2,046.64</td>
<td>4.71</td>
<td>3,947.10</td>
<td>1,885.34</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>7,349.73</td>
<td>2,163.48</td>
<td>5.71</td>
<td>5,105.91</td>
<td>1,998.25</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>6,820.80</td>
<td>2,271.69</td>
<td>5.00</td>
<td>5,634.61</td>
<td>2,125.85</td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td>5,753.23</td>
<td>2,109.10</td>
<td>5.32</td>
<td>4,512.82</td>
<td>1,938.91</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Humbang Hasundutan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td>1,535.80</td>
<td>807.46</td>
<td>5.77</td>
<td>2,418.46</td>
<td>1,299.38</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>1,727.28</td>
<td>856.38</td>
<td>6.06</td>
<td>2,729.50</td>
<td>1,377.74</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>1,983.03</td>
<td>906.36</td>
<td>5.84</td>
<td>3,126.12</td>
<td>1,456.88</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>2,189.65</td>
<td>954.55</td>
<td>5.32</td>
<td>3,392.63</td>
<td>1,529.40</td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td>1,858.94</td>
<td>881.19</td>
<td>5.74</td>
<td>2,916.67</td>
<td>1,415.85</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Samosir</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td>1,196.46</td>
<td>868.59</td>
<td>3.64</td>
<td>2,121.11</td>
<td>1,423.05</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>1,287.46</td>
<td>908.46</td>
<td>4.59</td>
<td>2,414.62</td>
<td>1,501.68</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>1,392.38</td>
<td>953.85</td>
<td>5.00</td>
<td>2,744.39</td>
<td>1,585.97</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>1,519.32</td>
<td>1,002.46</td>
<td>5.10</td>
<td>3,056.05</td>
<td>1,669.36</td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td>1,348.91</td>
<td>933.34</td>
<td>4.58</td>
<td>2,584.04</td>
<td>1,545.01</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Buol</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td>721.45</td>
<td>477.70</td>
<td>7.24</td>
<td>1,472.51</td>
<td>976.07</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>829.67</td>
<td>512.42</td>
<td>7.27</td>
<td>1,686.12</td>
<td>1,044.08</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>999.78</td>
<td>549.83</td>
<td>7.30</td>
<td>2,024.20</td>
<td>1,118.70</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>1,139.67</td>
<td>590.06</td>
<td>7.32</td>
<td>2,332.19</td>
<td>1,201.22</td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td>922.64</td>
<td>532.50</td>
<td>7.28</td>
<td>1,878.75</td>
<td>1,085.02</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Waropen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td>442.53</td>
<td>292.80</td>
<td>6.17</td>
<td>442.53</td>
<td>292.80</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>512.33</td>
<td>312.89</td>
<td>6.86</td>
<td>512.33</td>
<td>312.89</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>599.53</td>
<td>332.54</td>
<td>6.28</td>
<td>599.53</td>
<td>332.54</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>688.67</td>
<td>353.77</td>
<td>6.38</td>
<td>688.67</td>
<td>353.77</td>
</tr>
<tr>
<td>rata-2</td>
<td>560.76</td>
<td>323.00</td>
<td>6.42</td>
<td>560.76</td>
<td>323.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: BPS, 2011 (diolah)
Lampiran 2. Analisis Klassen Typology
Tabel 4a  Rata-rata PDRB/kapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemekaran dan Provinsi (tahun 2005 – 2009)

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>KABUPATEN</th>
<th>Rata-2 PDRB/kp. (juta)</th>
<th>Rata-2 laju per tumb (%)</th>
<th>PROVINSI</th>
<th>Rata-2 PDRB/kp. (juta)</th>
<th>Rata-2 laju per tumb (%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Simeuleu</td>
<td>4,72</td>
<td>8,50</td>
<td>NAD</td>
<td>16,27*</td>
<td>-4,35*</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Aceh Singkil</td>
<td>5,59</td>
<td>2,40</td>
<td></td>
<td>11,41</td>
<td>4,39</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Bireun</td>
<td>10,77</td>
<td>7,79</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Aceh Barat Daya</td>
<td>8,43</td>
<td>4,27</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Gayo Lues</td>
<td>8,14</td>
<td>13,69</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Aceh Tamiang*</td>
<td>8,94</td>
<td>3,10</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Aceh Tamiang</td>
<td>7,33</td>
<td>2,79</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Nagan Raya</td>
<td>15,17</td>
<td>2,71</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>Aceh Jaya</td>
<td>8,07</td>
<td>-2,16</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>Bener Meriah</td>
<td>10,83</td>
<td>6,38</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>Nias Selatan</td>
<td>6,31</td>
<td>3,00</td>
<td></td>
<td>Sumatera</td>
<td>14,35</td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>Humbang Hasundutan</td>
<td>11,39</td>
<td>5,73</td>
<td></td>
<td>Utara</td>
<td>6,04</td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
<td>Pak-Pak Barat</td>
<td>6,10</td>
<td>5,83</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14.</td>
<td>Samosir</td>
<td>9,90</td>
<td>4,35</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15.</td>
<td>Serdang Bedagai</td>
<td>10,67</td>
<td>6,08</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16.</td>
<td>Kepulauan Mentawai</td>
<td>14,16</td>
<td>4,20</td>
<td></td>
<td>Sumatera</td>
<td>12,92</td>
</tr>
<tr>
<td>17.</td>
<td>Solok Selatan</td>
<td>7,24</td>
<td>5,97</td>
<td></td>
<td>Barat</td>
<td>5,75</td>
</tr>
<tr>
<td>18.</td>
<td>Dharmas Raya</td>
<td>10,23</td>
<td>6,28</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19.</td>
<td>Pasaman Barat</td>
<td>12,75</td>
<td>6,39</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20.</td>
<td>Kuantan Singingi</td>
<td>31,61</td>
<td>8,34</td>
<td></td>
<td>Riau</td>
<td>44,07*</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pelalawan*</td>
<td>39,50</td>
<td>6,93</td>
<td></td>
<td></td>
<td>24,55</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pelalawan</td>
<td>38,38</td>
<td>7,23</td>
<td></td>
<td></td>
<td>7,99</td>
</tr>
<tr>
<td>21.</td>
<td>Siak*</td>
<td>11,34</td>
<td>2,92</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Siak</td>
<td>43,53</td>
<td>7,46</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22.</td>
<td>Rokan Hulu*</td>
<td>21,01</td>
<td>6,68</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Rokan Hulu</td>
<td>19,89</td>
<td>7,12</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Rokan Hilir</strong></td>
<td><strong>48,58</strong></td>
<td><strong>3,41</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23.</td>
<td>Rokan Hilir</td>
<td><strong>20,53</strong></td>
<td><strong>7,82</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24.</td>
<td>Sarolangun*</td>
<td>11,64</td>
<td>6,88</td>
<td></td>
<td>Jambi</td>
<td>11,95*</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sarolangun</td>
<td>9,90</td>
<td>8,19</td>
<td></td>
<td></td>
<td>6,36*</td>
</tr>
<tr>
<td>25.</td>
<td>Muaro Jambi*</td>
<td>8,57</td>
<td>5,01</td>
<td></td>
<td></td>
<td>7,09</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Muaro Jambi</td>
<td>6,15</td>
<td>6,18</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26.</td>
<td>Tanj Jabung Timur*</td>
<td>25,34</td>
<td>4,99</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tanj Jabung Timur</td>
<td>9,24</td>
<td>10,40</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tebo</td>
<td>6,69</td>
<td>6,29</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28.</td>
<td>Banyuasin*</td>
<td>10,56</td>
<td>5,57</td>
<td></td>
<td>Sumatera</td>
<td>15,84*</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Banyuasin</td>
<td>7,42</td>
<td>5,93</td>
<td></td>
<td>Selatan</td>
<td>10,74</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>OKU Selatan</td>
<td>6,00</td>
<td>5,94</td>
<td></td>
<td></td>
<td>6,72</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>OKU Timur</td>
<td>6,39</td>
<td>5,87</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30.</td>
<td>Ogan Ilir*</td>
<td>6,91</td>
<td>5,05</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ogan Ilir</td>
<td>6,76</td>
<td>5,08</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Kaur</td>
<td>3,54</td>
<td>4,89</td>
<td></td>
<td>Bengkulu</td>
<td>7,93</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Seluma</td>
<td>3,50</td>
<td>5,99</td>
<td></td>
<td></td>
<td>5,44</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Mukomuko</td>
<td>6,52</td>
<td>5,07</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Lebong</td>
<td>8,76</td>
<td>5,10</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Kepahiang</td>
<td>9,55</td>
<td>5,55</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Lampung Timur*</td>
<td>7,80</td>
<td>3,09</td>
<td></td>
<td>Lampung</td>
<td>8,56*</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Lampung Timur</td>
<td>6,36</td>
<td>5,40</td>
<td></td>
<td></td>
<td>5,05*</td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>Kabupaten/Kota</td>
<td>Luas</td>
<td>X</td>
<td>Y</td>
<td>Kepulauan</td>
<td>Luas</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------</td>
<td>-----</td>
<td>----</td>
<td>-------------------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>38.</td>
<td>Way Kanan</td>
<td>5,32</td>
<td>4,62</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>39.</td>
<td>Bangka Barat*</td>
<td>28,10</td>
<td>4,36</td>
<td></td>
<td>Bangka</td>
<td>16,72*</td>
</tr>
<tr>
<td>40.</td>
<td>Way Kanan</td>
<td>27,74</td>
<td>4,62</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>41.</td>
<td>Bangka Selatan*</td>
<td>16,62</td>
<td>3,90</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>42.</td>
<td>Karimun</td>
<td>14,18</td>
<td>5,98</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>43.</td>
<td>Natuna</td>
<td>57,75</td>
<td>-0,47</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>44.</td>
<td>Bangka Barat*</td>
<td>115,04</td>
<td>3,90</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>45.</td>
<td>Balangan*</td>
<td>21,88</td>
<td>4,95</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>46.</td>
<td>Bengkulu</td>
<td>14,34</td>
<td>5,80</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>47.</td>
<td>Natuna</td>
<td>16,63</td>
<td>5,43</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>48.</td>
<td>Katingan</td>
<td>14,29</td>
<td>4,41</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>49.</td>
<td>Pulang Utara</td>
<td>7,87</td>
<td>5,20</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50.</td>
<td>Gunung Mada</td>
<td>10,73</td>
<td>5,05</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>51.</td>
<td>Barito Selatan*</td>
<td>12,14</td>
<td>5,49</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>52.</td>
<td>Murung Raya</td>
<td>17,03</td>
<td>4,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>53.</td>
<td>Tanah Meranti</td>
<td>18,96</td>
<td>5,42</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>54.</td>
<td>Balangan*</td>
<td>18,58</td>
<td>4,81</td>
<td></td>
<td>Selatan</td>
<td>11,75</td>
</tr>
<tr>
<td>55.</td>
<td>Barito Selatan*</td>
<td>18,58</td>
<td>5,33</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>56.</td>
<td>Kutai Barat</td>
<td>27,00</td>
<td>6,90</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>57.</td>
<td>Kutai Timur*</td>
<td>105,54</td>
<td>11,21</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>58.</td>
<td>Kutai Timur</td>
<td>102,13</td>
<td>11,55</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>59.</td>
<td>Malinau</td>
<td>19,27</td>
<td>6,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60.</td>
<td>Nunukan*</td>
<td>20,76</td>
<td>4,46</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>61.</td>
<td>Nunukan</td>
<td>13,69</td>
<td>12,18</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>62.</td>
<td>Penajam</td>
<td>17,77</td>
<td>3,59</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>63.</td>
<td>Penajam</td>
<td>10,26</td>
<td>7,14</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64.</td>
<td>Minahasa Selatan*</td>
<td>9,88</td>
<td>5,22</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>65.</td>
<td>Minahasa Utara*</td>
<td>10,52</td>
<td>5,28</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>66.</td>
<td>Kepulauan Talaud</td>
<td>7,56</td>
<td>5,18</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>67.</td>
<td>Bangka Selatan*</td>
<td>6,34</td>
<td>7,11</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>68.</td>
<td>Morowali*</td>
<td>12,67</td>
<td>11,89</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>69.</td>
<td>Morowali</td>
<td>10,23</td>
<td>7,49</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>70.</td>
<td>Buol</td>
<td>7,49</td>
<td>7,25</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>71.</td>
<td>Parigi Toulung</td>
<td>11,33</td>
<td>7,64</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>72.</td>
<td>Tojo Una</td>
<td>3,95</td>
<td>7,40</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>73.</td>
<td>Luwu Utara</td>
<td>6,41</td>
<td>7,94</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>74.</td>
<td>Luwu Selatan</td>
<td>27,36</td>
<td>2,34</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>75.</td>
<td>Konawe Selatan</td>
<td>6,82</td>
<td>8,29</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>76.</td>
<td>Bombana</td>
<td>6,80</td>
<td>7,38</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>77.</td>
<td>Wakatobi</td>
<td>4,97</td>
<td>8,12</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NO</td>
<td>Kabupaten/Kota</td>
<td>Nilai 1</td>
<td>Nilai 2</td>
<td>Kabupaten/Kota</td>
<td>Nilai 3</td>
<td>Nilai 4</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>---------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>Kolaka Utara</td>
<td>12,80</td>
<td>5,80</td>
<td>Gorontalo</td>
<td>5,26</td>
<td>7,46</td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>Boalemo</td>
<td>4,30</td>
<td>6,71</td>
<td>Sulawesi</td>
<td>5,61</td>
<td>7,04</td>
</tr>
<tr>
<td>84</td>
<td>Pohuwato</td>
<td>6,59</td>
<td>7,27</td>
<td>Barat</td>
<td>4,41</td>
<td>5,18</td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td>Bone Bolango</td>
<td>4,88</td>
<td>5,89</td>
<td>Maluku</td>
<td>4,40</td>
<td>5,21</td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td>Mamasa</td>
<td>5,65</td>
<td>5,61</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>Mamuju Utara</td>
<td>8,11</td>
<td>7,53</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>88</td>
<td>Maluku Tengg Barat</td>
<td>4,39</td>
<td>4,51</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>89</td>
<td>Kepulauan Aru</td>
<td>4,18</td>
<td>5,84</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>Seram Bagian Barat</td>
<td>3,07</td>
<td>4,56</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>91</td>
<td>Seram Bagian Timur*</td>
<td>2,56</td>
<td>4,27</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>92</td>
<td>Seram Bagian Timur</td>
<td>2,33</td>
<td>5,16</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>93</td>
<td>Buru</td>
<td>3,16</td>
<td>4,28</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>Halmahera Timur</td>
<td>4,59</td>
<td>7,19</td>
<td>Maluku Utara</td>
<td>3,63</td>
<td>5,72</td>
</tr>
<tr>
<td>95</td>
<td>Kepulauan Sula</td>
<td>3,12</td>
<td>5,16</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>96</td>
<td>Halmahera Selatan</td>
<td>3,42</td>
<td>5,43</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>97</td>
<td>Halmahera Utara</td>
<td>3,22</td>
<td>5,28</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>98</td>
<td>Kaimana</td>
<td>13,09</td>
<td>7,68</td>
<td>Papua Barat</td>
<td>15,28</td>
<td>6,38</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>Teluk Wondama</td>
<td>9,69</td>
<td>14,98</td>
<td></td>
<td>10,76</td>
<td>7,77</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>Teluk Bintuni*</td>
<td>14,06</td>
<td>11,42</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101</td>
<td>Teluk Bintuni</td>
<td>13,66</td>
<td>11,05</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td>Sorong Selatan</td>
<td>5,66</td>
<td>7,44</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td>Kep. Raja Ampat*</td>
<td>19,96</td>
<td>34,12</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td>Kep. Raja Ampat</td>
<td>8,39</td>
<td>4,97</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td>Supiori</td>
<td>18,88</td>
<td>0,50</td>
<td>Papua</td>
<td>26,53</td>
<td>8,63</td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>Paniai</td>
<td>4,74</td>
<td>6,81</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td>Puncak Jaya</td>
<td>5,08</td>
<td>11,09</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td>Mimika</td>
<td>265,74</td>
<td>10,28</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td>Boven Digoel</td>
<td>26,60</td>
<td>9,82</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>110</td>
<td>Mappi</td>
<td>6,08</td>
<td>15,54</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>111</td>
<td>Asmat</td>
<td>5,29</td>
<td>14,51</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>112</td>
<td>Yahukimo</td>
<td>1,20</td>
<td>7,92</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>113</td>
<td>Pegunungan Bintang</td>
<td>2,96</td>
<td>11,13</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>114</td>
<td>Tolikara</td>
<td>5,15</td>
<td>11,25</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>115</td>
<td>Sarmi</td>
<td>15,82</td>
<td>8,45</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>116</td>
<td>Keerom</td>
<td>11,78</td>
<td>14,32</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>117</td>
<td>Waropen</td>
<td>9,71</td>
<td>21,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*dengan minyak dan gas

Sumber: BPS (2010, diolah)
Lampiran 3. Pendukung Klassen Typology

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kabupaten</th>
<th>AHH</th>
<th>Pengeluaran/kapita</th>
<th>Lama sekolah</th>
<th>PDRBadhk</th>
<th>PDRBadhb</th>
<th>Kontribusi PAD pada APBD</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Belitung Timur</td>
<td>68.36</td>
<td>620</td>
<td>7.45</td>
<td>792.53</td>
<td>1700.38</td>
<td>9.67</td>
</tr>
<tr>
<td>Kuansing</td>
<td>68.11</td>
<td>628.9</td>
<td>7.8</td>
<td>2610.87</td>
<td>9230.06</td>
<td>2.76</td>
</tr>
<tr>
<td>Kutai Timur</td>
<td>68.25</td>
<td>619</td>
<td>7.61</td>
<td>14698.35</td>
<td>21585.27</td>
<td>3.82</td>
</tr>
<tr>
<td>Mimika</td>
<td>69.55</td>
<td>606.3</td>
<td>6.7</td>
<td>10673.45</td>
<td>37897.21</td>
<td>4.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Mamuju Utara</td>
<td>67.47</td>
<td>614.25</td>
<td>6.62</td>
<td>475.46</td>
<td>907.3</td>
<td>1.59</td>
</tr>
<tr>
<td>Kepai Kating</td>
<td>66.52</td>
<td>505.81</td>
<td>7.16</td>
<td>648.71</td>
<td>1181.05</td>
<td>2.89</td>
</tr>
<tr>
<td>Parigi Outong</td>
<td>68.1</td>
<td>617.86</td>
<td>7.02</td>
<td>2513.41</td>
<td>4467.13</td>
<td>1.61</td>
</tr>
<tr>
<td>Morotoli</td>
<td>65.22</td>
<td>621.47</td>
<td>7.63</td>
<td>1449.23</td>
<td>2444.54</td>
<td>2.92</td>
</tr>
<tr>
<td>Halmahera Timur</td>
<td>64.66</td>
<td>594.34</td>
<td>7.8</td>
<td>259.48</td>
<td>399.39</td>
<td>5.9</td>
</tr>
<tr>
<td>Boven Digoel</td>
<td>66.43</td>
<td>579.57</td>
<td>7</td>
<td>411.63</td>
<td>1007.85</td>
<td>1.17</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>67.267</td>
<td>600.75</td>
<td>6.88</td>
<td>3453.312</td>
<td>8082.018</td>
<td>3.673</td>
</tr>
<tr>
<td>Seruyan</td>
<td>67.9</td>
<td>618.27</td>
<td>7.7</td>
<td>885.95</td>
<td>1857.62</td>
<td>2.81</td>
</tr>
<tr>
<td>Murung Raya</td>
<td>67.95</td>
<td>627.41</td>
<td>6.96</td>
<td>832.85</td>
<td>1541.58</td>
<td>2.62</td>
</tr>
<tr>
<td>Balangan</td>
<td>61.36</td>
<td>610.63</td>
<td>6.3</td>
<td>1290.84</td>
<td>1985.01</td>
<td>3.56</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanah Lumbu</td>
<td>64.32</td>
<td>625.12</td>
<td>7</td>
<td>2746.93</td>
<td>4427.89</td>
<td>4.41</td>
</tr>
<tr>
<td>Supiori</td>
<td>65.48</td>
<td>585.81</td>
<td>7.7</td>
<td>106.26</td>
<td>271.27</td>
<td>2.62</td>
</tr>
<tr>
<td>Sukamara</td>
<td>67.73</td>
<td>626.3</td>
<td>7.02</td>
<td>538.24</td>
<td>836.38</td>
<td>2.76</td>
</tr>
<tr>
<td>Luwu Timur</td>
<td>70.72</td>
<td>612.81</td>
<td>7.47</td>
<td>4378.68</td>
<td>6415.44</td>
<td>9.78</td>
</tr>
<tr>
<td>Banggai Kep</td>
<td>63.09</td>
<td>600.34</td>
<td>7.09</td>
<td>604.44</td>
<td>1047.59</td>
<td>4.55</td>
</tr>
<tr>
<td>Sumbawa Barat</td>
<td>60.94</td>
<td>618.44</td>
<td>7</td>
<td>4100.63</td>
<td>11693.41</td>
<td>5.43</td>
</tr>
<tr>
<td>Mappi</td>
<td>65.79</td>
<td>573.89</td>
<td>3.8</td>
<td>227.43</td>
<td>481.67</td>
<td>0.98</td>
</tr>
<tr>
<td>Pohuwato</td>
<td>67.23</td>
<td>595.73</td>
<td>6.47</td>
<td>437.87</td>
<td>805.66</td>
<td>3.43</td>
</tr>
<tr>
<td>Lebong</td>
<td>65.87</td>
<td>606.47</td>
<td>7.47</td>
<td>457.02</td>
<td>829.8</td>
<td>3.88</td>
</tr>
<tr>
<td>Kolakautara</td>
<td>65.27</td>
<td>608.06</td>
<td>7.4</td>
<td>747.05</td>
<td>1396.85</td>
<td>2.33</td>
</tr>
<tr>
<td>Pasaman Barat</td>
<td>64.62</td>
<td>606.02</td>
<td>7.9</td>
<td>2326.44</td>
<td>4502.28</td>
<td>5.44</td>
</tr>
<tr>
<td>Kaimana</td>
<td>69.26</td>
<td>584</td>
<td>7.1</td>
<td>321.81</td>
<td>572.46</td>
<td>1.53</td>
</tr>
<tr>
<td>Lamandau</td>
<td>67.05</td>
<td>628.62</td>
<td>7.6</td>
<td>511.31</td>
<td>832.01</td>
<td>2.58</td>
</tr>
<tr>
<td>Katiman</td>
<td>67.3</td>
<td>623.61</td>
<td>7.76</td>
<td>1130.00</td>
<td>2039.75</td>
<td>3.34</td>
</tr>
<tr>
<td>Kep. Mentawai</td>
<td>68.28</td>
<td>595.92</td>
<td>6.5</td>
<td>476.99</td>
<td>1026.06</td>
<td>5.83</td>
</tr>
<tr>
<td>Rokat Hilir</td>
<td>70.89</td>
<td>637.73</td>
<td>7.6</td>
<td>11072.66</td>
<td>26602.11</td>
<td>7.16</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanjabung Timur</td>
<td>69.71</td>
<td>618.64</td>
<td>6.2</td>
<td>2109.1</td>
<td>5753.23</td>
<td>3.25</td>
</tr>
<tr>
<td>Natuna</td>
<td>68.1</td>
<td>604.09</td>
<td>6.9</td>
<td>2173.95</td>
<td>5151.68</td>
<td>1.87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>66.60</td>
<td>608.52</td>
<td>6.82</td>
<td>1722.19</td>
<td>81077.6</td>
<td>3.70</td>
</tr>
<tr>
<td>Luwu Utara</td>
<td>71.13</td>
<td>644.13</td>
<td>7</td>
<td>1300.75</td>
<td>2121.23</td>
<td>4.17</td>
</tr>
<tr>
<td>Waroeng</td>
<td>64.86</td>
<td>602.42</td>
<td>6.27</td>
<td>323</td>
<td>560.76</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Bombeha</td>
<td>67.3</td>
<td>598</td>
<td>6.23</td>
<td>348.61</td>
<td>796.64</td>
<td>16.94</td>
</tr>
<tr>
<td>Konawe Selatan</td>
<td>67.31</td>
<td>604.15</td>
<td>7.6</td>
<td>817.89</td>
<td>1754.83</td>
<td>2.69</td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>Kabupaten/Kota</td>
<td>Jumlah Penduduk (Ribu)</td>
<td>Jumlah Pengendali (Ribu)</td>
<td>Jumlah Perangkat (Ribu)</td>
<td>Jumlah Terjamin (Ribu)</td>
<td>Persentase ($/100)</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-----------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>--------------------------</td>
<td>-------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>solok selatan</td>
<td>64.35</td>
<td>606.35</td>
<td>7.57</td>
<td>563.78</td>
<td>1006.57</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>gayo lues</td>
<td>66.84</td>
<td>596.44</td>
<td>8.7</td>
<td>454.69</td>
<td>644.03</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>bengkayang</td>
<td>68.57</td>
<td>599.3</td>
<td>6.03</td>
<td>1035.92</td>
<td>1803.31</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>teluk wondama</td>
<td>67</td>
<td>597.65</td>
<td>6.39</td>
<td>150.1</td>
<td>242.76</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>dharmasraya</td>
<td>65.5</td>
<td>604.04</td>
<td>7.37</td>
<td>991.25</td>
<td>1939.28</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>serdang bedagai</td>
<td>68.79</td>
<td>622.9</td>
<td>8.6</td>
<td>3934.9</td>
<td>7019.11</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>bener meriah</td>
<td>67.41</td>
<td>597.84</td>
<td>8.49</td>
<td>680.26</td>
<td>1290.28</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>bireun</td>
<td>72.28</td>
<td>589.4</td>
<td>9.2</td>
<td>2310.82</td>
<td>4148.62</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>keerom</td>
<td>66.75</td>
<td>615.84</td>
<td>7.3</td>
<td>275.99</td>
<td>552.33</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>peg. Bintang</td>
<td>65.33</td>
<td>579.2</td>
<td>2.2</td>
<td>168.67</td>
<td>311.62</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>seluma</td>
<td>65.2</td>
<td>587.45</td>
<td>7.3</td>
<td>311.98</td>
<td>601.17</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>rote ndao</td>
<td>67.22</td>
<td>588.22</td>
<td>6.17</td>
<td>299.72</td>
<td>444.56</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>tojo una-2</td>
<td>63.59</td>
<td>605.77</td>
<td>7.81</td>
<td>413.01</td>
<td>732.55</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>kep. Aru</td>
<td>67.31</td>
<td>598.06</td>
<td>7.5</td>
<td>182.89</td>
<td>313.53</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>simeuleu</td>
<td>62.84</td>
<td>605.95</td>
<td>8.5</td>
<td>227.11</td>
<td>410.98</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>sekadau</td>
<td>67.27</td>
<td>598.62</td>
<td>6.06</td>
<td>582.36</td>
<td>921.74</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>wakatobi</td>
<td>67.83</td>
<td>589.39</td>
<td>6.52</td>
<td>203.83</td>
<td>535.67</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>tolikara</td>
<td>65.72</td>
<td>608.49</td>
<td>2.4</td>
<td>158.24</td>
<td>270.73</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>puncak jaya</td>
<td>67.21</td>
<td>626.46</td>
<td>6.1</td>
<td>262.45</td>
<td>579.73</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>asmat</td>
<td>66.1</td>
<td>589.58</td>
<td>3.86</td>
<td>189.47</td>
<td>396.89</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>rokan hulu</td>
<td>67.09</td>
<td>636.08</td>
<td>7.5</td>
<td>2352.89</td>
<td>8604.74</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>pelalawan</td>
<td>68.56</td>
<td>623.66</td>
<td>7.93</td>
<td>4209.27</td>
<td>11584.12</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>sarolangun</td>
<td>69.12</td>
<td>631.59</td>
<td>6.9</td>
<td>1015.01</td>
<td>2681.42</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>banyuasin</td>
<td>67.05</td>
<td>610.91</td>
<td>7</td>
<td>4142.41</td>
<td>8864.84</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>ogan ilir</td>
<td>65.68</td>
<td>604.07</td>
<td>7.46</td>
<td>1533.48</td>
<td>2735.56</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>nunukan</td>
<td>71.07</td>
<td>633.26</td>
<td>7.4</td>
<td>1272.8</td>
<td>2752.2</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>pnpjampaserutara</td>
<td>71.18</td>
<td>625.27</td>
<td>7.57</td>
<td>1744.2</td>
<td>2282.78</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>teluk bintuni</td>
<td>67.55</td>
<td>596.1</td>
<td>6.85</td>
<td>502.21</td>
<td>810.88</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>siak</td>
<td>71.34</td>
<td>634.19</td>
<td>7.93</td>
<td>15089.24</td>
<td>39276.08</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>bangkabaraton</td>
<td>67.54</td>
<td>624.2</td>
<td>6.67</td>
<td>2371.93</td>
<td>4620.39</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Jumlah</strong></td>
<td><strong>67.38</strong></td>
<td><strong>615.48</strong></td>
<td><strong>6.77</strong></td>
<td><strong>1700.96</strong></td>
<td><strong>3399.5</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>Daerah</td>
<td>Nomor</td>
<td>Populasi</td>
<td>Ekonomi</td>
<td>Kesehatan</td>
<td>Lainnya</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
<td>-----------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>pulang pisau</td>
<td>67.2</td>
<td>631.13</td>
<td>7.22</td>
<td>649.34</td>
<td>982.3</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>aceh tamiang</td>
<td>68.09</td>
<td>591.29</td>
<td>8.4</td>
<td>1216.15</td>
<td>1996.4</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>aceh jaya</td>
<td>67.84</td>
<td>591.47</td>
<td>8.7</td>
<td>248.92</td>
<td>634</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>aceh baratdaya</td>
<td>66.3</td>
<td>611.73</td>
<td>7.5</td>
<td>595.26</td>
<td>1075.37</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>lingga</td>
<td>69.88</td>
<td>623.18</td>
<td>7.2</td>
<td>513.27</td>
<td>791.06</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>muaro tambel</td>
<td>69.11</td>
<td>627.3</td>
<td>8.4</td>
<td>1035.55</td>
<td>2816.3</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>samosir</td>
<td>69.46</td>
<td>619.65</td>
<td>8.1</td>
<td>933.34</td>
<td>1348.91</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>minahasa selatan</td>
<td>71.69</td>
<td>610.86</td>
<td>8.44</td>
<td>1103.26</td>
<td>1880.47</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>gunung mas</td>
<td>67.55</td>
<td>627.39</td>
<td>8.68</td>
<td>598.81</td>
<td>979.87</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>minahasa utara</td>
<td>72.1</td>
<td>622.71</td>
<td>9.07</td>
<td>1134.09</td>
<td>1917.09</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>buru</td>
<td>66.3</td>
<td>602.01</td>
<td>7.2</td>
<td>235.63</td>
<td>384.69</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>hombang hsdt</td>
<td>67.64</td>
<td>609.62</td>
<td>8.74</td>
<td>881.19</td>
<td>1858.94</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>barito timur</td>
<td>67.67</td>
<td>625.01</td>
<td>8.44</td>
<td>579.57</td>
<td>1088.25</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>banggai selatan</td>
<td>67.31</td>
<td>590.09</td>
<td>5.92</td>
<td>1081.46</td>
<td>2144.09</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>karimun</td>
<td>69.81</td>
<td>628</td>
<td>7.8</td>
<td>1755.55</td>
<td>3262.82</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>sorong selatan</td>
<td>66</td>
<td>582.1</td>
<td>7</td>
<td>188.16</td>
<td>296.25</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>mambau</td>
<td>70.94</td>
<td>629.19</td>
<td>6.38</td>
<td>496.88</td>
<td>744.59</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>pak-tarab</td>
<td>67.05</td>
<td>608.63</td>
<td>8.1</td>
<td>142.06</td>
<td>246.97</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>OKU selatan</td>
<td>69.24</td>
<td>608.79</td>
<td>7.1</td>
<td>1113.59</td>
<td>2105.48</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>nias selatan</td>
<td>69.2</td>
<td>587.42</td>
<td>6.3</td>
<td>1111.17</td>
<td>1782.5</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>yahukimo</td>
<td>65.7</td>
<td>576.4</td>
<td>2.4</td>
<td>117.95</td>
<td>189.47</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>serambai gumtimur</td>
<td>65.43</td>
<td>583.45</td>
<td>7.6</td>
<td>131.26</td>
<td>217.04</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>lembata</td>
<td>66.1</td>
<td>592.79</td>
<td>6.71</td>
<td>137.69</td>
<td>295.49</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>serambayagbarat</td>
<td>66.21</td>
<td>587.53</td>
<td>8</td>
<td>284.99</td>
<td>456.35</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>kep. Sula</td>
<td>63.96</td>
<td>587.9</td>
<td>7.6</td>
<td>289.93</td>
<td>424.03</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>halmaherautara</td>
<td>64.92</td>
<td>590.2</td>
<td>7</td>
<td>379.61</td>
<td>556.64</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>halmahera selatan</td>
<td>64.82</td>
<td>594.2</td>
<td>7.4</td>
<td>491.52</td>
<td>662.16</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>kaur</td>
<td>66.61</td>
<td>604.6</td>
<td>7.5</td>
<td>219.89</td>
<td>419.72</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>manggarai barat</td>
<td>65.6</td>
<td>580.99</td>
<td>6.23</td>
<td>368.03</td>
<td>758.11</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>melawi</td>
<td>67.5</td>
<td>595.4</td>
<td>7.2</td>
<td>473.84</td>
<td>734.62</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>boalemo</td>
<td>67</td>
<td>595.4</td>
<td>6</td>
<td>282.71</td>
<td>570</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>maluku tenggbarat</td>
<td>63.7</td>
<td>583.87</td>
<td>8.11</td>
<td>376.21</td>
<td>620.58</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>pantai</td>
<td>66.5</td>
<td>579.6</td>
<td>6.2</td>
<td>316.63</td>
<td>608.7</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>bone trango</td>
<td>67.2</td>
<td>609.31</td>
<td>6.56</td>
<td>240.69</td>
<td>672.63</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>way kamban</td>
<td>68.93</td>
<td>602.25</td>
<td>6.5</td>
<td>1247.81</td>
<td>2052.96</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>aceh gililil</td>
<td>64.27</td>
<td>608.18</td>
<td>7.7</td>
<td>431.13</td>
<td>564.47</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>lampung timur</td>
<td>69.65</td>
<td>608.81</td>
<td>7.2</td>
<td>3852.48</td>
<td>7689.16</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>kep. Sula 4</td>
<td>67.38</td>
<td>554.6</td>
<td>7</td>
<td>535.46</td>
<td>820.31</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>banggai tengah</td>
<td>67.64</td>
<td>624.8</td>
<td>6.73</td>
<td>1189.62</td>
<td>2487.31</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Lanjutan Tabel 4b</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>pulang pisau</td>
</tr>
<tr>
<td>aceh tamiang</td>
</tr>
<tr>
<td>aceh jaya</td>
</tr>
<tr>
<td>aceh baratdaya</td>
</tr>
<tr>
<td>lingga</td>
</tr>
<tr>
<td>muaro tambel</td>
</tr>
<tr>
<td>samosir</td>
</tr>
<tr>
<td>minahasa selatan</td>
</tr>
<tr>
<td>gunung mas</td>
</tr>
<tr>
<td>minahasa utara</td>
</tr>
<tr>
<td>buru</td>
</tr>
<tr>
<td>hombang hsdt</td>
</tr>
<tr>
<td>barito timur</td>
</tr>
<tr>
<td>banggai selatan</td>
</tr>
<tr>
<td>karimun</td>
</tr>
<tr>
<td>sorong selatan</td>
</tr>
<tr>
<td>mambau</td>
</tr>
<tr>
<td>pak-tarab</td>
</tr>
<tr>
<td>OKU selatan</td>
</tr>
<tr>
<td>nias selatan</td>
</tr>
<tr>
<td>yahukimo</td>
</tr>
<tr>
<td>serambai gumtimur</td>
</tr>
<tr>
<td>lembata</td>
</tr>
<tr>
<td>serambayagbarat</td>
</tr>
<tr>
<td>kep. Sula</td>
</tr>
<tr>
<td>halmaherautara</td>
</tr>
<tr>
<td>halmahera selatan</td>
</tr>
<tr>
<td>kaur</td>
</tr>
<tr>
<td>manggarai barat</td>
</tr>
<tr>
<td>melawi</td>
</tr>
<tr>
<td>boalemo</td>
</tr>
<tr>
<td>maluku tenggbarat</td>
</tr>
<tr>
<td>pantai</td>
</tr>
<tr>
<td>bone trango</td>
</tr>
<tr>
<td>way kamban</td>
</tr>
<tr>
<td>aceh gililil</td>
</tr>
<tr>
<td>lampung timur</td>
</tr>
<tr>
<td>kep. Sula 4</td>
</tr>
<tr>
<td>banggai tengah</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber : BPS, 2009, 2010
Lampiran 4. Peta Klasifikasi menurut Klassen Tipology

Peta Indonesia

Daerah berkembang cepat (kabupaten Rote Ndao)
Daerah relatif tertinggal (Kabupaten Mamasa)
Daerah maju tetap tertinggal (kabupaten Rokan Hilir)

Daerah maju tertepi terdepan (kabupaten Sumatera Utara)

Daerah berkembang cepat
Daerah maju tertepi terdepan
Peta Propinsi Riau

1. Daerah yang merupakan kota-kota besar di Riau
2. Daerah yang merupakan kota-kota kecil di Riau
3. Daerah yang memiliki potensi pertanian
4. Daerah yang memiliki potensi perikanan
5. Daerah yang memiliki potensi energi terbarukan

Peta Propinsi Jambi

1. Daerah yang merupakan kota-kota besar di Jambi
2. Daerah yang merupakan kota-kota kecil di Jambi
3. Daerah yang memiliki potensi pertanian
4. Daerah yang memiliki potensi perikanan
5. Daerah yang memiliki potensi energi terbarukan
Peta Provinsi Bengkulu

Dan Provinsi Bangka Belitung

Peta Provinsi Bengkulu

Hak Cipta Ditunduk Undang-Undang

Bogor Agricultural University

Peta Provinsi Bangka Belitung

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)
Peta Provinsi Sulawesi Selatan

1. Dilihat mengenai sebagian luas seluas 50% daerah di dalam wilayah satu provinsi. Penelitian ini lebih lanjut dengan penelitian yang lebih detail pada daerah.

2. Pengelompokan ruang untuk kebijakan yang lebih detail pada daerah.

Peta Provinsi Sulawesi Tenggara

1. Dilihat mengenai sebagian luas seluas 50% daerah di dalam wilayah satu provinsi. Penelitian ini lebih lanjut dengan penelitian yang lebih detail pada daerah.

2. Pengelompokan ruang untuk kebijakan yang lebih detail pada daerah.
Lampiran 5. Data Pendukung Analisis 1

Tabel 5a Pertumbuhan PDRBadhk dan pertumbuhan penduduk di tiga kabupaten pemekaran dan kabupaten induknya selama 2005 - 2009

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kabupaten pemekaran</th>
<th>Tahun</th>
<th>Laju pertumbuhan ekonomi**)</th>
<th>Laju pertumbuhan penduduk</th>
<th>Kabupaten induk</th>
<th>Laju pertumbuhan ekonomi</th>
<th>Laju pertumbuhan penduduk</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Rote Ndao</td>
<td>2005</td>
<td>6,47</td>
<td>12,41</td>
<td>Kupang</td>
<td>10,31</td>
<td>2,05</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2006</td>
<td>5,05</td>
<td>-5,46</td>
<td></td>
<td>-2,21</td>
<td>5,46</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2007</td>
<td>4,97</td>
<td>1,75</td>
<td></td>
<td>4,43</td>
<td>3,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>5,46</td>
<td>1,50</td>
<td></td>
<td>5,03</td>
<td>2,74</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>4,68</td>
<td>1,43</td>
<td></td>
<td>3,84</td>
<td>-17,20</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Rata-2</td>
<td>5,33</td>
<td>2,33</td>
<td></td>
<td>4,28</td>
<td>-3,95</td>
</tr>
<tr>
<td>Mamasa</td>
<td>2005</td>
<td>3,70</td>
<td>tak ada data</td>
<td>Polewali</td>
<td>5,14</td>
<td>0,69</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2006</td>
<td>5,46</td>
<td>tak dp dihit</td>
<td>Mandar</td>
<td>6,45</td>
<td>-29,35</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2007</td>
<td>6,67</td>
<td>2,06</td>
<td></td>
<td>6,41</td>
<td>1,13</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>7,87</td>
<td>0,70</td>
<td></td>
<td>7,65</td>
<td>0,26</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>4,33</td>
<td>-0,66</td>
<td></td>
<td>4,92</td>
<td>0,21</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Rata-2</td>
<td>5,61</td>
<td>0,70</td>
<td></td>
<td>6,11</td>
<td>-5,41</td>
</tr>
<tr>
<td>Rokan Hilir</td>
<td>2005</td>
<td>4,16*/7,92</td>
<td>4,08</td>
<td>Bengkalis</td>
<td>4,63*/7,40</td>
<td>4,75</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2006</td>
<td>3,72*/10,15</td>
<td>-8,88</td>
<td></td>
<td>3,88*/7,69</td>
<td>1,43</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2007</td>
<td>2,04*/7,95</td>
<td>21,21</td>
<td></td>
<td>0,66*/8,26</td>
<td>14,13</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>4,99*/7,88</td>
<td>7,91</td>
<td></td>
<td>4,30*/7,78</td>
<td>0,81</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>2,12*/7,26</td>
<td>2,57</td>
<td></td>
<td>1,17*/6,97</td>
<td>-31,47</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Rata-2</td>
<td>3,41*/7,82</td>
<td>5,38</td>
<td></td>
<td>2,93*/7,62</td>
<td>-2,07</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*) dengan minyak dan gas  **) nasional rata-rata 5,63% (2005-2009)
Lampiran 6. Indeks Diversitas *Entropy* Tiga Kabupaten Pemekaran

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>sektor</th>
<th>nilai PDRB</th>
<th>Pi</th>
<th>LnPi</th>
<th>Pi.LnPi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>pertanian</td>
<td>147.85</td>
<td>0.447298</td>
<td>-0.804529434</td>
<td>-0.35986</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>pertambangan dan penggalian</td>
<td>4.23</td>
<td>0.012797</td>
<td>-4.358525688</td>
<td>-0.05578</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>industri pengolahan non migas</td>
<td>6.34</td>
<td>0.019181</td>
<td>-3.953848912</td>
<td>-0.07584</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>listrik, gas dan air bersih</td>
<td>1.17</td>
<td>0.00354</td>
<td>-5.643723932</td>
<td>-0.01998</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>bangunan</td>
<td>20.72</td>
<td>0.062685</td>
<td>-2.769628263</td>
<td>-0.17361</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>pertambangan, restoran dan hotel</td>
<td>53.52</td>
<td>0.161917</td>
<td>-1.820672265</td>
<td>-0.2948</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>pengangkutan dan komunikasi</td>
<td>17.15</td>
<td>0.051885</td>
<td>-2.958729507</td>
<td>-0.15351</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>bank, non bank, sewa</td>
<td>5.22</td>
<td>0.015792</td>
<td>-4.148230279</td>
<td>-0.06551</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>jasa-jasa lainnya</td>
<td>74.33</td>
<td>0.224874</td>
<td>-1.492213042</td>
<td>-0.33556</td>
</tr>
</tbody>
</table>

TOTAL | 330.54 |

\[
S = \frac{1.534453}{2.197225} = 0.69836
\]

Tabel 5b Indeks Diversitas Entropy tiga kabupaten

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sector</th>
<th>PDRB</th>
<th>Pi</th>
<th>LnPi</th>
<th>Pi.LnPi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>pertanian</td>
<td>320.7</td>
<td>0.593823</td>
<td>-0.521174138</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>pertambangan dan penggalian</td>
<td>2.18</td>
<td>0.004037</td>
<td>-5.512355368</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>industri pengolahan non migas</td>
<td>19.45</td>
<td>0.036015</td>
<td>-3.323833174</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>listrik, gas dan air bersih</td>
<td>9.81</td>
<td>0.018165</td>
<td>-4.008277971</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>bangunan</td>
<td>26.34</td>
<td>0.048772</td>
<td>-3.020591548</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>pertambangan, restoran dan hotel</td>
<td>57.56</td>
<td>0.106581</td>
<td>-2.23852362</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>pengangkutan dan komunikasi</td>
<td>10.04</td>
<td>0.018591</td>
<td>-3.98510313</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>bank, non bank, sewa</td>
<td>23.6</td>
<td>0.043699</td>
<td>-3.130433532</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>jasa-jasa lainnya</td>
<td>79.22</td>
<td>0.146687</td>
<td>-1.919451452</td>
</tr>
</tbody>
</table>

TOTAL | 540.06 |

\[
S = \frac{1.402632}{2.197225} = 0.638365
\]

Tabel 4.2c. PDRB Kab. Mamasa adhk 2000 menurut sektor th 2009

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sector</th>
<th>PDRB</th>
<th>Pi</th>
<th>LnPi</th>
<th>Pi.LnPi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>pertanian</td>
<td>7871.92</td>
<td>0.536055</td>
<td>-0.62351912</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>pertambangan dan penggalian</td>
<td>19752.18</td>
<td>1.345066</td>
<td>0.296442748</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>industri pengolahan non migas</td>
<td>3657.51</td>
<td>0.249066</td>
<td>-1.390038529</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>listrik, gas dan air bersih</td>
<td>26.97</td>
<td>0.001837</td>
<td>-6.299851259</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>bangunan</td>
<td>174.59</td>
<td>0.011889</td>
<td>-4.432136028</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>pertambangan, restoran dan hotel</td>
<td>2200.38</td>
<td>0.149839</td>
<td>-1.898191044</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>pengangkutan dan komunikasi</td>
<td>147.48</td>
<td>0.010043</td>
<td>-4.600883823</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>bank, non bank, sewa</td>
<td>171.88</td>
<td>0.011705</td>
<td>-4.447779837</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>jasa-jasa lainnya</td>
<td>400.89</td>
<td>0.027299</td>
<td>-3.600889323</td>
</tr>
</tbody>
</table>

TOTAL | 14684.92 |

\[
S = \frac{0.826972}{2.197225} = 0.376371
\]
Lampiran 6a.

Tabel 5c. Indeks Williamson berdasarkan PDRBadhb per kapita (ribuan rupiah) dan jumlah penduduk (orang) per kecamatan Kabupaten Rote Ndao tahun 2004 – 2008

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Rote Lepas</td>
<td>1927,36</td>
<td>17434</td>
<td>1996,28</td>
<td>18129</td>
<td>2247,06</td>
<td>18382</td>
<td>2441,54</td>
<td>18624</td>
<td>2696,63</td>
<td>18834</td>
</tr>
<tr>
<td>Rote Laut</td>
<td>2428,61</td>
<td>9172</td>
<td>2499,66</td>
<td>9867</td>
<td>2842,72</td>
<td>10119</td>
<td>3087,45</td>
<td>10362</td>
<td>3407,37</td>
<td>10574</td>
</tr>
<tr>
<td>Lobato</td>
<td>1971,54</td>
<td>19685</td>
<td>2020,99</td>
<td>20380</td>
<td>2279,62</td>
<td>20632</td>
<td>2464,53</td>
<td>20876</td>
<td>2695,15</td>
<td>21086</td>
</tr>
<tr>
<td>Rote Timur</td>
<td>3242,84</td>
<td>18906</td>
<td>3314,59</td>
<td>19601</td>
<td>3715,20</td>
<td>19851</td>
<td>4058,58</td>
<td>20092</td>
<td>4445,06</td>
<td>20302</td>
</tr>
<tr>
<td>Rote Timur Utara</td>
<td>2779,09</td>
<td>7196</td>
<td>2866,78</td>
<td>7886</td>
<td>3205,67</td>
<td>8138</td>
<td>3485,09</td>
<td>8379</td>
<td>3830,24</td>
<td>8589</td>
</tr>
<tr>
<td>Rote Timur B.</td>
<td>3479,03</td>
<td>3876</td>
<td>3588,86</td>
<td>4476</td>
<td>4013,05</td>
<td>4729</td>
<td>4379,42</td>
<td>4968</td>
<td>4831,45</td>
<td>5177</td>
</tr>
<tr>
<td>Pantai Baru</td>
<td>4475,20</td>
<td>11306</td>
<td>4608,22</td>
<td>12056</td>
<td>5043,82</td>
<td>12309</td>
<td>5505,25</td>
<td>12561</td>
<td>5989,69</td>
<td>12771</td>
</tr>
<tr>
<td>Rote Barat</td>
<td>3138,22</td>
<td>15479</td>
<td>3235,48</td>
<td>16219</td>
<td>3632,37</td>
<td>16469</td>
<td>3942,21</td>
<td>16691</td>
<td>4329,35</td>
<td>16901</td>
</tr>
<tr>
<td>Kabupaten Rote Ndao</td>
<td>2943,07</td>
<td>103054</td>
<td>3029,14</td>
<td>108614</td>
<td>3396,33</td>
<td>110617</td>
<td>3698,92</td>
<td>112553</td>
<td>4063,98</td>
<td>114236</td>
</tr>
</tbody>
</table>


<table>
<thead>
<tr>
<th>Kabupaten Pemekaran</th>
<th>Tahun</th>
<th>PDRB/kapita**) (juta rupiah)</th>
<th>IPM</th>
<th>Kabupaten induk</th>
<th>PDRB per kapita</th>
<th>IPM</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Rote Ndao</td>
<td>2005</td>
<td>3,18</td>
<td>62,10</td>
<td>Kupang</td>
<td>3,87</td>
<td>62,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2006</td>
<td>3,39</td>
<td>64,26</td>
<td></td>
<td>4,15</td>
<td>63,12</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2007</td>
<td>3,70</td>
<td>64,61</td>
<td></td>
<td>4,52</td>
<td>64,57</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>4,07</td>
<td>65,29</td>
<td></td>
<td>5,01</td>
<td>65,02</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>4,51</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>5,46</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Rata-2</td>
<td></td>
<td>3,77</td>
<td>-</td>
<td>Rata-2</td>
<td>4,60</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Mamasa</td>
<td>2005</td>
<td>4,36</td>
<td>67,50</td>
<td>Polewali</td>
<td>3,78</td>
<td>63,30</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2006</td>
<td>4,80</td>
<td>68,72</td>
<td>Mandar</td>
<td>4,45</td>
<td>63,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2007</td>
<td>5,43</td>
<td>69,26</td>
<td></td>
<td>5,03</td>
<td>64,77</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>6,51</td>
<td>69,79</td>
<td></td>
<td>6,07</td>
<td>65,91</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>7,15</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>7,04</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Rata-2</td>
<td></td>
<td>5,65</td>
<td>-</td>
<td>Rata-2</td>
<td>5,27</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Rokan Hilir</td>
<td>2005</td>
<td>37,93*/16,63</td>
<td>68,60</td>
<td>Bengkalis</td>
<td>56,38*/13,04</td>
<td>72,90</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2006</td>
<td>43,44*/18,94</td>
<td>70,89</td>
<td></td>
<td>65,52*/14,57</td>
<td>73,10</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2007</td>
<td>45,66*/19,24</td>
<td>71,06</td>
<td></td>
<td>80,79*/16,87</td>
<td>73,36</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>55,06*/21,88</td>
<td>71,51</td>
<td></td>
<td>106,52*/20,40</td>
<td>74,12</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2009</td>
<td>60,83*/25,97</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>158,86*/32,74</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Rata-2</td>
<td></td>
<td>48,58*/20,53</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Yulistiani, et.al (2007); BPS (2009)
*) dengan minyak dan gas. **) PDB/kapita nasional Rp 23.911.788,77 (BPS, 2011)
Lampiran 8. Pendukung Analisis 2

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kabupaten</th>
<th>Tahun</th>
<th>IPM</th>
<th>Penduduk miskin (%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Rote Ndao</td>
<td>2005</td>
<td>62,10</td>
<td>- Menurun dari 77,63 (2005)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2006</td>
<td>64,26</td>
<td>menjadi 32,19 (2009). Kupang</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2007</td>
<td>64,61</td>
<td>22,84%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>65,29</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2006</td>
<td>68,72</td>
<td>menjadi 68,88 (2008)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2007</td>
<td>69,19</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>69,79</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2006</td>
<td>70,89</td>
<td>menjadi 10,26 (2009)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2007</td>
<td>71,06</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2008</td>
<td>71,51</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


Kemiskinan nasional (BPS, Agustus 2010) : kota = 12,77 juta; desa = 22,19 juta (34,96 juta, tahun 2008) atau 11,65% dan 18,93% (15,42% tahun 2008). Kota = 11,91 juta, desa = 20,62 juta (32,53 juta tahun 2009) atau 10,72% dan 17,35% (14,15% tahun 2009).

Kematian penduduk Kabupaten Rote Ndao (Rote Ndao dalam Angka 2010):

Penduduk usia 15 – 59 tahun yang sakit (10 jenis penyakit yang diderita penduduk Kabupaten Rote Ndao) tahun 2009 sebanyak 50,420 kasus. Jumlah penduduk usia produktif sebanyak 13,9% atau 63,601,9 jiwa.
Lampiran 8. Data Pendukung Analisis 2

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Unsor pelayanan</th>
<th>Kabupaten Rote Ndao (%)</th>
<th>Kabupaten Mamasa (%)</th>
<th>Kabupaten Rokan Hilir (%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Prosedur pelayanan</td>
<td>76,25</td>
<td>68,42</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Persyaratan pelayanan</td>
<td>78,75</td>
<td>73,68</td>
<td>66,25</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Kecepatan pelayanan</td>
<td>71,25</td>
<td>73,68</td>
<td>63,75</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Keadilan dalam pelayanan</td>
<td>63,75</td>
<td>54,74</td>
<td>58,75</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Kewajaran biaya</td>
<td>71,25</td>
<td>64,21</td>
<td>72,50</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Kepastian biaya</td>
<td>61,25</td>
<td>68,42</td>
<td>51,25</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Jadwal/waktu pelayanan</td>
<td>53,75</td>
<td>51,58</td>
<td>77,50</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Kejelasan petugas pelayanan</td>
<td>66,25</td>
<td>73,68</td>
<td>71,25</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Kedisiplinan petugas</td>
<td>60</td>
<td>66,32</td>
<td>61,25</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Tanggungjawab petugas</td>
<td>70</td>
<td>72,63</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Kemampuan petugas</td>
<td>70</td>
<td>70,53</td>
<td>72,50</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Sikap petugas</td>
<td>65</td>
<td>64,21</td>
<td>67,50</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Kenyamanan tempat pelayanan</td>
<td>73,75</td>
<td>70,53</td>
<td>60,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Keamanan tempat pelayanan</td>
<td>75</td>
<td>75,79</td>
<td>70</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Rata-rata: 68,30 67,74 66,61

Sumber: data primer, 2011

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Sub variabel</th>
<th>Kabupaten Rote Ndao (%)</th>
<th>Kabupaten Mamasa (%)</th>
<th>Kabupaten Rokan Hilir (%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Aktivitas masyarakat</td>
<td>76,25</td>
<td>71,58</td>
<td>73,75</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Konflik di masyarakat</td>
<td>68,75</td>
<td>68,42</td>
<td>71,25</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Penyebab konflik</td>
<td>47,50</td>
<td>35,79</td>
<td>47,50</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Peranan tokoh masyarakat /adat dalam konflik</td>
<td>87,50</td>
<td>57,90</td>
<td>40,00</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Peranan tokoh di masyarakat</td>
<td>87,50</td>
<td>70,53</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Penanganan konflik</td>
<td>82,50</td>
<td>83,16</td>
<td>82,50</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Rata-rata: 75,00 64,56 59,17

Sumber: data primer, 2011

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Sub variabel</th>
<th>Kabupaten Rote Ndao (%)</th>
<th>Kabupaten Mamasa (%)</th>
<th>Kabupaten Rokan Hilir (%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kondisi lingkungan hidup</td>
<td>57,50</td>
<td>62,11</td>
<td>71,25</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Sering terjadi bencana alam</td>
<td>52,50</td>
<td>76,84</td>
<td>66,25</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Penyebab bencana alam</td>
<td>78,75</td>
<td>75,79</td>
<td>66,25</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Kondisi sumberdaya alam</td>
<td>63,75</td>
<td>63,16</td>
<td>67,50</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Pengelolaan lingk hidup oleh PemDa</td>
<td>71,75</td>
<td>50,53</td>
<td>62,50</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Pelanggaran pemanfaatan tata ruang</td>
<td>51,25</td>
<td>68,42</td>
<td>62,50</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Rata-rata: 62,58 66,14 66,04

Sumber: data primer, 2011
9. Tabel 11a Kinerja birokrasi di tiga kabupaten pemekaran

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kabupaten</th>
<th>SOTK</th>
<th>Anggaran belanja</th>
<th>Pelayanan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Rote Ndao</td>
<td></td>
<td>Belanja pegawai (Rp 114.034.060 juta)</td>
<td>- Prosedur dan persyaratan pelayanan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>belanja barang dan jasa serta belanja modal</td>
<td>lebih mudah</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(Rp 165.537.43 juta)</td>
<td>- Pelayanan lebih cepat</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>- Kedalian dalam peyangan baik</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>- Keamanan dan kenyamanan lebih baik</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>- Jadwal waktu sering molor</td>
</tr>
<tr>
<td>Mamasa</td>
<td></td>
<td>Belanja pegawai (Rp 136.287.08 juta)</td>
<td>- Prosedur dan persyaratan pelayanan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>belanja barang, jasa dan belanja modal</td>
<td>lebih mudah</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(Rp 177.366.13 juta)</td>
<td>- Pelayanan lebih cepat</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>- Kenyamanan kurang, keamanan baik</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>- Kedalian dan jadwal tidak jelas</td>
</tr>
<tr>
<td>Rokan Hilir</td>
<td></td>
<td>Belanja pegawai (Rp 550.970,23 juta)</td>
<td>- Prosedur dan persyaratan pelayanan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>belanja barang, jasa dan belanja modal</td>
<td>lebih jelek daripada dua kabupaten</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(Rp 1.833.828,53 juta)</td>
<td>lainnya</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>- Pelayanan lebih jelek dari dua kabupaten lainnya</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>- KKN dan biaya pelayana tidak jelas</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>- Kenyamanan dan keamanan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>pelayanan lebih jelek dari dua kabupaten lainnya</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber : BPS, 2011 dan data primer, 2011
| Tabel 1. laju ekonomi dan PDRB per kapita 114 |

[Diagram and Table]

1. Diharapkan pembangunan tercipta berbasis kebijakan yang baik untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat efektivitas kebijakan yang telah diambil.
| Tabel 3.PAD/APBD dan penduduk miskin 114 kabupaten |

<table>
<thead>
<tr>
<th>pddkmiskin</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>10.00</td>
</tr>
<tr>
<td>20.00</td>
</tr>
<tr>
<td>30.00</td>
</tr>
<tr>
<td>40.00</td>
</tr>
<tr>
<td>50.00</td>
</tr>
<tr>
<td>60.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Diagram menunjukkan hubungan antara PAD/APBD dan penduduk miskin di 114 kabupaten.
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>IPM</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>00</td>
<td>10.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>30.00</td>
<td>peddmiskin</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>40.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>50.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>60.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>70.00</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>ROKAN HI</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>20</td>
<td>20.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>30.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>40.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>50.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>60.00</td>
<td>peddmiskin</td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>70.00</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>MAMASA</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10</td>
<td>10.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>20.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>30.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>40.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>50.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>60.00</td>
<td>peddmiskin</td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>70.00</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabel 6. Laju ekonomi dan PDRB per kapita tiga kabupaten

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kabupaten</th>
<th>PDRB</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ROHANI</td>
<td>10,50</td>
</tr>
<tr>
<td>MAWA</td>
<td>20,60</td>
</tr>
<tr>
<td>ROTENIA</td>
<td>30,70</td>
</tr>
<tr>
<td>50,80</td>
<td>40,90</td>
</tr>
<tr>
<td>60,10</td>
<td>70,20</td>
</tr>
<tr>
<td>80,30</td>
<td>90,40</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Tabel 24 Persepsi masyarakat terhadap SDA/LH dan porsi PAD dalam APBD

![Diagram Persepsi masyarakat terhadap SDA/LH dan porsi PAD dalam APBD](image)
<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabel 26 Persepsi masyarakat terhadap sosial kemasyarakatan dari APBD</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Hak cipta milik IPB (Universitas Padjadjaran Bogor)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>PadAPBD</th>
<th>MAHASA</th>
<th>APAH</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0.00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8.00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabel 21 Porsi PAD/APBD dan pembangunan manusia
PDRBpkpt

matrik PDRB per kapita dan pembangunan manusia di lingkup kabupaten

Hak Cipta Diliurungi Lindung-Lindung

Bogor Agricultural University